

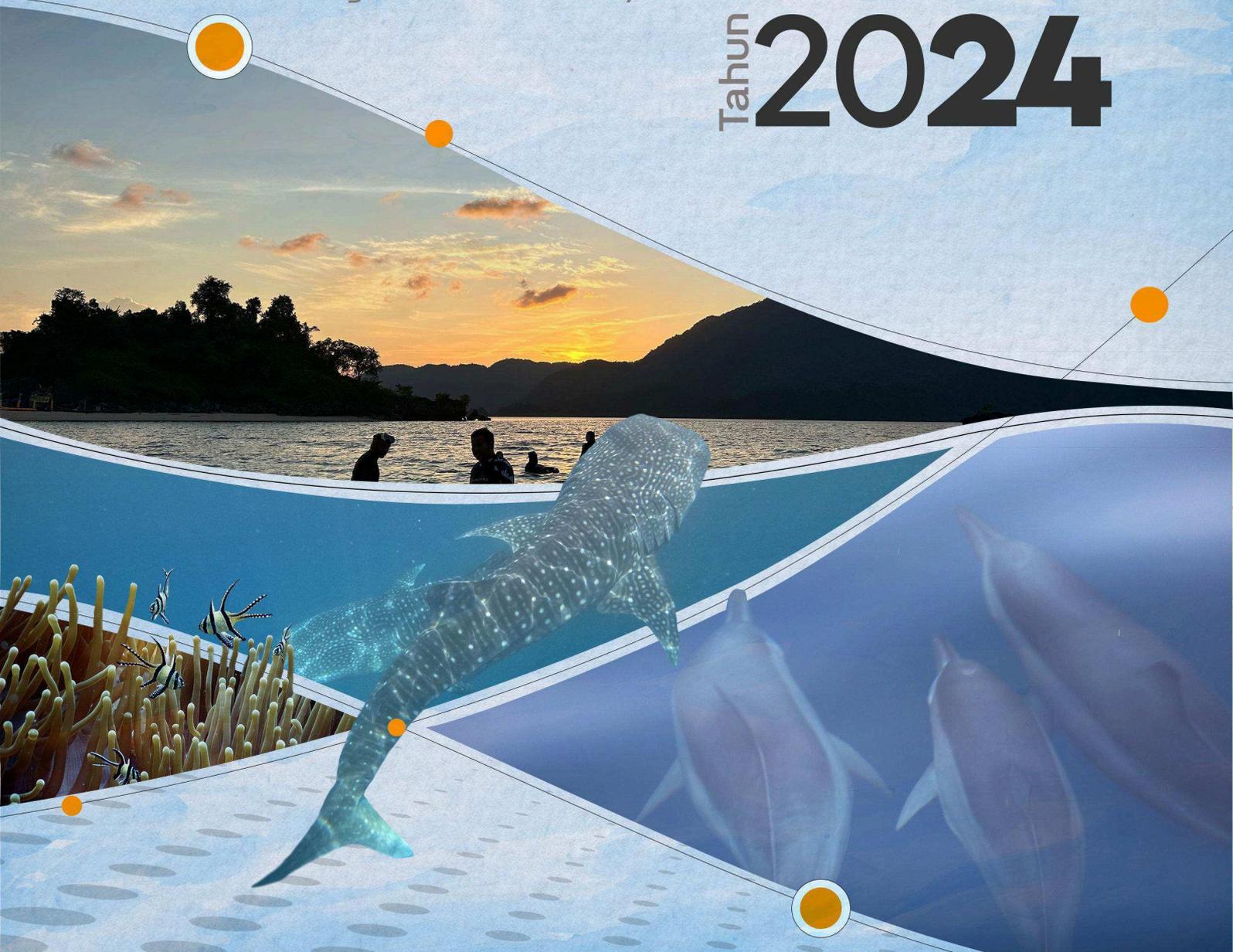


KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar

Tahun **2024**



BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar



#2024
KKP BEYOND

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2024 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja berisi gambaran menyeluruh organisasi sekaligus berupa informasi mengenai target dan capaian hasil kinerja BPSPL Makassar, dalam hal ini capaian pada Tahun 2024. Selain itu, laporan kinerja juga meliputi capaian tujuan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi program, serta tinjauan dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.

diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan dan tuntutan publik yang menghendaki agar akuntabilitas senantiasa dikedepankan oleh setiap instansi pemerintah serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan untuk pemangku kepentingan yang lebih tinggi.

Disadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Makassar diucapkan terima kasih

Maros, 14 Januari 2024

**Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Makassar**



Ditandatangani
Secara Elektronik

Permana Yudiarso, S.T., M.T.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja tahun 2024 BPSPL Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024. Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada tahun 2024 ini mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024 terdiri atas satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan lima Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis/ NPSS atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Tahun 2024 adalah **110,97** dengan predikat kinerja **“Istimewa”**.

Nilai capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

(IKU 1) Nilai PNBK BPSPL Makassar dengan capaian 168.3% atau 120% (kinerjaku) dengan capaian 849.310.891 juta dari target 500 juta.

(IKU 2) Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan capaian 100% dengan capaian 320 orang dari target 320 orang.

(IKU 3) Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan capaian 100% dengan capaian 3 (tiga) dokumen dari target capaian 3 (tiga) dokumen.

(IKU 4) Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan capaian 250% atau 120% dengan capaian 5 (lima) daerah dari target 2 (dua) daerah.

(IKU 5) Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan capaian 2 (dua) kesepakatan dari target 1 (satu) kesepakatan.

(IKU 6) Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan capaian 100% dari target 3 (tiga) kelompok dengan realisasi 3 (tiga) kelompok.

(IKU 7) Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru dengan capaian 210% atau 120% (kinerjaku) dengan capaian 105 orang dari target 50 orang.

(IKU 8) Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan capaian 133% atau 120% (kinerjaku) dengan capaian 8 (delapan) jenis dari target 6 (enam) jenis.

(IKU 9) Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan capaian 180% atau 120%

(kinerjaku) dengan capaian 9 (Sembilan) jenis dari target 5 (lima) jenis

(IKU 10) Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan capaian 100% dengan capaian 1 (satu) dokumen dari target 1 (satu) dokumen

(IKU 11) Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan capaian 4 (empat) kawasan dari target 4 (empat) kawasan

(IKM 12) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar dengan capaian persentase capaian 106.43% dengan realisasi 99.79 dari target 93.76

(IKM 13) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPSPL Makassar dengan capaian persentase capaian 140.84% atau 120% (kinerjaku) dengan realisasi 100 dari target 71

(IKM 14) Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan capaian persentase capaian 116.55% dengan realisasi 87.41 dari target 75

(IKM 15) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar dengan %capaian 103.16% dengan realisasi 90.78 dari target 81

(IKM 16) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar dengan %capaian 109.38% dengan realisasi 88.60 dari target 81

(IKM 17) Laporan SPIP yang disusun di BPSPL Makassar telah mencapai target dengan capaian 100% dengan total capaian 4 (empat) laporan realisasi 1 (satu) laporannya untuk setiap triwulan.

(IKM 18) Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah mencapai target dengan % capaian 141.84% atau 120% (kinerjaku) dengan realisasi nilai 133.3 dari target 94.

(IKM 19) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai target dengan % capaian 125% atau 120% (kinerjaku) dengan realisasi 100% dari target 80%

(IKM 20) Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan % capaian 100% dengan realisasi 100% dari target 100%

(IKM 21) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan % capaian 125% atau 120% (kinerjaku) dengan realisasi 100% dari target 80%

(IKM 22) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan capaian 124,38% atau 120% (kinerjaku) dengan nilai capaian 80,85 dari target 85

Total pagu anggaran tahun 2024 BPSPL Makassar pagu anggaran tahun ini adalah sebesar **Rp 20.375.945.000,-** yang berasal dari Rupiah Murni, PNBP, dan PHLN dimana realisasi anggaran BPSPL Makassar adalah sebesar **Rp. 20.124.731.189,-** atau dengan prosentase sebesar **98.77%** dari pagu total. Adapun realisasi tersebut adalah realisasi dengan blokir anggaran penghematan perjalanan dinas. Apabila realisasi **tanpa blokir adalah sebesar 99.81%** dimana ada **blokir sebesar Rp. 212.769.000 -**. Sisa anggaran **dengan blokir** adalah sebesar **Rp 251.318.811**. Sedangkan Sisa anggaran **tanpa blokir** adalah sebesar **Rp 38.444.811**.



Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan BPSPL Makassar tidak mengalami hambatan yang sangat berarti hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya target kinerja yang tidak tercapai, justru ada beberapa capaian yang melebihi target, namun ada beberapa hal yang dapat diperbaiki lagi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 sehingga capaian kinerja BPSPL Makassar bisa lebih baik lagi yaitu :

1. Lebih ditingkatkan lagi koordinasi antara tim teknis, program dan keuangan sehingga capaian nilai IKPA tahun 2025 dapat lebih optimal lagi.
2. Untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pinjaman agar dapat dilaksanakan lebih cepat lagi kalau memungkinkan agar dapat dilaksanakan di awal tahun anggaran 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Tugas dan Fungsi.....	1
1.4 Organisasi.....	2
1.6 Sistematika Penyajian	5
II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
2.3 Keselarasan PK Eselon 1 dan UPT.....	21
2.4 Postur Anggaran 2024	21
III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Capaian kinerja	25
3.1.1 IKU1 Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	25
3.1.2 IKU2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Orang)	29
3.1.3 IKU3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	31
3.1.4 IKU4 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah).....	38
3.1.5 IKU5 Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan).....	43
3.1.6 IKU6 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok).....	45
3.1.7 IKU7 Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (orang)	48
3.1.8 IKU8 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis).....	50
3.1.9 IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	68
3.1.10 IKU10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	83
3.1.11 IKU11 Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	87
3.1.12 IKM12 Nilai Indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai).....	90
3.1.13 IKM13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93

3.1.14 IKM14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	95
3.1.15 IKM15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	97
3.1.16 IKM16 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	101
3.1.17 IKM17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	104
3.1.18 IKM18 Presentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	106
3.1.19 IKM19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	108
3.1.20 IKM20 Presentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)	110
3.1.21 IKM21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	111
3.1.22 IKM22 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Bpspl Makassar (Nilai)	114
3.2.1 Monitoring dan Patroli di Kawasan Konservasi Daerah.....	117
3.2.2 Monitoring Biofisik dan Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Daerah.....	119
3.2.3 Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder KK di Kawasan Konservasi Daerah	125
3.3 Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL) ...	126
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	130
IV. PENUTUP	133
4.1 Kesimpulan	133
4.2 Rekomendasi.....	135
4.3 Tindak Lanjut	135

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi jenjang pendidikan pegawai BPSPL Makassar.....	4
Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2023 dan 2024.....	15
Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dan 2024.....	16
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024.....	18
Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2024	21
Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW IV Tahun 2024.....	23
Tabel 7. Capaian Realisasi IKU 1	26
Tabel 8. Target dan Capaian Penerimaan PNPB Tahun 2020-2024.....	27
Tabel 9. Capaian Realisasi IKU 2	29
Tabel 10. Target dan Capaian Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Nasional Gerakan Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassa Tahun 2020-2024	30
Tabel 11. Capaian Realisasi IKU 3	32
Tabel 12. Target dan Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar Tahun 2020-2024.....	32
Tabel 13. Hasil Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW IV di BPSPL Makassar	37
Tabel 14. Capaian IKU Realisasi IKU 4.....	39
Tabel 15. Capaian Target dan Capaian IKU Realisasi IKU 4 Tahun 2020-2024	39
Tabel 16. Capaian Realisasi IKU 5	43
Tabel 17. Capaian Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2020-2024	44
Tabel 18. Capaian Realisasi IKU 6	45
Tabel 19. Capaian Realisasi IKU 7	48
Tabel 20. Capaian Realisasi IKU 8	51
Tabel 21. Capaian Realisasi IKU 9	69
Tabel 22. Capaian Realisasi IKU 10.....	84
Tabel 23. Hasil Identifikasi ALSE.....	84
Tabel 24. Target dan capaian IKU 10 Tahun 2020-2024	86
Tabel 25. Capaian Realisasi IKU 11.....	88
Tabel 26. Capaian Realisasi IKM 12.....	91
Tabel 27. Capaian Realisasi IKM13.....	94
Tabel 28. Target dan Capaian IKM 13 Tahun 2020-2024	94
Tabel 29. Capaian Realisasi IKM 14.....	96
Tabel 30. Capaian Realisasi IKM 15.....	100
Tabel 31. Capaian Realisasi IKM 16.....	103
Tabel 32. Target dan Capaian Realisasi IKM 16 Tahun 2020-2024.....	103
Tabel 33. Capaian Realisasi IKM 17.....	104
Tabel 34. Capaian Realisasi IKM 17 Tahun 2020-2024	105
Tabel 35. Capaian Realisasi IKM 18.....	107
Tabel 36. Capaian Realisasi IKM 18 tahun 2020-2024	107
Tabel 37. Capaian Realisasi IKM 19.....	108
Tabel 38. Capaian Realisasi IKM 19 tahun 2020-2024	109
Tabel 39. Capaian Realisasi IKM 20.....	110
Tabel 40. Capaian Realisasi IKM 20 tahun 2020-2024	110
Tabel 41. Capaian Realisasi IKM 21.....	112



Tabel 42. Capaian Realisasi IKU 20 tahun 2020-2024	113
Tabel 43. Capaian Realisasi IKM 22.....	115
Tabel 44. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL.....	126
Tabel 45. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2024....	130
Tabel 46. Revisi Anggaran BPSPL Makassar tahun 2024.....	130
Tabel 47. Tindak lanjut atas rekomendasi Tahun 2024	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar.....	2
Gambar 2. jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar tahun 2024.....	3
Gambar 3. Visi, Misi, dan Arah Presiden serta Agenda Perubahan.....	7
Gambar 4. Misi KKP dan DJPRL.....	9
Gambar 5. Tujuan KKP dan DJPRL.....	9
Gambar 6. Misi BPSP Makassar.....	12
Gambar 7. Tujuan BPSP Makassar.....	13
Gambar 8. Capaian Kinerja BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerja.....	23
Gambar 9. Rekapitulasi PNBP BPSPL Makassar.....	26
Gambar 10. PNBP Pemanfaatan Jenis Ikan BPSPL Makassar Tahun 2024.....	27
Gambar 11. Grafik nilai pre test dan post test.....	34
Gambar 12. Dokumentasi Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.....	34
Gambar 13. Grafis Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Makassar tahun 2024.....	35
Gambar 14. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar.....	69
Gambar 15. Pelaku usaha di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.....	70
Gambar 16. Pemilik SIPJI di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.....	71
Gambar 17. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar.....	72
Gambar 18. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar.....	73



photo by: M. Rizal B. (BPSPL Makassar)

BAB I

PENDAHULUAN



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan *Good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Pelaporan Kinerja merupakan upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja, **Pelaporan Kinerja**, dan Reviu dan evaluasi kinerja

Laporan Kinerja (LKj) ini akan memuat hasil pengukuran sasaran strategis dan program / kegiatan melalui Indikator Kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan akan tersaji informasi kinerja BPSPL Makassar yang terukur sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini adalah untuk menyampaikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan BPSPL Makassar pada Tahun 2024

1.3 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL Makassar) mempunyai tugas **melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 37/MEN/2021 Tanggal 6 September 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut. Berkedudukan di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah kerja meliputi 6 (enam) Provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan PER. 65/MEN/2020 tersebut

ada perubahan pada struktur organisasi yang hanya ada 2 pejabat struktural yaitu Kepala Balai dan Subbagian Umum, dan sisanya adalah Kelompok Jabatan Fungsional. Di bawah ini adalah Struktur organisasi BPSPL Makassar Tahun 2024.



Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, BPSPL Makassar mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya.
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis dan genetika ikan.
- 5) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi.
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut.
- 8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

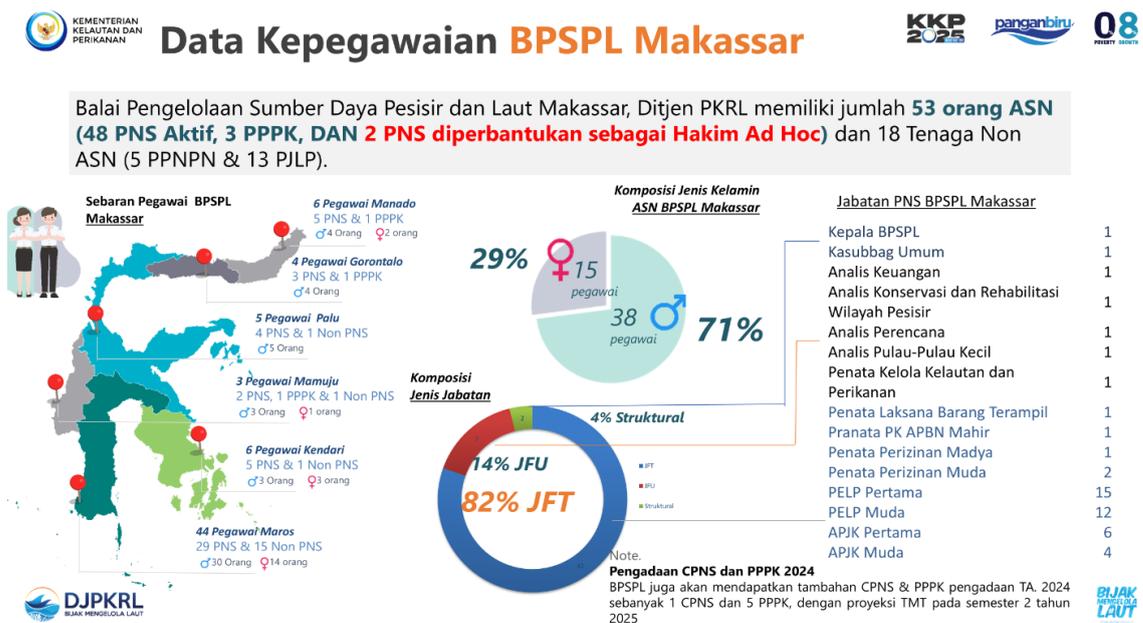
1.4 Organisasi

Secara keorganisasian BPSPL Makassar dipimpin oleh Kepala Balai dengan pangkat Eselon III A yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dan membawahi sub bagian umum dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian tugas sebagai berikut berikut:

A. **Sub Bagian umum**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di Sub Koordinator kelompok Tata Usaha adalah Penata Laksana Barang Terampil 1 (satu) orang dan Pranata PK APBN Mahir 1 (satu) orang. Pada Sub Bagian Umum juga terdapat kelompok jabatan fungsional umum yang terdiri dari Analis Keuangan 1 (satu) orang dan Analis Perencana 1 (satu) orang. Subbagian Umum juga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program evaluasi, dan laporan. Namun pada saat ini tugas penyusunan rencana program dan monitoring serta evaluasi dibantu oleh tim kelompok jabatan fungsional tertentu dalam bidang teknis.

B. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta analisis ekosistem dan valuasi ekonominya juga kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di BPSPL Makassar adalah jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut & Pesisir (PELP) dengan jumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) dengan jumlah 10 (Sepuluh) orang. Penata Perizinan dengan jumlah 3 (tiga) orang dan fungsional umum dengan jumlah 3 (tiga) orang. Kelompom jabatan fungsional tersebut terdiri dari 15 (lima belas) orang fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Pertama, 12 (dua belas) orang fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Muda, 6 (enam) orang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Pertama, 4 (empat) orang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Muda, 1 (satu) orang Analis Konservasi dan Rehabilitasi, 1 (satu) orang Analis Pulau-Pulau Kecil dan 1 (satu) orang Penata Kelola Kelautan dan Perikanan.

Berikut ini adalah jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar tahun 2024:



Gambar 2. jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar tahun 2024

Selain Pejabat Struktural yang berkantor di Maros, ada juga staf yang ditugaskan di satuan kerja BPSPL Makassar yang mencakup wilayah seluruh Sulawesi. Pada Tahun 2024 ini ada 5 (lima) daerah yang ditempatkan penanggung jawab Satuan Kerja beserta staf yaitu di Palu, Manado, Kendari, dan Mamuju, serta Gorontalo. Selain staf yang bertempat di Kantor UPT dan wilayah kerja BPSPL Makassar, terdapat juga dua staf yang diperbantukan ke instansi lain yaitu ke Mahkamah Agung sebagai Hakim Ad hoc.

Tabel 1. Komposisi jenjang pendidikan pegawai BPSPL Makassar

Pendidikan	Golongan (PNS)						P3K	Jumlah Total
	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b		
D3	1	1						2
D4				3				3
S1	8	15	1	4			3	30
S2		1	1	6	7	2		16
Jumlah Total	9	17	2	13	7	2	3	53

Pada Tahun 2024 ini jumlah pegawai BPSPL Makassar total yang berstatus **Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 53 (Lima Puluh Tiga)** orang dan **3 (tiga) orang P3K**. Selain PNS ada juga tenaga kontrak yang bekerja di BPSPL Makassar, jumlah tenaga kontrak sampai dengan Tahun 2024 adalah sebanyak **18 (delapan belas)** orang dimana 14 (empat belas) orang ditempatkan di Kantor BPSPL Makassar dan 5 (lima) orang ditempatkan di masing-masing kantor Wilayah Kerja BPSPL Makassar. Adapun distribusi pegawai BPSPL Makassar yang lengkap ditunjukkan pada Gambar 3. Sedangkan komposisi pegawai BPSPL Makassar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

1.5 Isu Strategis, Potensi, dan Permasalahan

Pulau Sulawesi merupakan wilayah kerja BPSPL Makassar dengan panjang pantai Pulau Sulawesi kurang lebih 4.270.305 KM, dengan panjang pantai seperti itu dipastikan banyak sekali sumberdaya pesisir yang ada di Pulau Sulawesi seperti pemanfaatan jenis ikan dan pemanfaatan ruang laut yang dapat memberikan sumbangsih pemasukan terhadap negara berupa PNBP.

Terdapat juga isu yang menjadi isu strategis di wilayah kerja BPSPL Makassar diantaranya adalah perlindungan, pelestarian, pemanfaatan jenis ikan terancam punah dan optimalisasi PNBP di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.

Selain potensi dan namun selain sumberdaya tentunya banyak permasalahan di daerah pesisir Sulawesi, beberapa permasalahan utama yang ada di Sulawesi antara lain:

1. Belum semua tugas pokok dan fungsi bisa dijalankan oleh BPSPL Makassar. Tugas pokok fungsi yang belum bisa dijalankan diantaranya Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya anggaran yang diturunkan ke BPSPL Makassar terkait pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut.

2. Belum dibedakan kedalaman data untuk permohonan KKPRL antara pemohon yang akan memanfaatkan ruang laut untuk skala dan resiko kecil dengan skala dan resiko besar.
3. Belum terdapat basis data (subjek hukum, koordinat, dan luasan) KKPRL yang telah terbit yang bisa diakses oleh UPT. Hal ini menghambat pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang laut serta berpotensi memunculkan resiko tumpang tindih koordinat yang sudah terbit KKPRL dan pemohon yang akan mengajukan pemanfaatan ruang laut.
4. Masih minimnya petugas dan pemohon KKPRL yang memiliki kompetensi tentang mekanisme perizinan pada OSS.
5. Belum adanya staf BPSPL Makassar di semua area yang terdapat pemanfaatan atau pengiriman jenis ikan sehingga verifikasi harus dilakukan secara daring atau meminta bantuan dengan karantina untuk verifikasi langsung. Hal ini rawan menyebabkan penyalahgunaan dokumen.
6. Masih banyak adanya pemanfaatan atau lalu lintas biota dilindungi ataupun *look alike* yang dilakukan lewat jalur darat dan tidak bisa dimonitor oleh BPSPL Makassar. Hal ini mengakibatkan turunya realisasi PNPB.
7. Ancaman abrasi akibat kerusakan ekosistem mangrove, alih fungsi lahan pesisir terutama mangrove menjadi tambak, pelabuhan/terminal khusus, pemukiman, industri, dan perkebunan yang mengarah pada tekanan dan penurunan luasan vegetasi mangrove.
8. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian bantuan pemerintah bagi kelompok masyarakat penggiat Konservasi diantaranya; kurang memadainya nominal nilai bantuan untuk memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan oleh kelompok. Berdasarkan permasalahan yang ada maka diperlukan peningkatan nilai bantuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam mendukung kegiatan Konservasi. Evaluasi dan pengembangan bantuan bagi kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan KOMPAK juga harus menjadi perhatian BPSPL Makassar dalam pemberian bantuan selanjutnya. Kelompok masyarakat penerima bantuan KOMPAK dengan nilai evaluasi baik selama 2 tahun dapat dipertimbangkan memperoleh bantuan yang dinilai diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan konservasi kawasan dan/atau jenis.
9. Banyak potensi pariwisata di Sulawesi belum terkelola dengan baik dan Akses di beberapa tempat wisata yang berada di pulau cukup jauh dari pusat kota, dan daerah tidak ada akses melalui udara sehingga perlu menempuh perjalanan darat dan laut yang cukup jauh.
10. Kurangnya tenaga kerja administrasi / bagian umum. Pada saat ini di BPSPL Makassar masih mengalami kekurangan tenaga administrasi dan kekurangan ini diakomodasi dengan memberikan tugas bantuan kepada jabatan fungsional untuk pemenuhan pada bagian keuangan, kepegawaian, persuratan, tata laksana, dan program serta evaluasi.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini **bertujuan menginformasikan capaian kinerja Tahun 2024**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2024



tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) BPSPL Makassar Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

A. Bab 1 Pendahuluan,

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar seperti visi, misi, tujuan organisasi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

B. Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

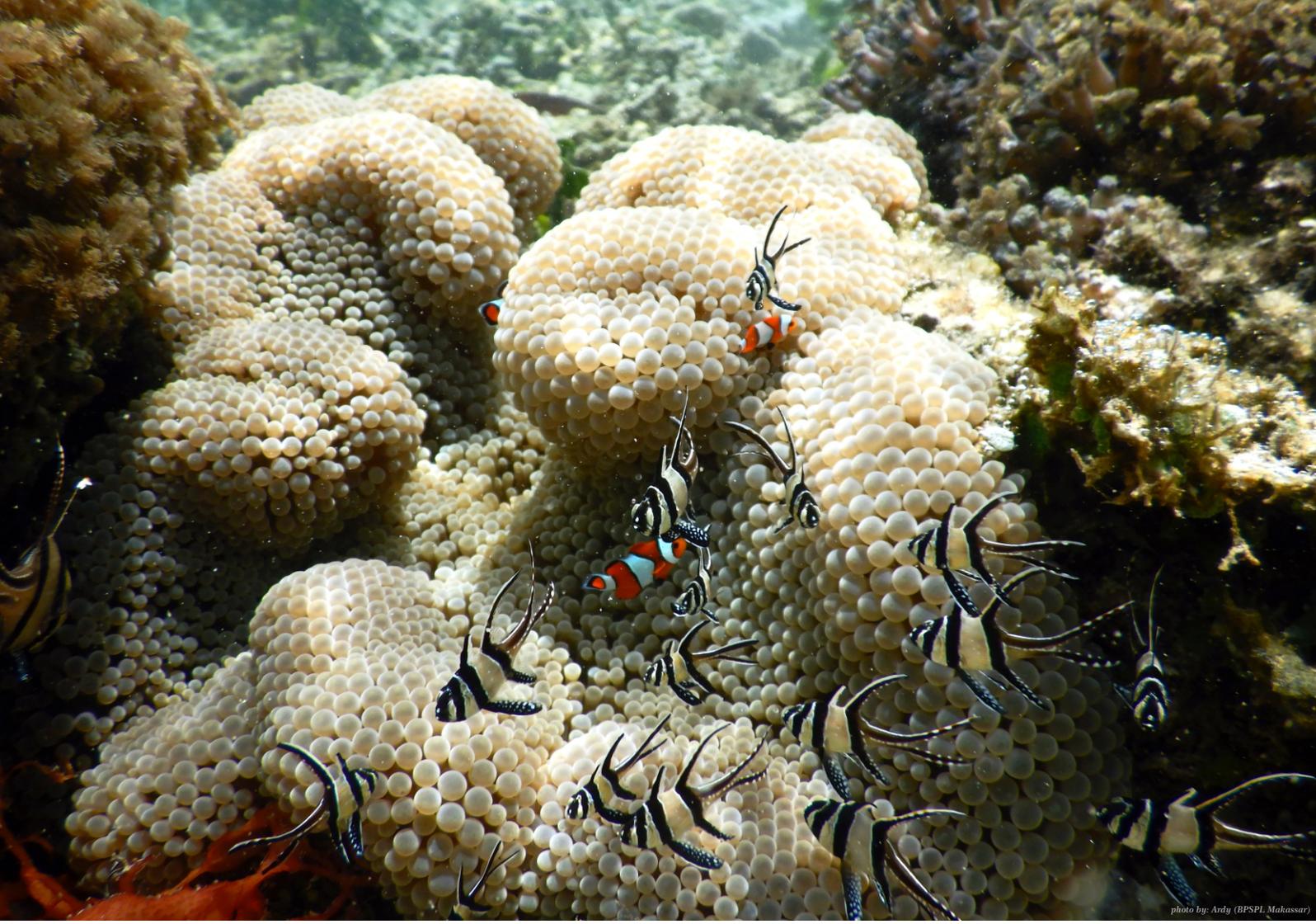
Pada bab ini uraian singkat tentang rencana kinerja 2024 dan penetapan kinerja Tahun 2024 BPSPL Makassar.

C. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini berisi hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

D. Bab 4 Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan saran untuk perencanaan Tahun berikutnya.



BAB II

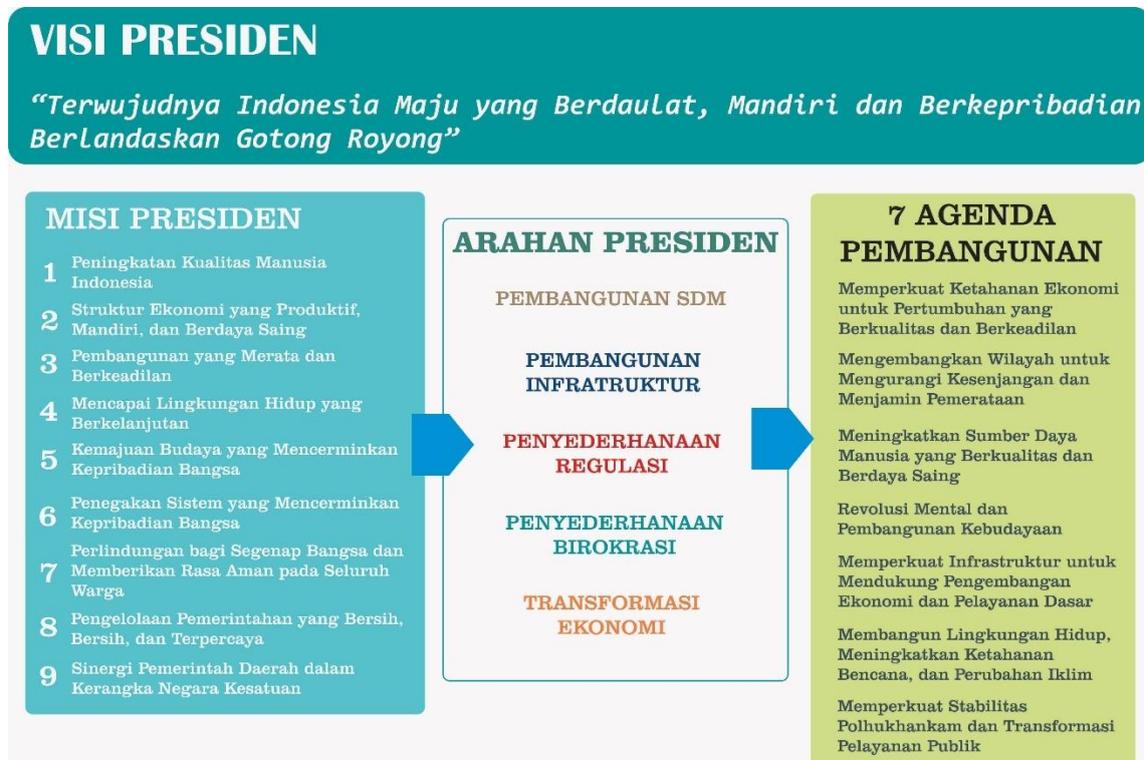
PERENCANAAN KINERJA



II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahannya Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada Gambar berikut:



Gambar 3. Visi, Misi, dan Arahannya Presiden serta Agenda Perubahan

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/ PERMEN-KP/2020 pda tanggal 2 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2020-2024.

Visi KKP Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi DJPRL 2020 – 2024 adalah **“Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”**. Visi BPSPL Makassar tidak terlepas dari Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Visi Presiden Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian Visi BPSPL Makassar adalah **“Terdepan**

dalam mewujudkan pengelolaan ruang laut Wilayah Sulawesi menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KKP dan Pengembangan Kebijakan KKP;
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL

Gambar 4. Misi KKP dan DJPRL

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan KKP dan DJPRL adalah:

TUJUAN KKP

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional;**
3. **Optimalnya Konservasi dan Pengelolaan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;**
4. Meningkatkan Kinerja RB di KKP

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL

Gambar 5. Tujuan KKP dan DJPRL

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari

beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP Tahun 2020-2024, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat,
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Ditjen PRL Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- **Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan**

- a. Sasaran: "Kesejahteraan petambak garam meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Nilai Tukar Petambak Garam, dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 101,75 pada tahun 2024.
- b. Sasaran: "Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil", dengan Indikator Kinerja:
 - Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi, sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
 - Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan sampai dengan tahun 2024 menjadi 11 (sebelas) kawasan.
- c. Sasaran: " Meningkatkan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil", dengan Indikator Kinerja:
 - Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024.
 - persentase penyelesaian persyaratan dasar perizinan pemanfaatan ruang laut dengan target 100% pada tahun 2024.
- d. Sasaran: "Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Produksi Garam Nasional menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024.
- e. Sasaran: "Terkelolanya kawasan wisata bahari dengan Indikator Kinerja:
 - Kawasan wisata bahari menjadi 10 (sepuluh) kawasan pada tahun 2024
- f. Sasaran Program: "Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya", dengan Indikator Kinerja:
 - Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5(lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 7 (tujuh) komunitas pada tahun 2024.
- g. Sasaran: "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPKRL (skala 1-5),

level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

- **Program Kualitas Lingkungan Hidup**

- a. Sasaran: “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 29,3 juta hektar pada tahun 2024.
 - Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 17,8 juta hektar pada tahun 2024.
- b. Sasaran: “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan”, dengan Indikator Kinerja:
 - Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024.
- c. Sasaran: “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali”, dengan Indikator Kinerja:
 - Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 70 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024.
- d. Sasaran: “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”, dengan Indikator Kinerja:
 - Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai SKPT, dari level 4 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

- **Program Dukungan Manajemen**

- a. Sasaran: “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL”, dengan Indikator Kinerja:
 - Nilai PMPRB DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 32 (tiga puluh dua) pada tahun 2022.
 - Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 8 (delapan) unit pada tahun 2024.
 - Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Kinerja DJPKRL kurang dari 1% setiap tahun dari tahun 2020 dan pada tahun 2024 menjadi kurang dari 0,5%.
 - Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 88 (delapan puluh delapan) pada tahun 2024.
 - Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 84 (delapan puluh empat) pada tahun 2024.
 - Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan level III pada tahun 2020 menjadi 3,3 pada tahun 2024
 - Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan (MP) yang terstandar DJPKRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 94% pada tahun 2024.
 - Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPKRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
 - unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPKRL, dengan target 1

- (satu) per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2024 nomenklatur indikator berubah menjadi nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup DJPKRL dengan target 76 (tujuh puluh enam)
- Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 93,76 (Baik) pada tahun 2024.
 - Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020 menjadi 86 (Baik) pada tahun 2024.
 - Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPKRL dengan target 80% pada tahun 2024;
 - Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN DJPKRL dengan target 80% pada tahun 2024;
 - Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPKRL dengan target 80% pada tahun 2024;
 - Tingkat kepatuhan pengelolaan data KP di Lingkungan DJPKRL dengan target 91% pada tahun 2024.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 37/MEN/2021 Tanggal 6 September 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BPSPL Makassar, maka, ditetapkan Misi BPSPL Makassar sebagai berikut :

MISI BPSPL MAKASSAR

1. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar;
2. Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
3. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di Lingkup Wilayah BPSPL Makassar
4. Perencanaan Ruang Laut di Lingkup Wilayah BPSPL Makassar
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Wilayah BPSPL Makassar

Gambar 6. Misi BPSPL Makassar

Dalam mewujudkan visi dan misi BPSPL Makassar, BPSPL Makassar merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020 – 2024 sebagai berikut:

TUJUAN BPSPL MAKASSAR

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar
3. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Makassar
4. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di Lingkup BPSPL Makassar dengan tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
5. Misi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di BPSPL Makassar dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Makassar

Gambar 7. Tujuan BPSPL Makassar

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Makassar Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar;
2. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan:
 - 1) terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 2) terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Program Kualitas Lingkungan Hidup

3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan:
 - 1) meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 2) meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 3) meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 4) meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar;
4. tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan



“meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Makassar”;

Program Dukungan Manajemen

5. tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Makassar.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja BPSPL Makassar pada Tahun 2024 menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPSPL Makassar dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Terdapat perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023. Perubahan tersebut berupa penambahan indikator kinerja utama dan indikator kinerja manajemen. Pada tahun 2024 terdapat total 22 Indikator Kinerja, jumlah ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan indikator kinerja pada tahun 2023 yang berjumlah 16. Berikut adalah detail perbandingan sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2023 dan 2024:

Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

SASARAN KEGIATAN 2023		SASARAN KEGIATAN 2024	
1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
2	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
3	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
4	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
6	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	1	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar
		2	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar
		5	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
		9	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
		10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran

Berikut adalah perbedaan antara Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2023 dan tahun 2024:

Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2023		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024	
1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
2	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)
3	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	6	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)
4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)
5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)
6	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.)	1	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.)
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	13	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)
10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)
11	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2023		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024	
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)
13	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	18	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)
15	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)	20	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)
		5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)
		7	Masyarakat di KawasanKonservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)
		10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
		11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar
		22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai)

Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024 terdiri 22 Indikator Kinerja yang terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Apabila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2023 terdapat enam (6) Indikator Kinerja tambahan pada Tahun 2024, Adapun indikator tersebut antara lain :

1. Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)
2. Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)
3. Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)
4. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar
6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar (nilai)

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNB BPSPL Makassar	1.	Nilai PNB BPSPL Makassar (Rp.000)	500.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
			(Kelompok)	
		7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	50
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	71
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Makassar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	88

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	81
		17. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4
		18. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Makassar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Makassar (%)	80
		22. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai)	65

Penambahan Indikator Kinerja sejumlah enam (6) terdiri dari lima (5) indikator kinerja utama (IKU) dan satu (1) indikator kinerja manajemen (IKM). Indikator kinerja utama tambahan tersebut tersebut antara lain:

1. Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)
2. Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)
3. Masyarakat di KawasanKonservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)
4. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen);
5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar;

Untuk indikator kinerja manajemen adalah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai). Adapun penambahan Indikator ini dikarenakan:

1. Adanya penambahan dukungan anggaran program dan kegiatan baru pada tahun 2024 dalam melaksanakan tupoksi di wilayah kerja BPSPL Makassar antara lain kegiatan (1. Bulan Cinta Laut (BCL), (2. Penyusunan Kesepakatan Bersama, (3. Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pemanfaatan Air Laut, (4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi).
2. Penambahan indikator dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan dan memberikan standar yang lebih jelas dalam memberikan pencapaian kegiatan yang lebih cepat, efisien dan efektif

2.3 Keselarasan PK Eselon 1 dan UPT

Perjanjian Kinerja di level UPT pasti selaras dengan perjanjian kinerja di eselon 1, karena perjanjian kinerja di level UPT merupakan turunan dari perjanjian kinerja eselon 1. Perjanjian kinerja di level UPT mendukung pencapaian kinerja di eselon 1 baik di Indikator Kinerja Utama maupun di Indikator Kinerja Manajemen.

Pada Tahun 2024 Perjanjian Kinerja Eselon 1 terdiri dari Tiga Program, 10 Sasaran Program, dan 29 Indikator Kinerja. Sementara Perjanjian Kinerja di BPSPL Makassar Tahun 2024 terdiri dari Tiga Program, Delapan Sasaran Kegiatan, dan 22 Indikator Kinerja. Ada beberapa indikator kinerja UPT yang capaiannya secara langsung mendukung capaian indikator kinerja eselon 1 atau dapat dikatakan merupakan bagian dari indikator kinerja eselon 1 seperti nilai PNBPN, Jenis keanekaragaman hayati yang dilindungi dan dilestarikan, dan IP ASN serta unit kerja berpredikat menuju WBK.

2.4 Postur Anggaran 2024

Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2024

KODE/ NAMA KEGIATAN	RUPIAH MURNI (000)	PNBP (000)	PHLN (000)	TOTAL (000)
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.105.000	1.360.000	2.526.220	5.991.220
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000	0	0	800.000
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	0	150.000	0	150.000
Perencanaan Ruang Laut	700.000	400.000	0	1.100.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	12.334.725	0	0	11.994.172
Jumlah	15.939.725	1.910.000	2.526.220	20.375.945



Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2024, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran total sebesar **Rp. 20,375,945,000,-** (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sumber dana sebesar **Rp. 15.939.725.000,-** (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari **Rupiah Murni** dan **Rp. 1.910.000.000,-** (Satu Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta RUpiah) dari **PNBP** dan **Rp.2.526.220.000,-** (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dari **PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri)**.



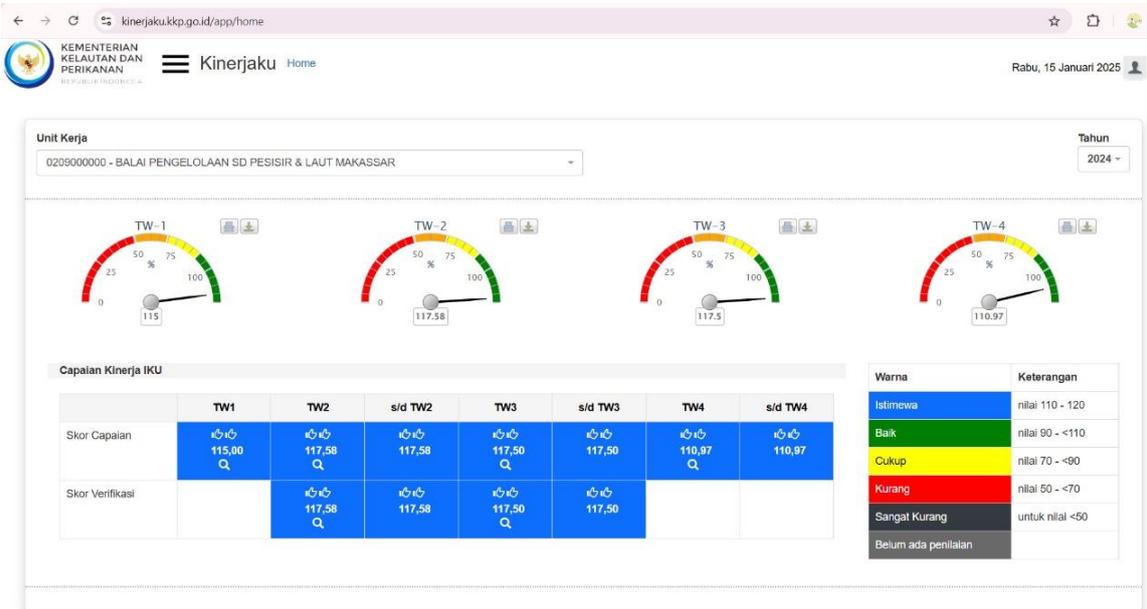
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



III. AKUNTABILITAS KINERJA

Nilai Capaian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024 adalah **110.97** dengan predikat **“Istimewa”**.



Gambar 8. Capaian Kinerja BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku

Untuk detail dan keseluruhan capaian sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW IV Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target 2024	Realisasi TW 2024	%
1 Nilai PNPB BPSPL Makassar (Rp.000)	500.000	849.310,891	168.3 atau 120 (kinerjaku)
2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	320	320	100
3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3	3	100
4 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	2	5	250 atau 120 (kinerjaku)

5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	1	2	200 atau 120 (kinerjaku)
6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3	3	100
7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (orang)	50	105	210 atau 120 (kinerjaku)
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6	8	133.3 atau 120 (kinerjaku)
9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5	9	180 atau 120 (kinerjaku)
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1	1	100
11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar	4	4	100
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93.76	99.79	106.43
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	71	100	140,8 atau 120 (kinerjaku)
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	75	87.41	116.55

15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	88	90.78	103.16
16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	81	88.6	109.38
17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4	4	100
18	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	133.3	141.81 Atau 120 (kinerjaku)
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	100	125 Atau 120 (kinerjaku)
20	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)	100	100	100
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	80	100	125 Atau 120 (kinerjaku)
22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar (nilai)	65	80.85	124.38 Atau 120 (kinerjaku)

3.1 Capaian kinerja

3.1.1 IKU1 Nilai PNBPN BPSPL Makassar (Rp.000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Makassar adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, pengelolaan BMN, denda dan lain-lain. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

$$PNBP_{BPSPL\ MAKASSAR} = PNBP_{layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{lainnya}$$

Dimana:

Saji DN = Pungutan dokumen Saji DN 1) + pungutan perdagangan + pungutan pengambilan 2)

Surat Rekomendasi = pungutan dokumen rekomendasi + pungutan perdagangan

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut

keterangan:

1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%

2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi penghitungan pungutan :

Pungutan pengambilan = jumlah individu x Tarif PNBP x harga patokan jenis ikan

Pungutan perdagangan = volume x Tarif PNBP x harga patokan jenis ikan

Denda = Tarif PNBP x jumlah produk yang tidak sesuai dengan permohonan

PNBPLayanan :Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan.

PNBPBMN :Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

PNBPLainnya :Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 7. Capaian Realisasi IKU 1

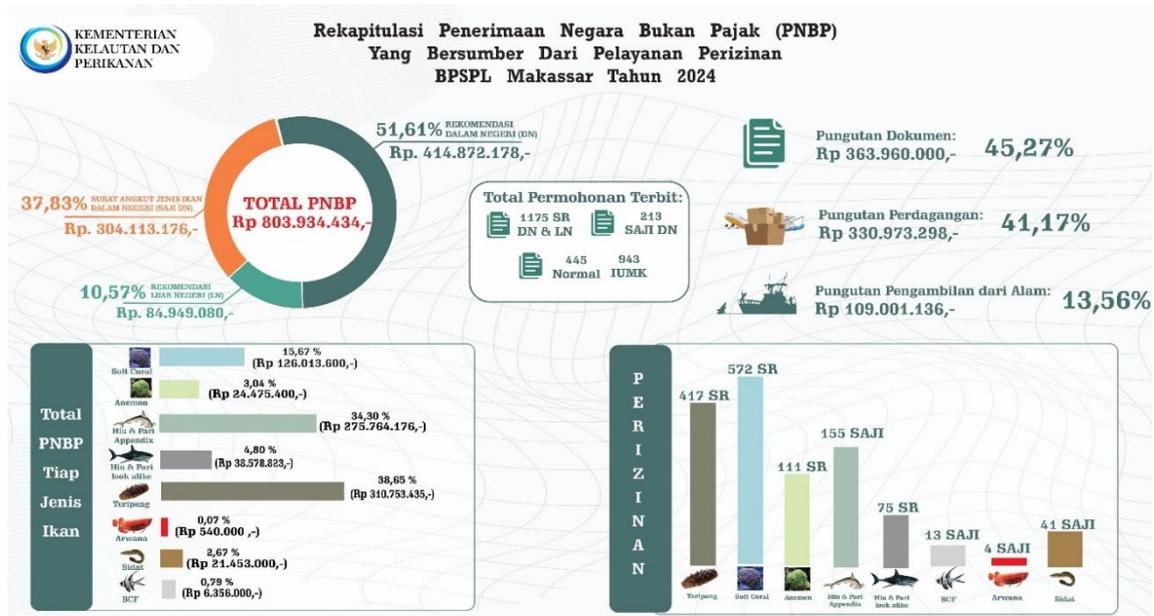
SS -1		Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar									
IKU - 1		Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)									
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
-	-	799.545	882.681	500.000	841.310	168.3 Atau 120 (kinerjaku)	-4,7%	1.475.240	2.182.226	147,92	

Realisasi IKU ini sudah memenuhi target dengan realisasi 841.310.891 atau 168.3% dari target 500 juta rupiah dan berdasarkan matrik pendanaan 2020-2024, telah tercapai Rp.2.182.226.000 dari target Rp. 1.475.240.000 atau sebesar 147,92%.

Pada akhir tahun 2024, PNBP BPSPL Makassar sudah mencapai **Rp 849.310.891,-** atau **168.3% dari target yang ditetapkan Rp.500.000.000,-**. PNBP terdiri dari PNBP sektor teknis dari pemanfaatan jenis ikan dan PNBP dari sektor dukungan manajemen seperti sewa rumah negara, penjualan peralatan dan mesin serta penerimaan kembali belanja tahun anggaran sebelumnya. Berikut adalah rekapitulasi PNBP BPSPL Makassar sampai dengan akhir tahun 2024:



Gambar 9. Rekapitulasi PNBP BPSPL Makassar



Gambar 10. PNBP Pemanfaatan Jenis Ikan BPSPL Makassar Tahun 2024

Berdasarkan infografis di atas komposisi terbesar PNBP berasal dari sektor teknis yaitu **pemanfaatan jenis ikan** dari pendapat perizinan lainnya (pungutan dokumen) dan dari pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya (pungutan perdagangan dan pengambilan dari alam).

Berdasarkan infografis di atas juga diketahui bahwa pungutan yang paling besar berasal dari pungutan dokumen dengan proporsi sebesar **45.27%**. Sedangkan jenis ikan yang paling besar berasal dari jenis teripang dengan proporsi sebesar **38.65%**.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU 1 ini apabila dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya mengalami penurunan sekitar 41 juta atau 4.7%. Namun capaian IKU ini selalu melebihi target dari tahun 2022 sampai dengan 2024.

Tabel 8. Target dan Capaian Penerimaan PNBP Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp.000)	Capaian (Rp.000)	Presentase Capaian (%)
2020	0	0	-
2021	0	0	-
2022	300.240	799.545	266,3
2023	675.000	882.681	130,8
2024	500.000	841.310	168,3
Jumlah Kumulatif	1.475.240	2.523.536	

Indikator kinerja Nilai PNBP BPSPL Makassar merupakan indikator kinerja yang mulai digunakan pada tahun 2022, sehingga data target dan capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 tidak disajikan. Nilai Penerimaan PNBP tertinggi diperoleh pada tahun 2023 dan yang paling rendah di tahun 2022. Total penerimaan PNBP BPSPL Makassar hingga tahun 2024 mencapai Rp.2.182.226.000 dari target Rp. 1.475.240.000 atau tercapai sebesar 147,92%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Target indikator kinerja Nilai PNBP BPSPL Makassar pada Renstra / Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 secara kumulatif adalah sebesar Rp1.475.240.000, sedangkan capaian secara kumulatif hingga tahun 2024 ini adalah sebesar

Rp2.523.536.000, sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 147,92% dari target. Kontribusi capaian Nilai PNBPN pada tahun 2024 sebesar Rp. 841.310.000 atau sebesar 33,33% dari jumlah capaian pada tahun 2020-2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

PNBP Makassar didapat dari pemanfaatan jenis ikan dan BPSPL Makassar memberikan pelayanan prima untuk pelayanan perizinan baik verifikasi lapangan untuk pengajuan dokumen SIPJI, penerbitan dokumen SAJI dan Rekomendasi untuk optimalisasi pemenuhan target PNBPN yang sudah ditetapkan. Selain PNBPN layanan, terdapat juga PNBPN dari dukungan manajemen.

Berdasarkan table yang disajikan pada poin C, terlihat bahwa capaian yang di peroleh pada tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2023 capaian yang diperoleh lebih tinggi dari capaian di tahun 2022, namun di tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Karena Penerimaan PNBPN di BPSPL Makassar paling banyak berasal dari Pemanfaatan Jenis Ikan melalui layanan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dan Penerbitan Surat Rekomendasi (DN dan LN), kenaikan dan penurunan nilai penerimaan PNBPN BPSPL Makassar sangat dipengaruhi oleh kedua layanan tersebut.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PNBPN dari sektor pemanfaatan jenis ikan antara lain adalah jumlah dokumen yang diterbitkan, volume jenis ikan yang di lalulintaskan, realisasi kuota pengambilan alam, status UMK dan nonUMK, serta faktor lainnya. Dari ketiga komponen tersebut, penerimaan PNBPN dari pungutan dokumen adalah yang paling besar jumlahnya. Pada tahun 2023 Jumlah pungutan dokumen yang diperoleh sebanyak Rp.460.485.000 dengan total dokumen terbit sebanyak 1.651 Dokumen (1.060 UMK dan 591 nonUMK), sedangkan pada tahun 2024, pungutan dokumen yang diperoleh sebanyak Rp.363.960.000 dengan total dokumen terbit sebanyak 1.388 Dokumen (943 UMK dan 445 nonUMK). Pada Tahun 2022, jumlah pungutan dokumen yang diperoleh sebanyak Rp.503.280.000 dengan total dokumen terbit sebanyak 1.416 dokumen (647 UMK dan 769 nonUMK).

Penurunan jumlah penerbitan dokumen pada tahun 2024 salah satu indikasinya disebabkan oleh masih banyaknya pemanfaatan jenis ikan yang dikirimkan melalui jalur darat sehingga tidak mengajukan permohonan kepada BPSPL Makassar. Untuk menanggulangi hal ini BPSPL Makassar secara aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha serta aktif berkoordinasi dengan PSDKP dan selaku instansi terkait yang mempunyai wewenang dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran hukum seperti pemanfaatan jenis ikan dilindungi secara illegal. Selain itu semakin banyaknya pelaku usaha yang beralih status menjadi UMK membuat penerimaan PNBPN berkurang karena pelaku usaha dengan status UMK cukup membayar 25% untuk pungutan dokumen.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai target IKU1 tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus dan dapat dikatakan bahwa anggaran untuk pencapaian IKU 1 ini **adalah 0 Rupiah**.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi (Januari-Desember 2024)
2. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau

Appendiks CITES

3. Evaluasi Penetapan Klasifikasi kategori Pelaku usaha UMK (Usaha Mikro Kecil)
4. Sosialisasi Pelayanan Prima
5. Bimtek ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan
6. Audit Surveillance Penerapan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU pada Triwulan I 2025 yaitu berupa penarikan PNBPN untuk pemanfaatan jenis.

3.1.2 IKU2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non-fisik yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar. Kegiatan Bulan Cinta Laut tahun 2024 dilaksanakan di empat lokasi yaitu Kota Makassar, Kota Kendari, Gorontalo, dan Kota Manado. Jumlah tenaga yang terlibat yang dijadikan capaian pada IKU ini adalah hasil akumulasi tenaga kerja yang terlibat dari keempat lokasi tersebut.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yang dilaksanakan oleh BPSPL Makassar Selama tahun 2024 terlaksana di empat lokasi kegiatan antara lain:

1. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah tenaga kerja sejumlah 85 Orang
2. Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tenaga kerja sejumlah 86 Orang
3. Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan tenaga kerja sejumlah 80 Orang
4. Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan tenaga kerja sejumlah 69 Orang

Tabel 9. Capaian Realisasi IKU 2

SS - 2		Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat Dalam Kegiatan Nasional Gerakan Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar									
IKU - 2		Tenaga Kerja yang Terlibat Dalam Kegiatan Nasional Gerakan Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Orang)									
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
0	0	0	0	320	320	100	0	320	320	100	

Berdasarkan table di atas, IKU ini telah memenuhi target 100% dengan capaian 320 orang dari target 320 orang. Berdasarkan matrik pendanaan 2020-2024 capaian sampai dengan tahun 2024 adalah sama dengan target di tahun 2024 dikarenakan IKU ini baru ditetapkan di tahun 2024.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU 2 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena IKU ini baru terdapat di tahun 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Realisasi IKU 2 ini belum bisa dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra karena IKU ini baru terdapat di tahun 2024.

Tabel 10. Target dan Capaian Tenaga Kerja yang terlibat dalam Kegiatan Nasional Gerakan Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassa Tahun 2020-2024

Tahun	Target (orang)	Capaian (orang)	Presentase Capaian (%)
2020	0	0	-
2021	0	0	-
2022	0	0	-
2023	0	0	-
2024	320	320	100
Jumlah Kumulatif	320	320	

Indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat Dalam Kegiatan Nasional Bulan Cinta Laut merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2024, sehingga data target dan capaian tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak disajikan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor penyebab keberhasilan dari pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah koordinasi yang optimal dengan penyuluh, perangkat desa serta kelompok Masyarakat nelayan yang menjadi target lokasi kegiatan BCL. Berdasarkan identifikasi awal, target 320 orang dengan rincian di empat lokasi adalah 85 orang Makassar, 86 orang Kendari, 69 orang Gorontalo, 80 orang Manado. Semua Hasil identifikasi awal yang telah dilakukan berhasil dicapai.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung IKU ini adalah anggaran kegiatan Bulan Cinta Laut sebesar 800 juta rupiah untuk empat lokasi. Pelaksanaan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada Bulan Mei s.d. Juni. Bentuk efisiensi penggunaan anggaran yaitu dengan mengkolaborasikan dengan kegiatan sosialisasi perizinan pemanfaatan jenis ikan maupun pemanfaatan ruang laut.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah pelaksanaan Bulan Cinta Laut berupa kegiatan bersih pantai di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.

Kegiatan Bulan Cinta Laut berlangsung di empat Lokasi yaitu di Kota Makassar, Kendari, Manado, dan Gorontalo. Sampai dengan triwulan II, telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Sosialisasi, Gerakan Bimtek I dan II, dan kegiatan pemungutan dan penimbangan sampah yang dilakukan secara simultan selama dua bulan.

Pada tahun 2024 telah terdapat nelayan yang turut menjadi tenaga kerja dalam kegiatan Bulan Cinta Laut adalah 320 orang. Jumlah ini sudah memenuhi target tahunan dalam IKU ini sampai dengan akhir tahun 2024.

Kegiatan Bulan Cinta Laut dilaksanakan selama 2 bulan penuh yang terdiri dari Identifikasi Lokasi, Identifikasi dan Validasi data Nelayan, rangkaian Sosialisasi,

Bimtek I, Bimtek II, Bimtek III, serta Evaluasi dan Penutupan, dan Penimbangan Sampah Nelayan.

1. Identifikasi Lokasi Kegiatan
Identifikasi lokasi kegiatan Bulan Cinta Laut dilakukan dengan mengecek kesesuaian calon lokasi dengan kriteria yaitu terdapat nelayan yang telah mendapatkan kartu KUSUKA sejumlah target kegiatan, terdapat timbulan sampah di daerah pesisir dan laut, serta terdapat bank sampah dan oftaker yang akan dijadikan mitra sebagai menampung hasil sampah yang dikumpulkan nelayan
2. Identifikasi dan Validasi Data Nelayan
Identifikasi dan validasi data nelayan dilakukan dengan mengecek data nelayan dan data kelompok nelayan dengan kesesuaian nomor KUSUKA.
3. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek
Kegiatan sosialisasi dan bimtek merupakan kegiatan pertemuan yang dilakukan bersama dengan nelayan teraktivasi, Pemerintah Daerah, Bank Sampah, dan pihak terkait. Kegiatan dilakukan 2 minggu sekali untuk membuka kegiatan secara simbolis, memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah dan update progress kegiatan, serta menutup kegiatan secara resmi.
4. Penimbangan Sampah
Penimbangan sampah dilakukan setiap minggu untuk mengetahui jumlah sampah yang telah dikumpulkan nelayan. Penimbangan dilakukan bersama dengan Penyuluh Perikanan dengan menimbang dan mencatat jumlah pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masing-masing nelayan. Data hasil pengumpulan sampah tersebut kemudian disetorkan ke Bank Sampah untuk diberikan kompensasi sesuai hasil pengumpulan dan harga sampah di pasaran.
5. Puncak Apresiasi Gernas BCL
Puncak apresiasi Bulan Cinta Laut dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada 6 kriteria penerima penghargaan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada pihak-pihak yang telah aktif dan turut serta menyukseskan kegiatan Bulan Cinta Laut

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Belum terdapat rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU ini di triwulan I 2025. Hal ini dikarenakan tahun 2025 – 2029 terdapat penyusunan renstra baru dan belum terdapat Perjanjian Kinerja yang berisi Indikator Kinerja di level II yang disusun dan ditetapkan. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian apakah indikator kinerja ini masih akan ada di tahun 2025 atau tidak.

3.1.3 IKU3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang *existing*, dan/atau Verifikasi Perizinan. Dokumen yang menjadi output sebagai capaian dalam Indikator Kinerja ini adalah Laporan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut, Laporan Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut, dan Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang

terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Selama tahun 2024, BPSPL Makassar Telah melaksanakan kegiatan Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar antara lain:

1. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
2. Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Sulawesi Utara
3. Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut
4. Pengendalian/Identifikasi/Penyelesaian Pelaksanaan KKPR

Tabel 11. Capaian Realisasi IKU 3

SS -3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar										
IKU - 3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%	
0	0	1	3	3	3	100	0	3	3	100	

Berdasarkan tabel di atas, IKU ini telah mencapai 100% target dengan capaian 3 dokumen dari 3 dokumen yang menjadi target. Dokumen yang menjadi target tersebut adalah laporan sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut, laporan verifikasi/ penilaian teknis perizinan pemanfaatan ruang laut, dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari matrik pendanaan 2020-2024 juga dapat diketahui bahwa BPSPL Makassar hingga tahun 2024 mencapai 3 Dokumen dari total target 3 Dokumen atau sebesar 100%.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU ini baru terdapat di tahun 2023 dan apabila realisasinya dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah sama-sama tercapai 100% dengan realisasi tiga dokumen.

Tabel 12. Target dan Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar Tahun 2020-2024

Tahun	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)	Presentase Capaian (%)
2020	0	0	-
2021	0	0	-
2022	1	1	100
2023	3	3	100
2024	3	3	100

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Target indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar pada Renstra / Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 adalah sebesar 3 dokumen, sedangkan capaian hingga tahun 2024 ini adalah sebesar 3 dokumen, sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 100% dari target.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, diantaranya sudah terdapat basis data identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar, sudah terdapat prasarana seperti GPS geodetic dan drone yang dapat mendukung pelaksanaan verifikasi lapangan maupun verifikasi teknis, dan baiknya koordinasi antar instansi baik dari pusat maupun PSDKP di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Selain faktor penyebab keberhasilan, terdapat juga faktor yang dapat menjadi penghambat atau kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini, diantaranya adalah belum terdapat basis data (subjek hukum, koordinat, dan luasan) KKPRL yang telah terbit yang bisa diakses oleh UPT. Hal ini menghambat pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang laut serta berpotensi memunculkan resiko tumpang tindih koordinat yang sudah terbit KKPRL dan pemohon yang akan mengajukan pemanfaatan ruang laut.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

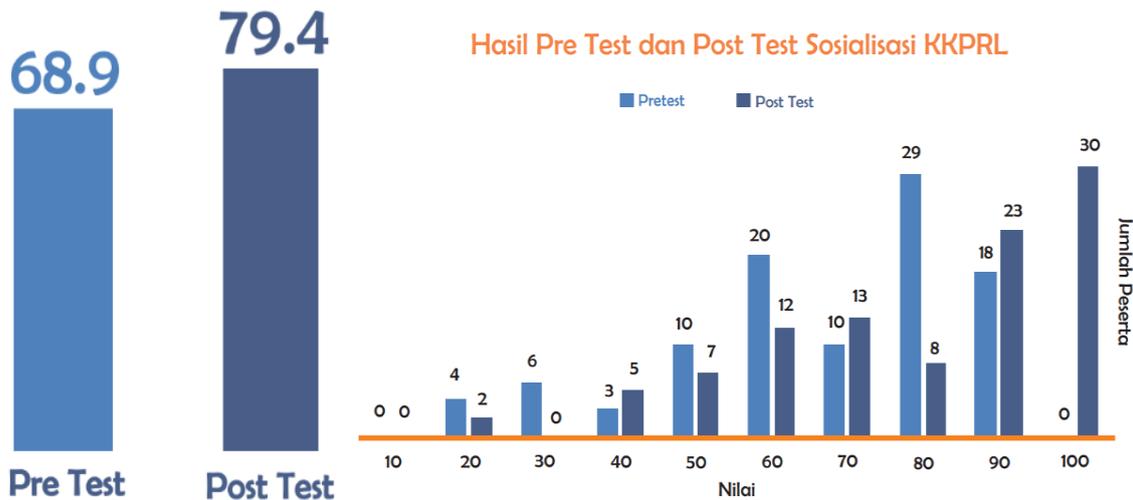
Dengan pelaksanaan sosialisasi secara *hybrid* (daring dan luring) dapat mengoptimalkan penyampaian informasi yang lebih detail serta jangkauan informasi yang lebih luas untuk peserta yang tidak dapat hadir secara luring dengan penggunaan biaya yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan hanya pelaksanaan secara luring. Pelaksanaan penilaian teknis secara daring melalui aplikasi zoom juga memberikan efisiensi anggaran yang signifikan. Pelaksanaan penilaian teknis secara langsung ke lapangan hanya akan dilakukan apabila terdapat kondisi yang dirasa perlu seperti kurangnya kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan data lapangan seperti data titik koordinat, hidro oseanografi, dan data ekosistem sekitar saat dilakukan verifikasi teknis secara daring.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan perizinan pemanfaatan ruang laut dibagi memiliki dua produk hukum, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diberikan kepada kegiatan berusaha dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKPRL) yang diberikan kepada kegiatan non berusaha seperti pemerintah dan pemanfaatan untuk masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung progress capaian kinerja IKU1 pada Tahun 2024 antara lain: Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Penilaian Teknis Pemanfaatan Ruang Laut, dan Monitoring/ Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilaksanakan di Kota Manado pada tanggal 4 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi Ekosistem Biota Perairan, Direktorat Jasa Kelautan, dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Materi yang disampaikan pada sosialisasi pemanfaatan ruang laut antara lain: Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Materi Teknis RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Perizinan Berusaha Jasa Kelautan, dan Pengawasan Perizinan Ruang Laut. Setelah paparan dilanjutkan dengan proses diskusi dan tanya jawab. Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sosialisasi, maka dilakukan pre test dan post test. Berikut adalah hasil pre test dan post test.



Gambar 11. Grafik nilai pre test dan post test

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat peningkatan kompetensi peserta sosialisasi dari pre test ke post test sebesar sekitar 10.5%. Pada post test banyak peserta yang mendapat nilai sempurna 100.



Gambar 12. Dokumentasi Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

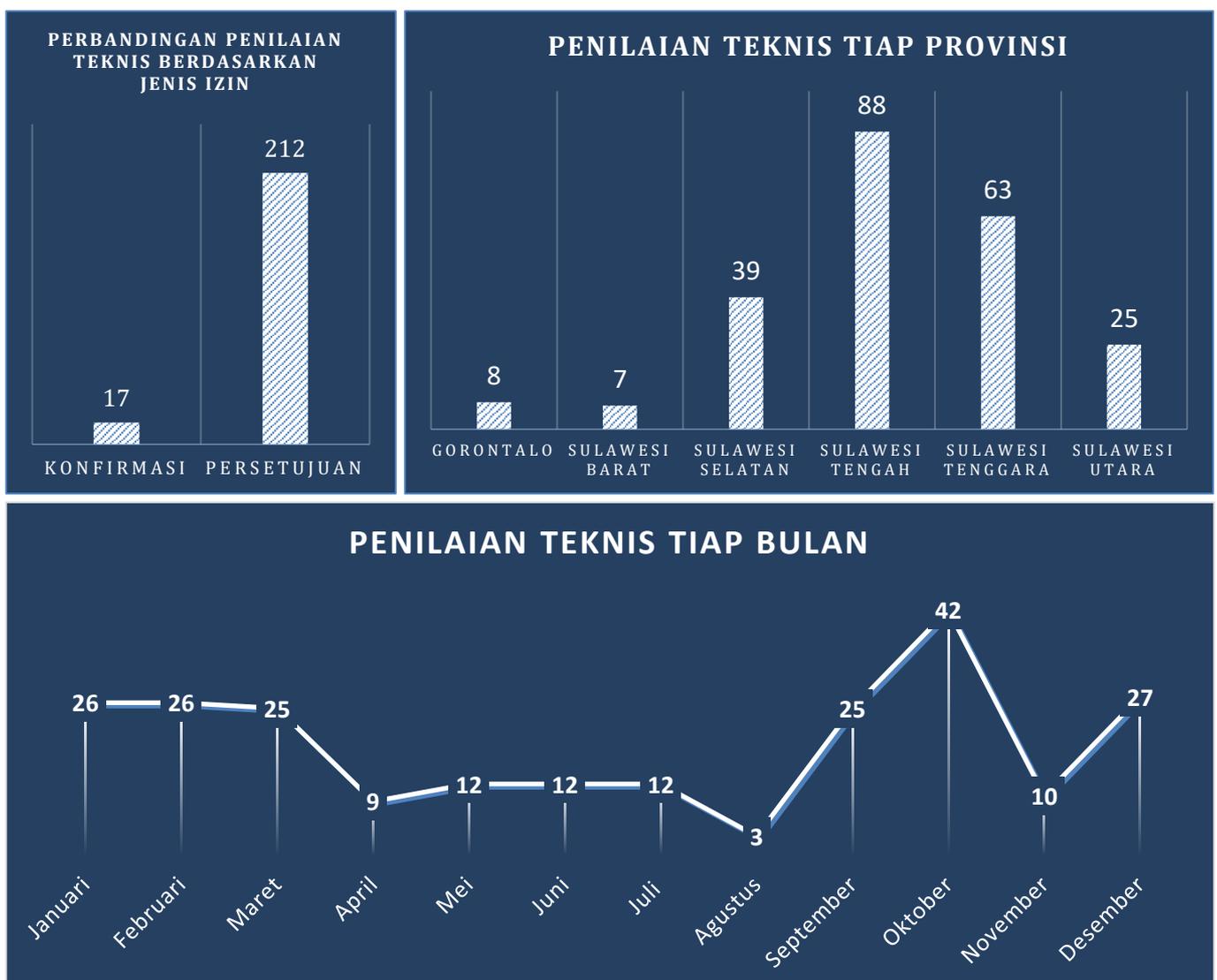
Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan di Kota Makassar pada tanggal 28 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kerja Hukum dan Advokasi DJPKRL, Tim Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Direktorat Perencanaan Ruang Laut, dan Perwakilan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP). Materi yang disampaikan pada sosialisasi antara lain Penilaian Pelaksanaan KKPRL dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut, Kepdirjen PKRL 77/2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sosialisasi, maka dilakukan pre test dan post test.

Penilaian Teknis Pemanfaatan Ruang Laut

Proses pemberian izin Persetujuan melalui tahapan pendaftaran pada sistem OSS,

pemeriksaan administrasi dokumen permohonan, penilaian kelayakan dokumen oleh tim teknis melalui kegiatan penilaian teknis dan verifikasi lapangan, pembayaran PNPB oleh pemohon, dan proses penerbitan Persetujuan. Sedangkan proses pemberian Konfirmasi melalui tahapan pendaftaran pada system pelayanan ruang laut milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu E-Sea, pemeriksaan administrasi dokumen, penilaian kelayakan dokumen oleh tim teknis melalui kegiatan penilaian teknis dan verifikasi lapangan, serta proses penerbitan Konfirmasi Pelaksanaan Kegiatan perizinan pemanfaatan ruang laut dilakukan dengan 2 cara, yaitu menjadi tim penilai teknis yang dilaksanakan di pusat dan pelaksanaan penilaian teknis yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui penugasan oleh pusat. Sepanjang tahun 2024, BPSPL Makassar telah mengikuti kegiatan penilaian teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat PRL maupun melakukan kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh UPT sebanyak 229 kali. Berikut ini adalah verifikasi/ penilaian teknis yang dilaksanakan di wilayah kerja BPSPL Makassar:



Gambar 13. Grafis Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Makassar tahun 2024

Jumlah penilaian teknis paling banyak dilakukan untuk permohonan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penilaian teknis KKPRL sebanyak 88 kali, sedangkan lokasi paling sedikit dilakukan penilaian teknis yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan

jumlah kegiatan penilaian teknis sebanyak 7 kali. Setelah dilakukan verifikasi / penialain teknis, tindak lanjut yang dilakukan antara lain yaitu verifikasi lapang yang dilakukan apabila dalam penilaian teknis ditemukan ketidaksesuaian antara permohonan dan hasil penilaian teknis oleh verifikator. Verifikasi Lapangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian kegiatan verifikasi permohonan kesesuaian ruang laut. Kegiatan ini dilakukan atas hasil penilaian teknis oleh pusat maupun penilaian teknis yang dilakukan oleh BPSPL Makassar.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR dan/atau rencana zonasi, agar pemegang izin menaati RTR yang telah ditetapkan dan memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana RTR dan/atau rencana zonasi, dan Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPRL.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan pemegang KKPRL terhadap dokumen KKPRL dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Waktu penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan



KKPRL dilakukan selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan dan/atau setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca Pembangunan. Metodolgi dalam pelaksanaan monitoring KKPRL ini adalah dengan observasi langsung survei lapangan dan wawancara beserta pengisian kuisisioner. Target pemegang izin yang akan dilakuakn monitoring atau pengendalian pada Tahun 2024 ditentukan oleh pusat dengan total 24 subjek hukum. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, BPSPL Makassar telah melakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut terhadap 23 pemegang izin KKPRL di wilayah BPSPL Makassar yang izinnya telah terbit di tahun 2021 - 2022.

Berdasarkan tabel hasil pengendalian pemanfaatan KKPRL di atas, Berdasarkan hasil analisis, total hasil penilaian PKKPR/KKRL dari Subyek Hukum Berusaha dan Non Berusaha di wilayah BPSPL Makassar pada tahun Anggaran 2024 terdapat 9,0% (2 subyek hukum) yang masuk dalam kategori tidak taat dan 91,0% (21 Subyek Hukum) masuk dalam kategori Taat.

Tabel 13. Hasil Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW IV di BPSPL Makassar

Subjek Hukum	Jenis Dokumen Permohonan	Provinsi	Detil Kegiatan	Luas/ Panjang	Keterangan Status
PT Kolaka Nickel Indonesia	Persetujuan	Sulawesi Tenggara	Pengembangan Terminal Khusus	249.7 Ha	Taat dengan catatan
PT Bumi Mineral Sulawesi	Persetujuan	Sulawesi Selatan	Terminal Khusus	20.3 Ha	Taat dengan catatan
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Anggrek	Konfirmasi	Gorontalo	Pelabuhan Anggrek	707.36 Ha	Taat dengan catatan
But Job Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi	Persetujuan	Sulawesi Tengah	Pipa Dan Kabel Bawah Laut Lapangan Senoro	7 Km	Taat dengan catatan
Pt Kembang Utara	Persetujuan	Sulawesi Utara	Reklamasi	1.14 Ha	Taat dengan catatan
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ii Teluk Palu	Persetujuan	Sulawesi Tengah	Pelabuhan Donggala Dan Pembuangan Hasil Pengerukan	491.22 Ha	Taat dengan catatan
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ii Teluk Palu	Persetujuan	Sulawesi Tengah	Pelabuhan Wani	137.37 Ha	Taat dengan catatan
PT Manado Utara Perkasa	Persetujuan	Sulawesi Utara	Pembangunan pusat bisnis dan pariwisata	90,00 Ha	Taat dengan catatan
Pt Yasmin Bumi Asri	Persetujuan	Sulawesi Selatan	Reklamasi Pulau Lae-Lae	14.11 Ha	Taat dengan catatan
PT Panca Digital Solution	Persetujuan	Sulawesi Selatan	Pembangunan Terminal Khusus	9.65 Ha	Tidak taat
PT Bukit Makmur Solution	Persetujuan	Sulawesi Selatan	Pembangunan Terminal Khusus	124.9 Ha	Taat dengan catatan
Bupati Bulukumba	Konfirmasi	Sulawesi Selatan	Pembangunan Masjid Pinisi	0.48 Ha	Taat dengan catatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	Konfirmasi	Sulawesi Selatan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Desa Lamantu	21.62	Taat dengan catatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	Konfirmasi	Sulawesi Selatan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Desa Nyiur Indah	13.24	Taat dengan catatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Selayar	Konfirmasi	Sulawesi Selatan	Pemabungan Dermaga Penyebaran Desa Kalotoa	6.88 Ha	Taat dengan catatan
PT Mahakarya Sentra Mineral	Persetujuan	Sulawesi Tengah	Pembangunan Tersus dan Stockpile	8.19 Ha	Taat dengan catatan
PT Anugrah Tambang Industri	Persetujuan	Sulawesi Tengah	Pembangunan Kawasan Industri (Reklamasi, Tersus, serta sarana penunjang)	104.41 Ha	Taat dengan catatan

PT Indo Mina Grasia	Persetujuan	Sulawesi Utara	Pembangunan Dermaga	1.43 Ha	Taat dengan catatan
Dirjen Perikanan Tangkap, KKP	Konfirmasi	Sulawesi Utara	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Likupang	171.09 Ha	Taat dengan catatan
Dirjen Perikanan Tangkap, KKP	Konfirmasi	Sulawesi Utara	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	22.85 Ha	Taat dengan catatan
Dinas PUPR Kab. Wakatobi	Konfirmasi	Sulawesi Tenggara	Penataan Kawasan Waterfront City Marina	6.36 Ha	Taat dengan catatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Wakatobi	Konfirmasi	Sulawesi Tenggara	Pembangunan Rumah Susun Mandati	3.88 Ha	Taat dengan catatan
Dinas Perhubungan Kab. Wakatobi	Konfirmasi	Sulawesi Tenggara	Pembangunan Pemecah Gelombang	0.84 Ha	Tidak taat

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Belum terdapat rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU ini di triwulan I 2025. Hal ini dikarenakan tahun 2025 – 2029 terdapat penyusunan renstra baru dan belum terdapat Perjanjian Kinerja yang berisi Indikator Kinerja di level II yang disusun dan ditetapkan. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian apakah indikator kinerja ini masih akan ada di tahun 2025 atau tidak.

3.1.4 IKU4 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan, atau pendampingan lain sesuai dengan kondisi Kawasan Konservasi.

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan Kawasan konservasinya.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar selama tahun 2024 antara lain:

1. Provinsi Sulawesi Selatan : a) Kabupaten Selayar dan b) Kabupaten Barru
2. Provinsi Sulawesi Utara : Kota Bitung
3. Provinsi Sulawesi Barat : Kabupaten Polewali Mandar
4. Provinsi Gorontalo : Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian tahun 2024 untuk IKU4 adalah 5 Daerah dari target 2 Daerah yang difasilitasi atau capaiannya 250% dari target dan berdasarkan matrik pendanaan 2020-2024, telah tercapai 9 dokumen dari 4 dokumen target atau sebesar 225%.

Tabel 14. Capaian IKU Realisasi IKU 4

SS -4	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Diterapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar										
IKU - 4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
0	0	2	2	2	5	250 atau 120 (kinerjaku)	166%	4	9	225	

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja ini mulai ada di Target kinerja BPSPL Makassar pada Tahun 2022, dimana target dan capaian tahun 2022 dan tahun 2023 sama yaitu target 1 Daerah capaiannya 2 Daerah, untuk tahun 2024 targetnya naik menjadi 2 daerah dengan capaiannya 5 Daerah atau 250% dari target, kalau dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2023 maka capaian tahun 2024 mengalami kenaikan 166%, kenaikan tersebut dikarenakan adanya beberapa daerah yang sudah difasilitasi usulan penetapan di tahun 2023 namun baru mengusulkan usulan penetapannya di tahun 2025, sehingga capaian hingga 250% dari target.

Tabel 15. Capaian Target dan Capaian IKU Realisasi IKU 4 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (daerah)	Capaian (daerah)	Presentase Capaian (%)
2020	0	0	-
2021	0	0	-
2022	1	2	200
2023	1	2	200
2024	2	5	250
Jumlah Kumulatif	4	9	

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Target indikator kinerja Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar pada Renstra / Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 adalah sebesar 4 dokumen, sedangkan capaian sampai dengan tahun 2024 ini adalah sebesar 9 dokumen sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 225% dari target. Kontribusi capaian tahun 2024 sejumlah 5 (lima) Daerah atau 55,5% dari capaian sampai dengan tahun 2024.

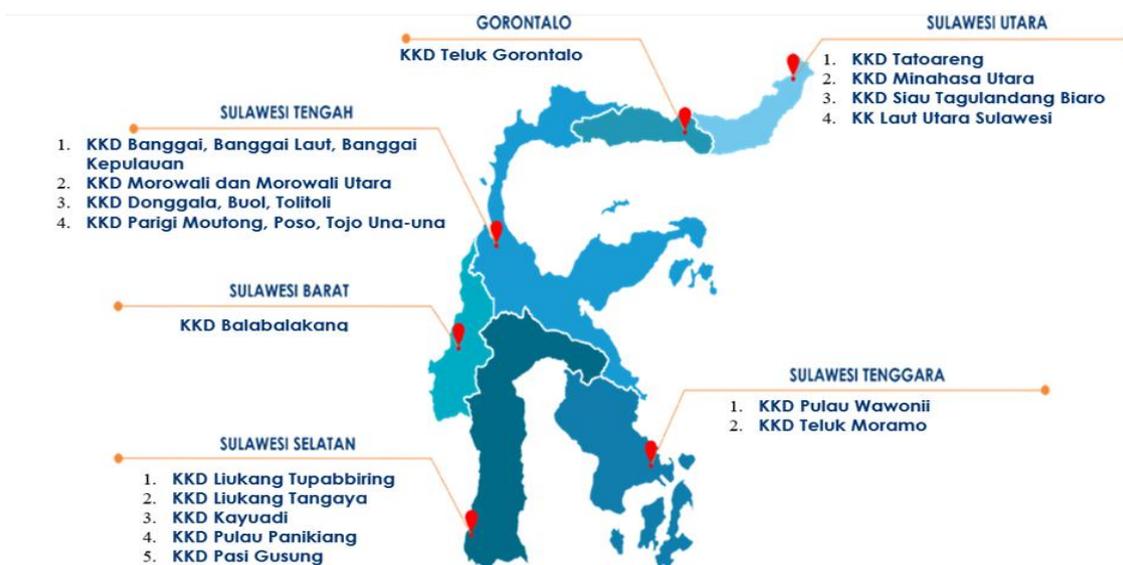
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam capaian IKU4 dikarenakan baiknya koordinasi antara BPSPL Makassar dengan DKP Provinsi yang ada di wilayah kerja BPSPL Makassar, Akademisi, praktisi konservasi, dan tim penyusun materi teknis perairan RZWP3K Integrasi. Hal ini memudahkan dalam pencapaian progress capaian IKU4.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan IKU 4 ini adalah pelaksanaan rapat sekaligus pembahasan terkait pembahasan KKPD kayuadi, kasibusung, panikiang untuk provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan secara bersamaan.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar pada tahun 2024 melakukan pendampingan pengusulan penetapan kawasan konservasi di wilayah Sulawesi pada 5 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi	Nama Kawasan	Jenis
Sulawesi Utara	KKD Bitung KKD Bolaang Mongodow Selatan	Taman
Gorontalo	KKD Gorontalo Utara	Taman
Sulawesi Tenggara	KKD Buton Selatan	Taman
Sulawesi Barat	KKD Polewali Mandar	Taman
Sulawesi Selatan	KKD Teluk Bone	Taman

1. Pendampingan Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Kegiatan fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh BPSPL Makassar pada tahun 2024 ada dua kegiatan yaitu **Evaluasi Teknis penetapan Kawasan Konservasi (KK) di Perairan di Wilayah Bitung dan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Bolaang Mongondow Selatan** dan **Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Perairan Minahasa**.

Evaluasi Teknis penetapan Kawasan Konservasi (KK) di Perairan di Wilayah Bitung dan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Bolaang Mongondow Selatan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024, hasil dari pertemuan tersebut diantaranya Luas kawasan konservasi Bitung yang diusulkan disepakati seluas 9.659,39 Ha dengan proyeksi CEA yang telah sesuai dengan materi teknis RZWP3K yang telah mendapatkan Pertek Menteri KP Nomor B.1500/MEN-KP/IX/2023 tanggal 19 September 2023. KK Bitung telah dicadangkan dalam Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 dan materi teknis RZWP3K yang telah

mendapatkan Pertek Menteri KP Nomor B.1500/MEN-KP/IX/2023 tanggal 19 September 2023. Target konservasi berupa ekosistem terumbu karang dan padang lamun. Kawasan Konservasi Bitung diusulkan dengan kategori Taman dengan perlindungan 13% ekosistem target ke dalam zona inti. Zona lain berupa Zona Transplantasi Karang disesuaikan menjadi Zona Rehabilitasi. Zona inti yang terdapat resort di Desa Dorbolaang, Kecamatan Lembeh Selatan berubah menjadi zona pemanfaatan terbatas. Alur pelayaran di dalam Kawasan Konservasi Bitung akan dialokasikan menjadi Zona Jalur Lalu Lintas Kapal. DKP Sulawesi Utara akan memperbaiki zonasi dalam Kawasan Konservasi bentuk polygon dan akan menghitung kembali luas masing-masing zona dan akan memperbaiki layout pemetaan sesuai dengan Kepdirjen PRL Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyajian Informasi Geospasial.

Konsultasi Publik Kawasan Konservasi Perairan Minahasa dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 di Ocean Villa Desa Parentek Kabupaten Minahasa. Kegiatan dihadiri oleh pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah daerah lingkup Kabupaten Minahasa, pemerintah daerah lingkup Kecamatan Lembean Timur dan Kombi, Kelompok Masyarakat Penggiat konservasi (Konservasi Penyu desa lalumpe, bumi penyu Desa Atep Oki, Konservasi Penyu Desa ranowangko), Penyuluh Perikanan Kabupaten Minahasa, WCS Indonesia, ISKINDO DPW Sulawesi Utara, dan akademisi dari Universitas Sam ratulangi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian dalam proses pembentukan Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pendampingan Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya adalah :

Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Final Pencadangan Kawasan Konservasi Daerah Di Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024

3. Pendampingan Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2024 BPSPL Makassar melakukan fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengikuti kegiatan **Focus Group Diskusi (FGD) Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Teluk Bone** dan **Konsultasi Publik Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Teluk Bone**.

Focus Group Diskusi (FGD) Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Teluk Bone dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2024 di PPI Lappa Kabupaten Sinjai yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, turut hadir Tim dari Universitas Hasanuddin, Camat Pulau Sembilan, Camat Sinjai Utara, Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Cabang Dinas Kelautan Bosowasi, Penyuluh Perikanan, Kepala Desa Harapan, Kepala Desa Buhung Pitue, Kepala Desa Persatuan, Tokoh masyarakat dan nelayan Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara, Tokoh Masyarakat dan nelayan Pulau Harapan kecamatan Pulau Sembilan.

Pada Tanggal 8 Oktober 2024, di Café Kaluku Kabupaten Bone, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar mengikuti kegiatan Focus Group Diskusi (FGD) usulan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Bone di Kabupaten Bone yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, turut hadir Tim dari Universitas Hasanuddin, Camat Cenrana, Camat Tanete Riattang Timur, Camat Sibulue, Camat Mare, Camat Tonra, Dinas Perikanan Kabupaten Bone, Cabang Dinas Kelautan Bosowasi, Penyuluh Perikanan, Kepala Desa Pallette', Kepala Desa Lamurukung, Kepala Desa Cappa Ujung, Tokoh masyarakat dan nelayan Desa Cappa Ujung, dan tokoh masyarakat dan nelayan desa Pallette'.

Konsultasi Publik Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Teluk Bone dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 bertempat di Travellers Hotel Phinisi, adapun beberapa hal yang disepakati dari rapat tersebut meliputi :

Area perairan Gusung Tangkulara sudah diakomodir ke dalam rencana zonasi dimana sebagian wilayahnya masuk sebagai zona inti dan sebagiannya masuk sebagai zona pemanfaatan terbatas dan titik koordinat akan dikonfirmasi setelah pengecekan lokasi;

Telah diakomodir alur pelayaran dalam kawasan dengan mempertimbangkan pasang surut air laut;

Terkait usulan memasukkan Perairan kecamatan Pulau Sembilan ke dalam kawasan konservasi Teluk Bone telah disampaikan bahwa area ini masuk ke dalam kawasan konservasi tersendiri;

4. Pendampingan Fasilitas Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka fasilitas usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat meliputi :

Rapat Tim Pokja Kawasan Konservasi di Wilayah Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024, Rapat ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, yang dilakukan secara hybrid. Rapat ini bertujuan untuk memperoleh masukan, saran serta pendapat dalam penyusunan dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sesuai Permen KP No. 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kegiatan ini dihadiri oleh LPPM Universitas Hasanuddin, OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, OPD Lingkup Kabupaten Polman, Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat, Kepala Kantor UPP Kelas II tanjung Silopo, Koordinator wilker pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Polewali Mandar, Pemerintah Camat Lingkup Kabupaten Polewali Mandar, Koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) Sulawesi Barat, Ketua Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) Sulawesi Barat, serta kelompok pegiat Konservasi Kabupaten Polewali Mandar.

Konsultasi Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dihadiri oleh Tim LP2M Universitas Hasanuddin, BPSPL Makassar, Camat Campalagian Kab. Polman, Camat Balanipa Kab. Polman, PSDKP Pos Polewali Mandar, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Polman, Koodinator Armada Pustaka Mandar, Koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sulbar, Kelompok Pemerhati Lingkungan Laut Biru, Sahabat Penyu dan Sahabat Pesisir.

Konsultasi Publik usulan penetapan kawasan konservasi Polewali Mandar Sulawesi Barat dilaksanakan pada tanggal 18 September 2024 diruang rapat Bappeda Litbang Kabupaten Mandar. Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, turut hadir Tim LP2M

Universitas Hasanuddin, BPSPL Makassar, Camat Campalagian Kab. Polman, Camat Balanipa Kab. Polman, Dinas Perikanan Kabupaten Polman, Bappeda Litbang Kabupaten Polman, PSDKP Pos Polewali Mandar, Kepala Kantor UPP kelas II Tajung Silipo, Penyuluh Perikanan Kecamatan Binuang, Campalagian dan Balanipa, Koodinator Armada Pustaka Mandar, Koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sulbar, Kelompok Pemerhati Lingkungan Laut Biru, Sahabat Penyu dan Sahabat Pesisir.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Belum terdapat rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU ini di triwulan I 2025. Hal ini dikarenakan tahun 2025 – 2029 terdapat penyusunan renstra baru dan belum terdapat Perjanjian Kinerja yang berisi Indikator Kinerja di level II yang disusun dan ditetapkan. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian apakah indikator kinerja ini masih akan ada di tahun 2025 atau tidak.

3.1.5 IKU5 Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)

Kegiatan inisiasi penyusunan draft Kerja sama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih Lembaga/badan/ organisasi untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama dapat dilakukan dengan kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian. Pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha/ industri/ perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan IKU ini dicapai dengan menginventarisasi dan menjumlahkan rancangan kerja sama yang disusun/difasilitasi penyusunannya di wilayah kerja BPSPL Makassar untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon 1.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di wilayah kerja BPSPL Makassar telah dicapai dengan pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama antara lain:

1. Pendetangan Perjanjian Kerja Sama dengan Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Tanggal 20 Mei 2024
2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Gorontalo, tanggal 24 Desember 2024

Tabel 16. Capaian Realisasi IKU 5

SS -5	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar										
IKU - 5	Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capaian s.d 2024	%	
0	3	0	0	1	2	200 atau 120 (kinerjaku)	0	2	5	250	

Berdasarkan tabel di atas IKU ini telah mencapai bahkan sudah melebihi target dengan realisasi dua dokumen dari target satu dokumen. Capaian ini terdiri dari perjanjian kerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo dan berdasarkan

matrik pendanaan 2020-2024 capaian hingga tahun 2024 sebanyak 5 kerjasama konservasi dari target 2 dokumen atau dengan presentase capaian 250%.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU 5 ini belum bisa dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini karena IKU ini tidak terdapat di tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 17. Capaian Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (dokumen)	Capaian (dokumen)	Presentase Capaian (%)
2020	0	0	-
2021	1	3	300
2022	0	0	-
2023	0	0	-
2024	1	2	200
Jumlah Kumulatif	2	5	

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun

Target indikator kinerja Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar pada Renstra / Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 adalah sebesar 2 Kesepakatan, sedangkan capaian hingga tahun 2024 ini adalah sebesar 3 Kesepakatan, sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 150% dari target. Kontribusi capaian tahun 2024 sejumlah 2 (dua) Daerah atau 66.67% dari capaian sampai dengan tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang bisa menjadi penyebab keberhasilan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU3 antara lain adalah koordinasi yang baik yang dilakukan BPSPL Makassar dengan calon mitra diantaranya perguruan tinggi di Sulawesi. Koordinasi yang baik ini direalisasikan dengan kolaborasi kegiatan antara BPSPL Makassar dengan perguruan tinggi selaku calon mitra. Kolaborasi kegiatan yang rutin antara lain pelaksanaan mahasiswa untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) maupun Kerja Praktik.



E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terkait pelaksanaan IKU 5 ini antara lain pelaksanaan progress penyusunan perjanjian kerjasama dilakukan oleh personal masing-masing wilker sesuai dengan lokasi perguruan tinggi yang akan dijadikan mitra.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah penyusunan rancangan perjanjian kerjasama dengan universitas sam ratulangi, Sulawesi Utara dan Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain penyusunan draft, dilakukan juga evaluasi implementasi Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSI) Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan. Pada triwulan II telah dilakukan penandatanganan kerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas

Hasanuddin pada tanggal 20 Mei 2024. Sedangkan pada triwulan III telah disusun rancangan perjanjian kerja sama antara BPSPL Makassar dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado.

Pada Triwulan IV dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo.

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025

Belum terdapat rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU ini di triwulan I 2025. Hal ini dikarenakan tahun 2025 – 2029 terdapat penyusunan renstra baru dan belum terdapat Perjanjian Kinerja yang berisi Indikator Kinerja di level II yang disusun dan ditetapkan. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian apakah indikator kinerja ini masih akan ada di tahun 2025 atau tidak.

3.1.6 IKU6 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)

Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar adalah kelompok masyarakat penggerak konservasi yang menerima Bantuan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Bantuan Konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan pada Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan Keanekaragaman Hayati Laut secara berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja ini akan diketahui dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan melalui Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) untuk 3 kelompok antara lain:

1. Kelompok Penggerak Konservasi OK Dive di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Yayasan Lopie Bahari Nusantara di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kelompok Sangkarrang Ocean Dive (SOD) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 18. Capaian Realisasi IKU 6

SS -6		Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar									
IKU - 6		Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)									
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
1	4	3	3	3	3	100	0	14	14	100	

Berdasarkan tabel di atas realisasi capaian IKU ini sudah mencapai target dengan capaian capaian tiga kelompok dari target tiga kelompok dan berdasarkan matrik pendanaan 2020-2024, hingga tahun 2024 capaian pemberian bantuan KOMPAK telah dilaksanakan kepada 14 kelompok dari target 14 sehingga total capaian sebanyak 100%.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sama, dengan realisasi 3 (tiga) kelompok.

2020		2021		2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	1	4	4	3	3	3	3	4 Kumulatif 15	3 Kumulatif 14

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Realisasi IKU ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat di dalam dokumen perencanaan strategis nasional adalah 20% (3 kelompok) dibandingkan target kumulatif dari 2020 yaitu 15 kelompok, realisasi kumulatif yaitu 14 kelompok. Hal ini karena target pada rencana strategis pada tahun 2024 berbeda dengan target aktual yaitu empat (4) kelompok pada target renstra dan tiga (3) kelompok pada target aktual.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang bisa menjadi penyebab keberhasilan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU6 antara lain adalah koordinasi yang baik yang dilakukan BPSPL Makassar dengan direktorat KKHL, Pemerintah Daerah dan juga dengan kelompok calon penerima bantuan. Selain itu, baiknya koordinasi antara pejabat pengadaan barang dan jasa dengan penanggungjawab kegiatan juga memudahkan dalam proses pengadaan barang bantuan KOMPAK sehingga capaian IKU ini dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terkait pelaksanaan IKU 6 ini antara lain pelaksanaan survey Harga Pokok Satuan (HPS) barang-barang bantuan dengan menggunakan e-katalog dan komunikasi secara langsung dengan calon penyedia yang pada tahun sebelumnya sudah menjadi penyedia bantuan kompak menyebabkan efisiensi penggunaan anggaran karena tidak membutuhkan banyak anggaran untuk terlaksanakannya survey HPS ini.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sampai dengan Triwulan IV telah dilakukan serah terima bantuan KOMPAK kepada tiga kelompok yaitu:



Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) OK Dive Community pada tanggal 7 Mei 2024 di Gedung Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari. Bantuan yang disalurkan adalah 4 set paket alat selam, media transplantasi, dan alat penunjang seperti kamera bawah air dengan total nilai bantuan Rp. 103.710.000,-.



Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Yayasan Lolie Bahari pada tanggal 29 Mei 2024 di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Bantuan yang disalurkan adalah 2 set paket alat selam, media transplantasi, dan alat penunjang seperti kamera bawah air serta alat pengolah data berupa laptop dengan total nilai bantuan Rp. 90.118.625,-.



Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Sangkarrang Ocean Dive pada tanggal 24 Juni 2024 di Kantor BPSPL Makassar, Sulawesi Selatan. Bantuan yang disalurkan adalah 1 unit kompresor, 1 set paket alat selam, dan media transplantasi dengan total nilai bantuan senilai Rp. 106.160.000,-.

Berikut adalah infografis pelaksanaan pengadaan dan serah terima bantuan KOMPAK serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK yang telah disalurkan sampai dengan tahun 2024:



**PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI
DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2024**

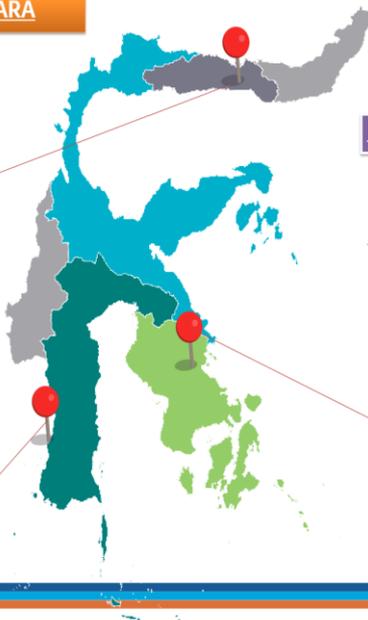


KOMPAK YAYASAN LOPIE BAHARI NUSANTARA

Lokasi : Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah
Bantuan : Sarana Konservasi & Monitoring Terumbu Karang dan Biota laut dilindungi
Nilai : Rp. 90.118.625,-
Item : Scuba gear (2 set), alat selam dasar (5 set), Printer, LCD, Laptop, GPS, Kamera

KOMPAK SANGKARRANG OCEAN DIVE

Lokasi : Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Bantuan : Sarana Konservasi & Monitoring Terumbu Karang dan Biota laut dilindungi
Nilai : Rp. 106.160.000,-
Item : Scuba gear (1 set), Kompresor (1 unit), media transplantasi (21 unit)



KOMPAK OK DIVE COMMUNITY

Lokasi : Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Bantuan : Sarana Konservasi & Monitoring Terumbu Karang, Bambu Laut dan Biota laut dilindungi
Nilai : Rp. 103.170.000,-
Item : Scuba gear (4 set), kamera bawah air (1 set), penanda selam (1 unit)



MONEV BANTUAN TAHUN 2024

KOMPAK YAYASAN LOPIE BAHARI NUSANTARA

Lokasi : Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah
Kondisi : Baik dan dimanfaatkan

KOMPAK OK DIVE COMMUNITY

Lokasi : Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Kondisi : Baik dan dimanfaatkan

KOMPAK SANGKARRANG OCEAN DIVE

Lokasi : Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Kondisi : Baik dan dimanfaatkan

MONEV BANTUAN TAHUN 2023

KOMPAK LAUT BIRU

Lokasi : Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Nilai KKE : 100

KOMPAK LAWARANI

Lokasi : Kota Palopo, Sulawesi Selatan
Nilai KKE : 100

KOMPAK ORCA

Lokasi : Kab. Bone Bolango, Gorontalo
Nilai KKE : 100

MONEV BANTUAN TAHUN 2022

KOMPAK PINISI DIVING CLUB

Lokasi : Kab. Bulukumba,
Sulawesi Selatan
Kondisi : Baik & dimanfaatkan

KOMPAK SOMBORI DIVING CLUB

Lokasi : Kab. Morowali,
Sulawesi Tengah
Kondisi : Baik & dimanfaatkan

KOMPAK TERUMBU KARANG

Lokasi : Kab. Minahasa Utara,
Sulawesi Utara
Kondisi : Baik & dimanfaatkan

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025

Belum terdapat rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU ini di triwulan I 2025. Hal ini dikarenakan tahun 2025 – 2029 terdapat penyusunan renstra baru dan karena adanya pemotongan anggaran untuk program prioritas sehingga sampai penyusunan laporan ini selesai belum ada kepastian terkait pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

3.1.7 IKU7 Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (orang)

Masyarakat di Kawasan Konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Indikator kinerja ini mengalami perubahan target yang awalnya kelompok menjadi Masyarakat hal tersebut dikarenakan adanya perubahan nomenklatur kegiatan pada Renja dan RKAKL yang awalnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menjadi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

Teknik menghitung untuk memenuhi capaian IKU ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja BPSPL Makassar

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 19. Capaian Realisasi IKU 7

SS -6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar											
	IKU - 7 Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)											
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Renstra/Matrik pendanaan 2020-2024				
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%		
0	0	0	0	50	105	210 atau 120 Kinerjajaku	0	105	105	100		

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian indikator kinerja Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru adalah 105 oraang dari target 50 orang atau 210% dari target. Kegiatan yang dilaksanakan adalah edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem kawasan konservasi, sehinga dapat memahami dampak positif dari keberlanjutan terhadap kehidupan Masyarakat, selain itu juga dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil perikanan dan kelautan.



Kegiatan dilaksanakan di 3 lokasi yakni di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kec. Tupabbiring Utara, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2024 dengan jumlah Masyarakat yang terlibat adalah 50 orang; Pulau Panikiang, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan jumlah mayarakat yang terlibat adalah 25 orang; dan di JG Mangrove Park, Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 5 Desember 2024 dengan jumlah Masyarakat yang terlibat adalah 30 orang. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan Tim BPSPL Makassar, Praktisi/Pakar dan Unsur masyarakat dan pemerintah daerah setempat.



Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi dan praktek secara langsung. Dengan pelaksaan secara kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur yang disebutkan sebelumnya, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kawasan konservasi dapat dilakukan efisisensi baik dari segi anggaran maupun dari Sumber Daya Manusia.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU 7 ini belum bisa dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan IKU ini tidak terdapat di tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 20. Target dan capaian Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Presentase Capaian (%)
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	50	105	210
Jumlah Kumulatif	50	105	210

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Realisasi IKU 7 ini belum bisa dibandingkan dengan target Renstra / Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan IKU ini baru terdapat di tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Penyebab keberhasilan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU7 tidak lepas dari koordinasi yang baik yang dilakukan BPSPL Makassar dengan satker Dinas Kelautan dan Perikanan di KKPD serta dengan kelompok di dalam kawasan konservasi.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada IKU ini yaitu capaian yang melebihi target. Capaian 150 orang melebihi target yang ditetapkan yaitu 50 orang yang berarti terdapat optimalisasi anggaran dengan atau sumber daya dengan memaksimalkan kebermanfaatan untuk masyarakat dengan anggaran yang terjangkau.

Pelaksanaan kegiatan juga memperhitungkan efisiensi mobilitas pelaksana, dimana diutamakan kegiatan dilaksanakan oleh pegawai di wilayah wilker terdekat serta narasumber yang dihadirkan juga berasal dari institusi ataupun pakar yang mudah menjangkau lokasi kegiatan Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kawasan konservasi dilaksanakan di tiga kawasan.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU7 tidak lepas dari koordinasi yang baik yang dilakukan BPSPL Makassar dengan satker Dinas Kelautan dan Perikanan di KKPD serta dengan kelompok di dalam kawasan konservasi

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Pelaksanaan program yang menunjang keberhasilan pada capaian indikator kinerja utama ini adalah survey dan identifikasi awal pelaksanaan kegiatan Dimana survey tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Juli dan 1 Agustus 2024 di Liukang Tupabiring, Kabupaten Pangkep dan tanggal 24-25 Oktober 2024 di Pulau Panaikang Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk survey awal di Kawasan Konservasi Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 1-2 November 2024.

3.18.1 IKU8 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat, pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Makassar adalah Jenis ikan yang diintervensi pengelolaannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan.

Target Jenis Ikan berjumlah 6 (enam), yaitu BCF, Cetacea/Lumba-lumba, Dugong, Bambu Laut, Hiu Paus, dan Penyu

Upaya yang dilakukan melalui:

- 1) Survei Pendataan Sebaran dan Populasi Banggai Cardinal Fish di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

- 2) Pendataan Dan Pemantauan Kemunculan Cetacea (LumbaLumba) di Sulawesi Selatan
- 3) Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun) di Kab. Toli Toli Sulawesi Tengah
- 4) Survei Pendataan Populasi Bambu Laut di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
- 5) Monitoring Habitat Hiu Paus Gorontalo
- 6) Monitoring dan Pendataan Penyu Sulawesi Utara
- 7) Monitoring Coral Stok Centre di Malalayang dan Bokori
- 8) Rehabilitasi Anemon Habitat BCF di Banggai
- 9) Respon Cepat Penanganan Dan Penyelamatan Biota Laut Dan Mamalia Terdampar
- 10) Edukasi Penanganan Dan Penyelamatan Biota Perairan Dan Mamalia Laut Terdampar
- 11) Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan dilindungi/terancam punah

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat kritis jenis ikan, dan/ atau penanganan respon cepat.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui realisasi capaian pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Realisasi IKU 8

SS -7		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar									
IKU - 8		Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)									
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Renstra/Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
2	5	8	10	6	8	133.33 atau 120 Kinerjaku	-20%	7	10	142.86	

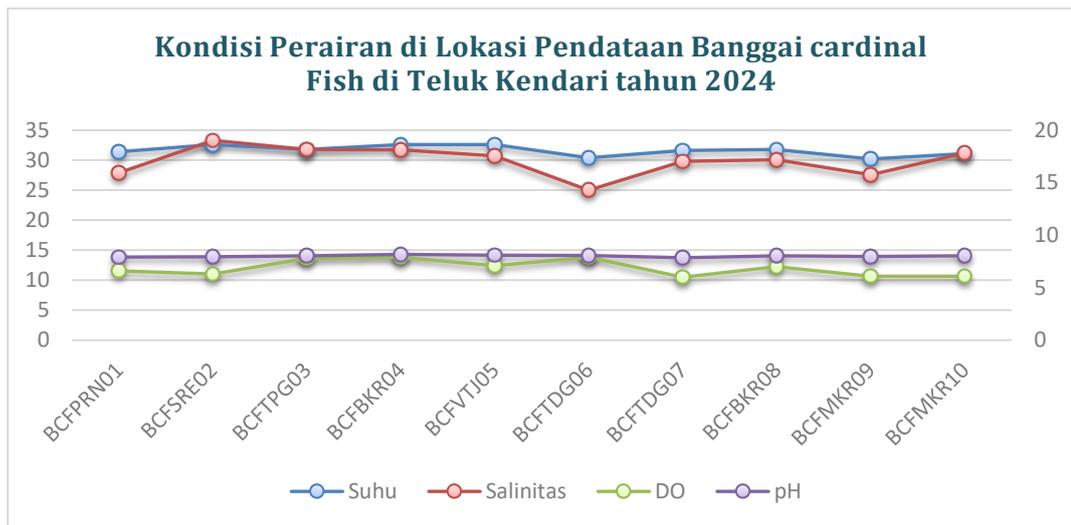
Dari Berdasarkan tabel diatas, capaian dari IKU ini sebesar 133% dari target. Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/ atau Dilestarikan yang terdiri dari Jenis Banggai Cardinal Fish, Cetacean, Bambu Laut, Dugong, Hiu Paus, Penyu, Lamun, Kar

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui realisasi capaian pada Tahun 2024 adalah 8 jenis dari target 6 jenis atau sebesar 133% dari target. Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/ atau Dilestarikan yang terdiri dari Jenis Banggai Cardinal Fish, Cetacean, Bambu Laut, Dugong, Hiu Paus, Penyu, Lamun, Karang.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai realisasi IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1) Survei Pendataan Sebaran dan Populasi Banggai Cardinal Fish di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan Survei Pendataan Sebaran dan Banggai Cardinal Fish/BCF (Pterapogon kauderni) dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 4 – 8 Maret 2024 di perairan Teluk Kendari dan Sekitarnya meliputi wilayah administrasi Kota Kendari dan Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi survei merupakan Lokasi penangkapan/pemanfaatan Banggai Cardinal Fish yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Kendari. Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:



Kondisi lingkungan perairan pada lokasi pendataan ikan Capungan Banggai diperoleh bahwa parameter suhu berkisar 30,2–32,6°C serta salinitas berkisar 25 – 23,3‰ berada di atas/ dibawah ambang batas baku mutu air laut untuk biota laut sedangkan pH (7,85 – 8,08) dan oksigen terlarut/DO (6-7,9) masih dalam ambang batas baku mutu air laut untuk biota laut (KepMen LH No. 51 tahun 2004).

Berdasarkan grafik di atas Tingkat kelimpahan populasi ikan Capungan Banggai berkisar antara 131 – 3.431 ekor/600m² dengan tingkat kepadatan 0,22 – 5,72 ekor/m², sedangkan rata-rata tingkat kelimpahan ikan Capungan



Banggai di perairan Teluk Kendari yaitu **1.182 ekor/600m²** dengan Tingkat kepadatan sebesar **1,97 ekor/m²**.

- Tingkat kelimpahan/kepadatan fase Rekrut (anakan) berkisar antara **5 – 175 ekor** dengan Tingkat kepadatan **0,01-0,29 ekor/m²**,
- Tingkat kelimpahan/kepadatan fase Juvenil berkisar antara **2 – 681 ekor** dengan kepadatan antara **0,003 – 1,14 ekor/m²**,
- Tingkat kelimpahan/kepadatan fase Juvenil berkisar antara **100 – 2.617 ekor** dengan kepadatan antara **0,17 – 4,36 ekor/m²**.
- ukuran individu ikan Capungan Banggai di perairan Teluk Kendari dan sekitarnya didominasi oleh kelompok ukuran tahap Dewasa (>3,5 cm) dengan total rata-rata kelimpahan sebesar 870,9 ekor (74%) dengan Tingkat kepadatan 1,45 ekor/m². Sedangkan kelompok umur Juvenil (1,8 – 3,5 cm) sebanyak 249,2 ekor (21%) dengan ringkat kepadatan 0,42 ekor/m², dan terendah adalah kelompok umur rekrut (anakan) sebesar 62 ekor (5%) dengan Tingkat kepadatan 0,1 ekor/m².

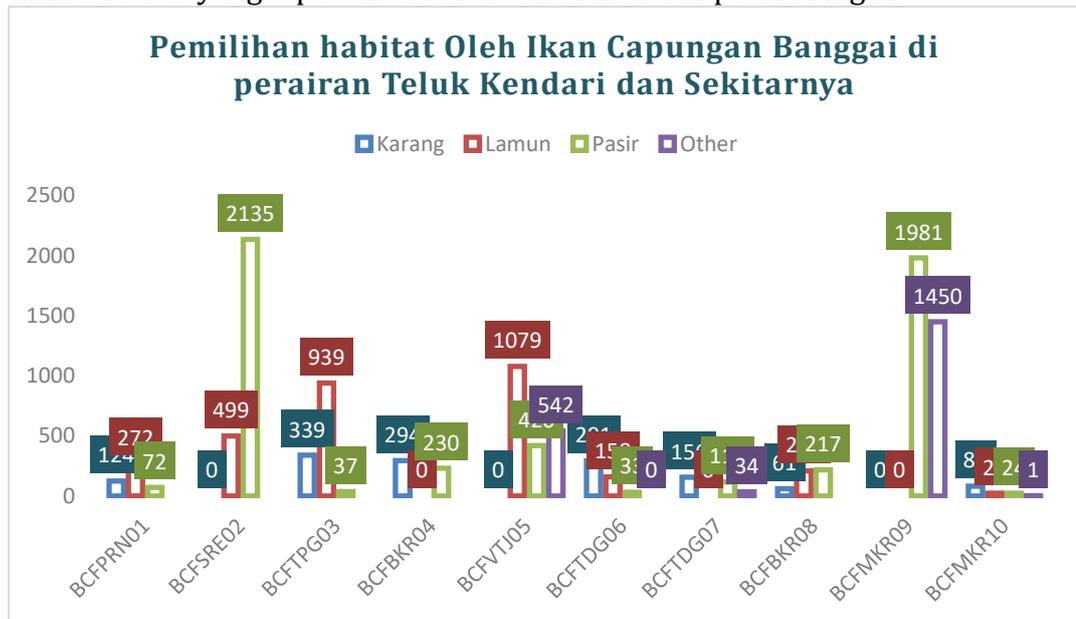


Pemilihan habitat oleh Ikan Capungan Banggai di 10 lokasi pengamatan di perairan Teluk Kendari didominasi pada lokasi dengan dasar perairan **berpasir** dengan jumlah ikan Capungan Banggai yaitu **5.266 ekor (45%)** serta habitat **lamun** dengan jumlah ikan Capungan banggai sebanyak **3.181 ekor**. Sedangkan pemilihan habitat oleh ikan Capungan Banggai dengan komposisi terkecil adalah habitat ekosistem terumbu karang yaitu 1.347 ekor.

Pemilihan mikrohabitat oleh ikan Capungan Banggai terdiri dari Bulu Babi (D

sitosum), Hard Coral (Coral Branching dan Submassive), Anemon (H crispa dan Actinodendron sp) dan mikrohabitat lainnya, dimana ikan Capungan Banggai lebih memilih mikrohabitat Bulu Babi jenis D sistosum dengan persentase

jumlah ikan capungan Banggai sebesar **98,11% dengan total individu yaitu 11.600 ekor** untuk semua kelompok umur. Sedangkan mikrohabitat Hard Coral (karang keras) dan Anemon hanya ditemukan di beberapa stasiun dengan persentasi ikan Capungan banggai sebesar 1,2% (142 ekor) yang memilih karang keras serta 0,47% (56 ekor) yang memilih mikrohabitat Anemon; Hasil analisis pola sebaran Morista ikan Capungan Banggai yaitu (Id) 1,84 dimana > 1 (satu) sehingga pola penyebaran Ikan Capungan Banggai di perairan Teluk Kendari Sulawesi Tenggara adalah mengelompok. Pola sebaran tersebut tidak merata dikarenakan Ikan Capungan Banggai berasosiasi dengan mikrohabitat yang tepat untuk mencari makan dan perlindungan.



2) Monitoring Habitat Hiu Paus Gorontalo

Survei dilakukan pada tanggal 19 - 23 Maret 2024 tim Survei habitat hiu paus telah melaksanakan Kegiatan Monitoring habitat hiu paus bertempat di Desa Botubuarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui kondisi biofisik habitat Hiu Paus dan mengetahui sebaran lokasi makan (*feeding area*) Hiu Paus.



Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan yaitu hiu paus yang teridentifikasi selama pendataan sejak 2016 hingga Maret 2024 yaitu **60 Ekor (Foto ID) dengan keseluruhan berjenis kelamin Jantan** dengan estimasi ukuran yaitu 4 hingga 7 meter. Adapun data presentase tutupan dan kondisi karang pada 3 stasiun yang sudah diamati yaitu, Pada stasiun I diperoleh

Kondisi terumbu karang di Stasiun I berada dalam kategori Baik sebesar 59.40%, pada stasiun II diperoleh kondisi terumbu karang berada dalam kondisi kategori baik sebesar 59.93%, Sedangkan pada Stasiun III Kondisi terumbu karang berada dalam kategori Sedang sebesar 43.67%.

Mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.4 tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. Pengambilan data Kepadatan plankton di lakukan pada 2 stasiun yaitu zona inti dan zona interaksi. Kemudian di Analisis oleh Tim lab Universitas Negeri Gorontalo, dari hasil Analisis yaitu Pada zona inti terdapat 17 spesies plankton, dengan jumlah terbanyak dari spesies *Closterium gracile* dan paling sedikit dari spesies *Synedra Acus* sedangkan pada zona Interaksi terdapat 19 spesies plankton, jumlah terbanyak dari spesies *Melosira italica* dan paling sedikit dari spesies *Epithrmia zebra*, *Eunotia arcus* dan *Rhapalodia gibba*. Data sosial ekonomi dan sebaran pakan alami masih akan dilakukan sambil menunggu musim ikan Nike tiba.



Pada triwulan II telah dilaksanakan survei lanjutan untuk pada tanggal 4-6 Mei 2024 untuk mengetahui kondisi biofisik habitat Hiu Paus dan mengetahui sebaran lokasi makan (feeding area) Hiu Paus, khususnya terkait dengan kemunculan ikan Nike. Pendataan dilakukan di malam hari dan didapatkan bahwa kemunculan ikan Nike berada pada tiga Lokasi yaitu perairan Olalo dan tambo Kelurahan Leato Selatan kota Gorontalo, dan di perairan Kurenai Desa Botubarani Kab. Bone Bolango. Pada lokasi kemunculan tersebut juga dilaksanakan pengambilan sampel air untuk analisis plankton, sehingga didapatkan 3 sampel air sama dengan jumlah titik kemunculan ikan Nike. Dari hasil analisis laboratorium yang dilakukan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNG, ditemukan bahwa pada lokasi Tamboo, ditemukan bahwa terdapat 19 spesies fitoplankton dan 8 spesies zooplankton dengan jumlah total individu yang didapatkan sebanyak 279; Pada lokasi Olalo, ditemukan bahwa terdapat 17 spesies fitoplankton dan 6 spesies zooplankton dengan jumlah total 267 individu; sementara pada lokasi Kurenai, ditemukan bahwa terdapat 13 spesies fitoplankton dan 7 spesies zooplankton, dengan jumlah total plankton yang didapatkan sebanyak 260 individu

3) Pendataan Dan Pemantauan Kemunculan Cetacea (Lumba-Lumba) di Sulawesi Selatan



Pendataan dilaksanakan di perairan Bira, Kab. Bulukumba pada tanggal 3 s.d. 7 Mei 2024. Metode yang digunakan adalah metode pengamatan langsung dan pengamatan udara menggunakan drone. Proses pengamatan dan observasi dengan menggunakan kapal. Apabila terdapat kemunculan, tim observer akan melakukan pengambilan data titik koordinat dengan menggunakan GPS dan mendokumentasikan serta melakukan pencatatan terkait tingkah laku cetacea. Sedangkan pengamatan dari udara menggunakan drone dilakukan pada saat menemukan cetacea untuk mengetahui jenis, jumlah, dan arah pergerakan cetacea. Dari hasil observasi yang dilakukan, ditemukan hasil kemunculan sebanyak empat kali sebagai berikut:

- Tanggal 5 Mei pada sekitar pukul 17.15 sampai pukul WITA ditemukan lumba-lumba sekitar 4 ekor di perairan sebelah Tenggara Pulau Liukang Loe, jenis lumba-lumba adalah lumba-lumba hidung botol indo-pasifik (*Tursiops aduncus*);
- Tanggal 6 Mei pada sekitar pukul 07.03 sampai pukul 07.28 WITA ditemukan kemunculan sebanyak 4 ekor di perairan sebelah Utara Pulau Liukang Loe, dengan jenis lumba-lumba hidung botol indo-pasifik (*Tursiops aduncus*);
- Tanggal 6 Mei pada sekitar pukul 08.11 sampai pukul 08.38 WITA ditemukan kemunculan sebanyak 2 ekor di perairan sebelah Barat Pulau Liukang Loe, dengan jenis lumba-lumba hidung botol indo-pasifik (*Tursiops aduncus*);
- Tanggal 6 Mei pada pukul 10.30 sampai pukul 11.05 WITA ditemukan kemunculan sebanyak lebih dari 30 ekor di perairan antara pulau kambing dan titik 0 km Tanjung Bira Bulukumba, dengan jenis lumba-lumba pemintal/ spinner dolphin (*Stenella longirostris*);
- Tanggal 7 Mei pada pukul 11.17 sampai pukul 11.50 WITA ditemukan kemunculan sebanyak lebih dari 40 ekor sebanyak 2 kelompok di perairan antara pulau kambing dan titik 0 km Tanjung Bira Bulukumba, dengan jenis lumba-lumba pemintal / spinner dolphin (*Stenella longirostris*)

4) Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun)

a) Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun) di Kab. Toli Toli Sulawesi Tengah



Kegiatan Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun) dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli dilaksanakan pada tanggal 31 Mei s.d. 8 Juni 2024 di lima desa yaitu Desa Ogotua, Desa Sese, Desa Bambupula Kecamatan Dampal Utara, Desa Malala Kecamatan Dondo, dan Desa Lalos Kecamatan Galang. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, pengamatan dugong baik secara langsung maupun pengamatan dari udara menggunakan drone, sedangkan metode pengumpulan data habitat lamun menggunakan transek kuadrat sepanjang 100 meter sebanyak tiga transek dalam setiap stasiun pengamatan. Berikut adalah data dan informasi sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, keseluruhan responden baik di Desa Ogotua, Desa Sese, Desa Bambapula, Desa Malala, maupun di Desa Lalos menjawab pernah melihat kemunculan dugong dalam kurun beberapa hari terakhir, dengan rata-rata jumlah kemunculan antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) ekor, Dimana waktu kemunculan pada pagi hari atau sore hari. Informasi sebaran dan waktu kemunculan berdasarkan hasil wawancara tersebut menjadi acuan bagi tim dalam melakukan pengamatan dengan aerial survei.



- Pada saat pengamatan melalui aerial survei menggunakan drone, tim menemukan kemunculan sebanyak 2 (dua) kali, yakni (1) Pada tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.45 WITA di lokasi Dusun Jaleje Desa Ogotua sebanyak 1 ekor ukuran dewasa dengan ciri-ciri khusus terdapat beberapa goresan pada bagian

punggungnya; dan (2) Pada Tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Lokasi Desa Lalos sebanyak 1 (satu) ekor ukuran dewasa dengan ciri-ciri khusus terdapat sejenis lekukan pada sirip dada bagian kanan.



- Hasil pengamatan habitat lamun yang dilakukan di beberapa titik, yakni Dusun Babanji Desa Bambapua sebanyak 1 (satu) titik (3 transek); Pulau Lingayan sebanyak 3 (tiga) titik (9 transek); Dusun Jalejje Desa Ogotua sebanyak 1 (satu) titik (3 transek), dimana hasil pengamatan sementara rata-rata

tutupan lamun pada keseluruhan stasiun antara 30-60%, dengan hasil identifikasi jenis lamun terdiri dari jenis *Enhalus acoroides*, *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii*, *Halophila ovalis*, dan *Syringodium isoetifolium*.

- Hasil pengamatan jejak makan Dusun Babanji Desa Bambapua ditemukan 3 (tiga) titik jejak makan pada kedalaman 3 Meter dengan rata-rata panjang 2,9 meter dan lebar 0,2 meter.

b) Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun) di Kab. Tahuna, Sulawesi Utara

Monitoring ini dilaksanakan pada tanggal 2 - 9 September 2024 berlokasi di Perairan Desa Barangka, Desa Kulur, Desa Lesabe, Desa Petta, Desa Likuang, Desa Naha, dan Desa Bukide Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. Ruang lingkup kegiatan adalah pengumpulan data terkait monitoring kemunculan dugong dan habitat lamun pada lokasi DSCP sebelumnya yang meliputi: (1) Koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Sangihe dan Satuan PSDKP Tahuna; (2) Pelaksanaan Survei; dan (3) Pengolahan data dan Pelaporan Daily News.

Metode yang digunakan pada saat survei adalah metode pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, pengamatan dugong baik secara langsung maupun pengamatan dari udara menggunakan drone, sedangkan metode pengumpulan data habitat lamun menggunakan transek kuadrat sepanjang 100 meter sebanyak 3 transek dalam setiap stasiun pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh hasil sebagai berikut: Dari hasil wawancara yang dilakukan, keseluruhan responden menjawab pernah melihat kemunculan dugong dalam kurun beberapa hari terakhir, dengan rata-rata jumlah kemunculan antara 1 sampai 5 ekor, dimana waktu kemunculan pada saat air laut dalam kondisi pasang.





- Pada saat aerial survei menggunakan drone, tim menemukan kemunculan dugong sebanyak 4 kali dengan total jumlah sebanyak 6 ekor, yakni (1) Pada tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 15.45 WITA di lokasi Desa Lesabbe sebanyak 1 ekor ukuran dewasa; (2) Pada tanggal 3 September 2024 sekitar pukul

16.05 WITA di lokasi Desa Lesabbe sebanyak 3 ekor, dimana 2 ekor merupakan ukuran dewasa, dan 1 ekor diduga ukuran anakan; (3) Pada tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di lokasi Desa Lesabbe sebanyak 1 ekor ukuran dewasa; dan (4) Pada tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 10.45 WITA di lokasi Desa Petta sebanyak 1 ekor ukuran dewasa.

- Hasil pengamatan habitat lamun yang dilakukan di beberapa titik, yakni Desa Bukide sebanyak 1 lokasi (3 transek); dan Desa Likuang sebanyak 1 lokasi (3 transek), dimana hasil pengamatan sementara rata-rata tutupan lamun pada keseluruhan stasiun antara 30-60% dengan dominasi *Halophila ovalis*.

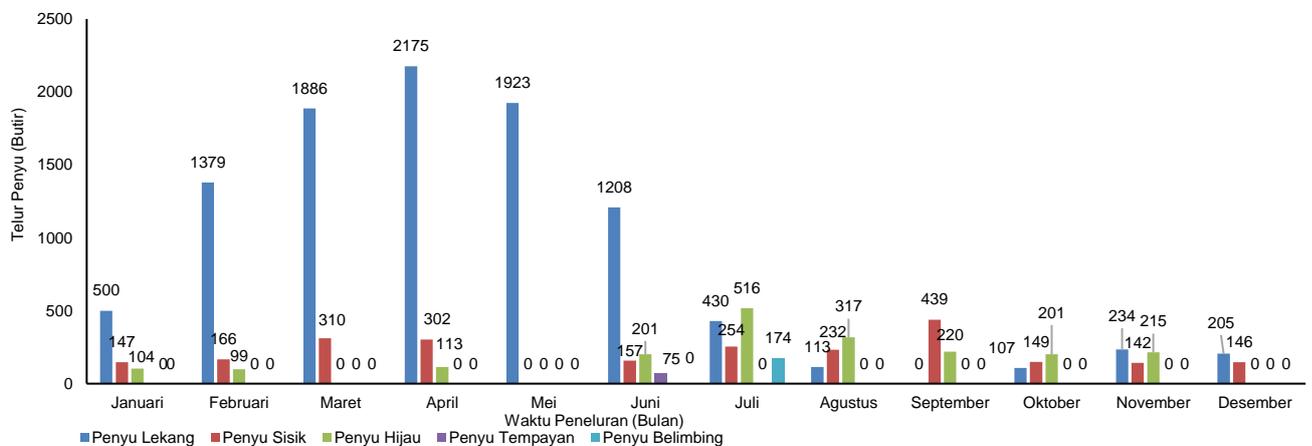
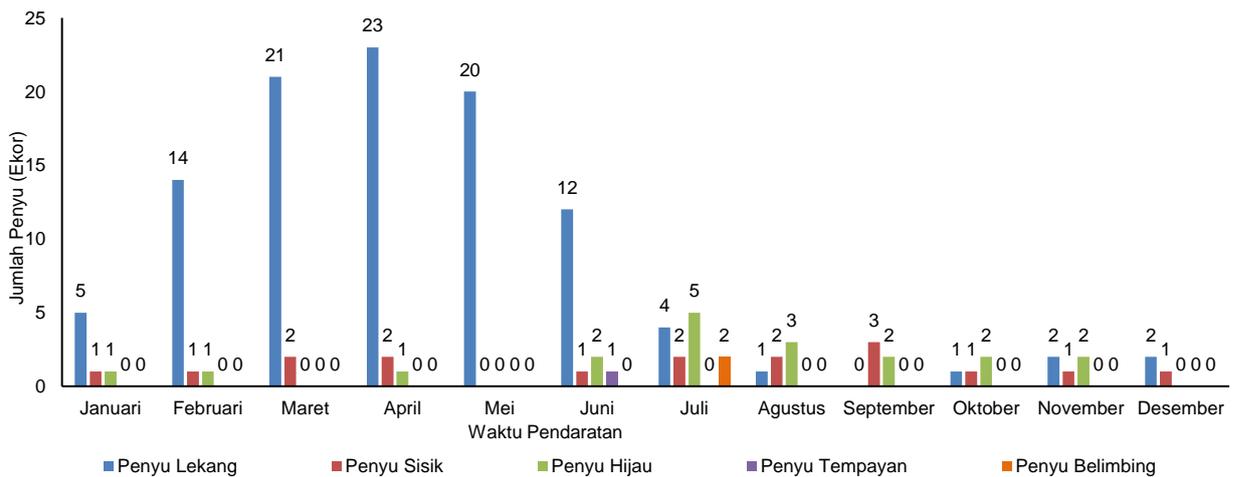
5) Monitoring dan Pendataan Penyu Sulawesi Utara



Pelaksanaan monitoring dan pendataan Penyu di Desa Lalumpe Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan melalui

pengamatan pendaratan Penyu, relokasi sarang telur Penyu apabila berada di lokasi yang terancam, dan pendataan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPSPL Makassar bersama Kelompok Pelestari Penyu Toloun yang merupakan penerima Bantuan Pemerintah di Tahun 2018 mulai bulan Februari 2024 sampai dengan Desember 2024. data dasar yang harus dikumpulkan dalam pemantauan Penyu adalah sebagai berikut:

- Spesies/Jenis Penyu;
- Jumlah Penyu yang mendarat;
- Jumlah sarang Penyu;
- Jumlah sarang yang aman dan yang hilang;
- Daya tetas telur;
- Masa inkubasi telur;
- Koordinat lokasi;
- Karakteristik habitat peneluran Penyu yaitu informasi tentang vegetasi di sekitar habitat/Pantai peneluran, jarak habitat peneluran ke pemukiman terdekat, Panjang Pantai, dan penggunaan lahan di sekitar habitat/Pantai peneluran; dan
- Ancaman/gangguan yaitu predator, abrasi, perburuan, aktivitas perikanan, pencahayaan dan lain-lain





Jenis Penyu yang mendarat selama Tahun 2024 yaitu Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Tempayan (*Caretta caretta*), dan Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*). Jumlah Penyu yang mendarat pada selama Tahun 2024 sebanyak 144 kali. Presentase daya tetas Telur Penyu antara 55,20% sampai dengan 100%, sedangkan presentase tukik survive antara 54,76% sampai dengan 99,04%. Jenis Penyu yang memiliki daya tetas dan tukik survive yang tinggi yaitu Penyu Lekang dan Penyu Hijau.

Vegetasi yang ditemukan di sepanjang lokasi pendataan yaitu Pohon Ketapang (*Terminalia catappa*), Pohon Kelapa (*Cocos nucifera*), Pohon Pepaya (*Carica papaya*), Pohon Waru (*Hibiscus tiliaceus*), Pohon Beringin (*Ficus benjamina* L), dan Katang-Katang (*Ipomoea pes-caprae*). Jarak lokasi

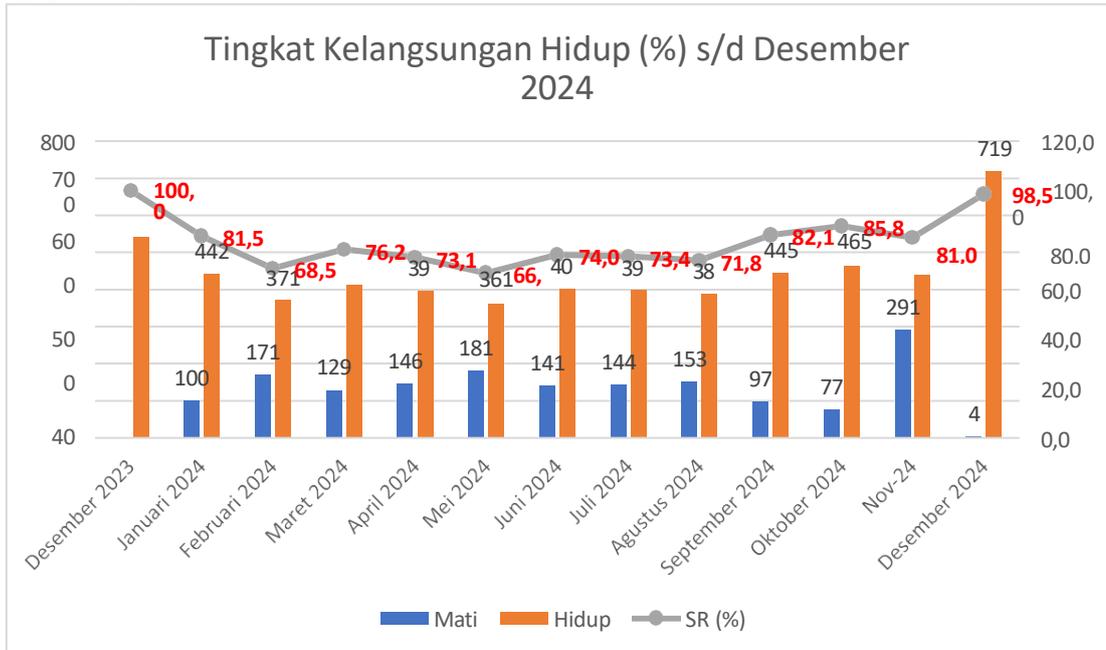
habitat peneluran penyu dari kampung/desa terdekat \pm 100-200 meter. Disepanjang Pesisir Pantai Toloun terdapat resort yang telah dibangun untuk kegiatan pariwisata. Ancaman terhadap habitat peneluran Penyu di lokasi pendataan yaitu abrasi Pantai, predator alami (biawak), dan akar-akar tumbuhan yang merambat di dalam sarang.

6) Monitoring Coral Stok Centre di Malalayang dan Bokori

Monitoring CSC dilaksanakan di dua lokasi yaitu di CSC Malalayang dan CSC Bokori. Monitoring dilakukan setiap bulan selama setahun dan sampai dengan triwulan II telah dilakukan monitoring CSC mulai Bulan Januari s.d. Desember. Tujuan utama pelaksanaan monitoring CSC adalah untuk mengukur *survival rate* (SR), mengukur rata-rata laju pertumbuhan tiap fragmen, Pembersihan dan perawatan pada media dan fragmen, serta memonitor kemunculan biota sekitar dan data lingkungan.



CSC Bokori



Kegiatan Monitoring CSC Bokori melibatkan LP3 Universitas Muhammadiyah Kendari, Kelompok Bajo Bangkit, OK Dive Community, SDC UMK, dan UKM Selam Universitas Haluoleo, serta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

Berdasarkan total Fragmen karang yang hidup pada bulan Desember 2024 yaitu 719 fragmen, dimana diperoleh Tingkat Kelangsungan Hidup atau Survival Rate (SR) yaitu sebesar 98,5%. Peningkatan persentase tingkat kelangsungan hidup pada media rak dan spider disebabkan oleh penambahan fragmen karang pada bulan November sebanyak 291 fragmen sehingga total fragmen mencapai 730 fragmen lebih tinggi dari jumlah fragmen pada bulan Desember 2023. Jika dibandingkan dengan SR bulan Desember 2023 yaitu terjadi peningkatan SR sebesar 24,5%.

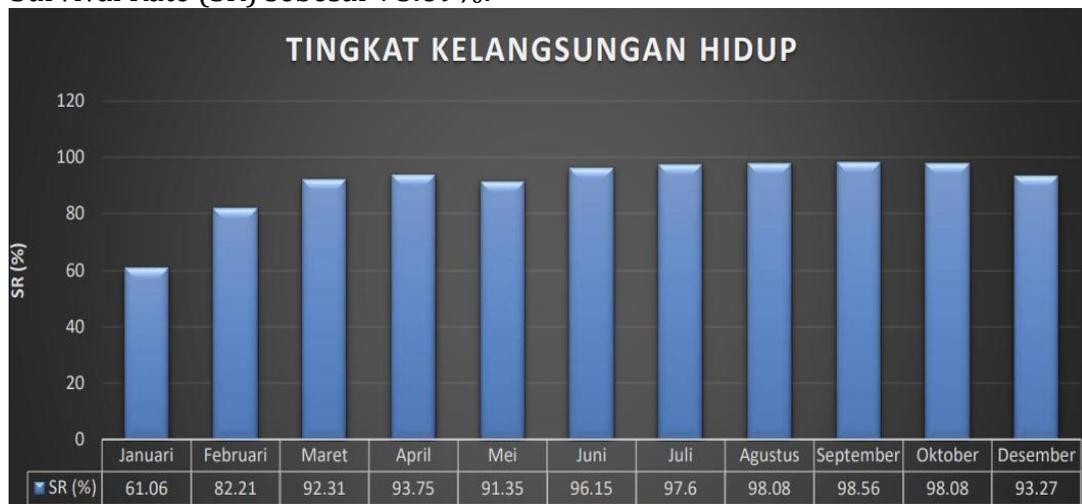
Tingkat Kelangsungan Hidup atau Survival Rate (SR) pada transplantasi karang pada media Rak dan Spider sampai dengan Desember 2024. Berdasarkan total fragmen karang yang hidup pada November 2023, maka diperoleh SR sebesar 98,5%, dimana terjadi peningkatan sebesar 10,52% dari SR pada bulan November 2024. Berdasarkan total fragmen karang yang hidup pada Desember 2023, maka diperoleh SR pada bulan Desember sebesar 98,5%, dimana terjadi peningkatan sebesar 17,5% jika dibandingkan dengan SR bulan November 2024. Berdasarkan total fragmen karang yang hidup pada Desember 2021, maka diperoleh SR pada bulan Desember sebesar 99,4%, dimana terjadi peningkatan sebesar 38,7% dari SR pada bulan November 2024. Tingkat Kelangsungan Hidup (SR) fragmen karang pada media Vertical Artificial Reef (VAR) yang diturunkan pada bulan Desember sebanyak 20 unit dengan total fragmen karang sebanyak 699 fragmen diperoleh SR pada bulan Desember 2024 sebesar 43,92% dengan jumlah fragmen mati sebanyak 392 fragmen, dimana terjadi penurunan SR jika dibandingkan pada bulan November 2024 sebesar 2,86%. Secara keseluruhan media, diperoleh total Tingkat Kelangsungan Hidup fragmen karang di CSC Bokori sampai dengan Desember 2024 adalah 72,15%, dimana terjadi penurunan mulai dari tahun 2021 sampai dengan November 2024 yang signifikan dan terjadi peningkatan SR pada bulan Desember karena terdapat penambahan fragmen baru yang signifikan pada bulan November 2024.

CSC Malalayang



Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kemampuan terumbu karang bertahan hidup (survival rate) untuk semua rak transplantasi yang diturunkan pada bulan Mei 2023 yang telah dilakukan penghitungan diperoleh data rata-rata tingkat kelangsungan hidup/ Survival Rate (SR) sepanjang tahun 2024 sebesar 91.13% dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi terjadi pada bulan September dengan Survival Rate (SR) sebesar 98.56% dan tingkat kelangsungan hidup terendah terjadi pada bulan Januari dengan Survival Rate (SR) sebesar 61.06%. Sedangkan hasil perhitungan tingkat kemampuan terumbu karang bertahan hidup (survival rate) untuk semua rak transplantasi yang diturunkan pada bulan Mei 2024 yang telah dilakukan

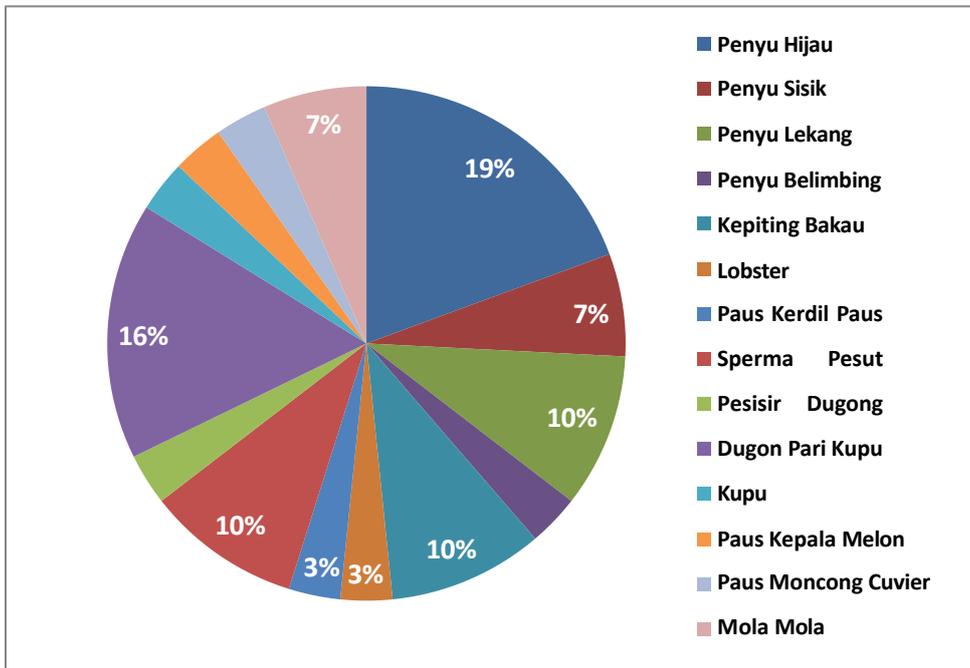
penghitungan diperoleh data rata-rata tingkat kelangsungan hidup/ Survival Rate (SR) sepanjang tahun 2024 sebesar 93.17% dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan Survival Rate (SR) sebesar 100% dan tingkat kelangsungan hidup terendah terjadi pada bulan Desember dengan Survival Rate (SR) sebesar 75.69%.



7) Respon Cepat Penanganan dan Penyelamatan Biota Laut Dan Mamalia Terdampar

Kegiatan respon cepat penanganan biota laut dan mamalia laut terdampar dilakukan selama tahun anggaran 2024. Kegiatan ini dilaksanakan jika ditemukan informasi kejadian biota laut atau mamalia laut yang terdampar di wilayah kerja BPSPL Makassar. Metode pelaksanaan yang dilakukan dari kegiatan respon cepat penanganan biota laut dan mamalia laut terdampar ini adalah melakukan penanganan secara langsung maupun tidak langsung. Penanganan secara langsung adalah penanganan yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh BPSPL Makassar di lokasi kejadian terdampar. Sedangkan penanganan secara tidak langsung adalah penanganan yang tidak dilakukan oleh tim dari BPSPL Makassar, namun ada koordinasi dengan pihak jejaring

terkait yang berada dekat dengan lokasi kejadian terdampar.



Total kejadian terdampar di wilayah kerja BPSPL Makassar pada tahun 2024 sebanyak 26 kejadian, dengan total individu biota dan mamalia laut sebanyak 31 ekor, dengan sebaran kejadian tertinggi pada bulan Mei (5 kejadian) dan kejadian terbanyak terjadi di Provinsi Sulawesi Barat (9 kejadian), dimana kondisi biota dan mamalia laut terdampar terbanyak pada kondisi terdampar mati (kode 2,3,4)



sebanyak total 15 ekor, sedangkan terdampar hidup sebanyak 12 ekor, 2 Jenis yang tercatat memiliki jumlah kejadian Jenis biota terdampar yang terbanyak adalah Penyuu yaitu sebanyak 12 individu, kemudian jenis Paus sebanyak 6 individu dan jenis Dugong dugon sebanyak 5 individu, jenis mola mola sebanyak 2 individu, yang terakhir pesut pesisir dan Pari kupu kupu sebanyak 1 individu, serta 2 jenis Pelepasliaran barang sitaan BARANTIN yaitu Kepiting Bakau dan Lobster.

8) Survei Pendataan Populasi Bambu Laut

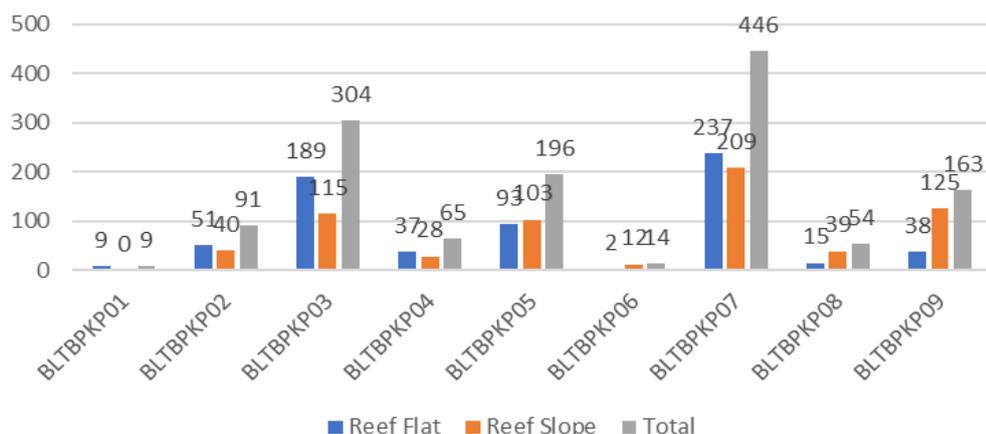
Survei pendataan populasi bambu laut dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Perairan Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan dan Kab. Bokori, Sulawesi Tenggara. Sampai dengan TW IV telah dilaksanakan survei di Perairan Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkajene Kepulauan.



Metode pengamatan menggunakan *Underwater Photo Transect* (UPT) sepanjang 50 meter dan pemotretan dilakukan tegak lurus substrat (jarak 60cm) seluas ukuran frame sehingga luas bidang patrean 2552cm², dengan menggunakan frame sebagai alat bantu berukuran 58 x 44 cm.

Berikut adalah hasil survei pendataan populasi bambu laut di perairan liukang tuppabiring, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan:

Jumlah koloni Bambu Laut per stasiun



No	Stasiun	Nama Lokasi	Total Kelimpahan		
			Jumlah Koloni	Kepadatan (indv/ m ²)	Kategori
1	BLTBPKP01	Taka Bano-banoang	9	0.018	Jarang
2	BLTBPKP02	Taka Lappaka	91	0.182	Sedikit
3	BLTBPKP03	Taka Maduraya	304	0.608	Melimpah
4	BLTBPKP04	Taka Pamangliang	65	0.13	Sedikit
5	BLTBPKP05	Taka Sarappo Kecil 1	196	0.392	Melimpah
6	BLTBPKP06	Batu Tapampang	14	0.028	Jarang
7	BLTBPKP07	Taka Sarappo Kecil 2	446	0.892	Melimpah
8	BLTBPKP08	Tintingang Esak	54	0.108	Sedikit
9	BLTBPKP09	Paddepekang	163	0.326	Banyak

Berdasarkan grafik dan table di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Kelimpahan *Isis hippuris* (bambu laut) berdasarkan kelimpahan dari jumlah koloni yang ditemukan adalah kategori jarang sebanyak 2 stasiun, sedikit 2 stasiun, sedang 1 stasiun, banyak 1 stasiun dan melimpah 3 stasiun, secara keseluruhan kelimpahan rata-rata masuk **kategori banyak**
- Secara keseluruhan dominansi ukuran koloni bambu laut di Perairan Liukang Tupabiring masih didominasi oleh ukuran kecil 0 – 30 cm (47%).
- Hasil pengamatan di Perairan Liukang Tupabiring bambu laut tidak ditemukan pada keseluruhan terumbu karang, yang berarti bahwa tidak semua habitat terumbu karang ditumbuhi oleh bambu laut, pola sebarannya adalah distribusi mengelompok.

Selain pendataan bambu laut, dilakukan juga pendataan terumbu karang. Berdasarkan hasil pendataan didapatkan kondisi terumbu karang berada pada kondisi sedang dengan nilai prosentase rata-rata tutupan 29.09% dengan kondisi karang yang rusak di tiga setasiun dan kategori sedang di enam stasiun.

9) Edukasi Penanganan Dan Penyelamatan Biota Perairan Dan Mamalia Laut Terdampar



Pada Tahun 2024, telah dilakukan dua kali kegiatan Pembinaan atas kejadian pemanfaatan biota laut/ mamalia laut dilindungi di Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Februari 2024. Sedangkan pada tanggal 7 Maret 2024 telah dilaksanakan edukasi Penanganan Mamalia/ Biota Laut Dilindungi yang Terdampar. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat kantor bupati Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Selain pemberian materi, dilakukan juga praktik lapangan penanganan mamalia terdampar.

10) Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan dilindungi/terancam punah



Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Terancam Punah telah dilaksanakan pada 6 Februari 2024. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU 8 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar merupakan IKU yang berkelanjutan selama 5 tahun terakhir, Untuk melihat perbandingan capaian kinerja pada IKU 8 ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Berdasarkan tabel diatas terdapat Capaian pada tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 10 Jenis menjadi 8 jenis, hal ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran sehingga berdampak pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024.

Target indikator kinerja IKU8 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar adalah sebesar 6 Jenis, sedangkan capaian tahun 2024 ini adalah sebesar 10 Jenis, sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 166,67% dari target. Kontribusi capaian tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) jenis atau 133,33% dari capaian sampai dengan tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan capaian target IKU8 antara

lain adalah: penempatan enumerator hiu paus, hiu pari, sidat, dan teripang yang tepat sasaran membantu terealisasinya pendataan yang dilakukan secara kontinu di BPSPL Makassar, Pelaksanaan monitoring CSC Bokori dan Malalayang yang berkelanjutan sesuai jadwal, penentuan waktu survei yang tepat, penentuan lokasi sosialisasi di tempat-tempat yang strategis yang masyarakatnya membutuhkan penyadartahuan mengenai status biota dilindungi, pembinaan dan komunikasi yang baik dengan kelompok penerima bantuan KOMPAK untuk optimalisasi upaya pelaksanaan konservasi. Sedangkan faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan adalah faktor cuaca yang tidak menentu dan bisa berakibat terhambatnya pelaksanaan survey. Selain faktor cuaca, ketidak sanggupan enumerator dalam menghadapi kondisi di lapangan juga menjadi faktor potensi kegagalan dalam pencapaian kinerja ini.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian progress IKU 8 adalah seleksi enumerator yang dilakukan secara *hybrid* (luring dan daring) sangat efektif dalam meminimalisasi **bahkan tidak ada penggunaan anggaran** dalam proses rekrutmen enumerator.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pwncaapaian indicator kinerja ini pada tahun 2024 diantaranya :

2. Sosialisasi keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 bertempat di Balai Desa, Desa Tuladenggi Pantai, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Sosialisasi keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau terancam punah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 bertempat di Aula Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Jejaring Penanganan Mamalia/Biota Laut Dilindungi yang Terdampar dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Belum terdapat rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU ini di triwulan I 2025. Hal ini dikarenakan tahun 2025 – 2029 terdapat penyusunan renstra baru dan belum terdapat Perjanjian Kinerja yang berisi Indikator Kinerja di level II yang disusun dan ditetapkan. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian apakah indikator kinerja ini masih akan ada di tahun 2025 atau tidak

3.1.9 IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- a. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/ atau look alike species (Hiu Appendiks dan Pari Appendiks)
- b. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Sidat, Napoleon, dan Teripang)

Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Sidat,

Teripang, dan Napoleon di wilayah kerja BPSPL Makassar. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau *look alike species*; pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dimanfaatkan; dan Verifikasi Stok Jenis Ikan di wilayah kerja BPSPL Makassar.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 21. Capaian Realisasi IKU 9

Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar											
IKU - 9											
Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)											
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Renstra/Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
5	5	9	10	5	9	180 atau 120 Kinerja	-10%	5	10	200	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa IKU ini telah memenuhi bahkan melampaui target dengan capaian Sembilan (9) jenis dari target lima (5) jenis. Realisasi jenis pada IKU ini adalah Hiu Appendix, Pari Appendix, Sidat, Teripang, Napoleon, BCF, Soft Coral, Anemon, dan Arwana.

Selama Tahun 2024 telah dilakukan Pelayanan Perizinan di BPSPL Makassar berupa penerbitan **1175 Surat Rekomendasi** dan **278 SAJI**, Berikut di bawah ini adalah infografis pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dengan informasi detail perizinan untuk tiap jenis ikan:

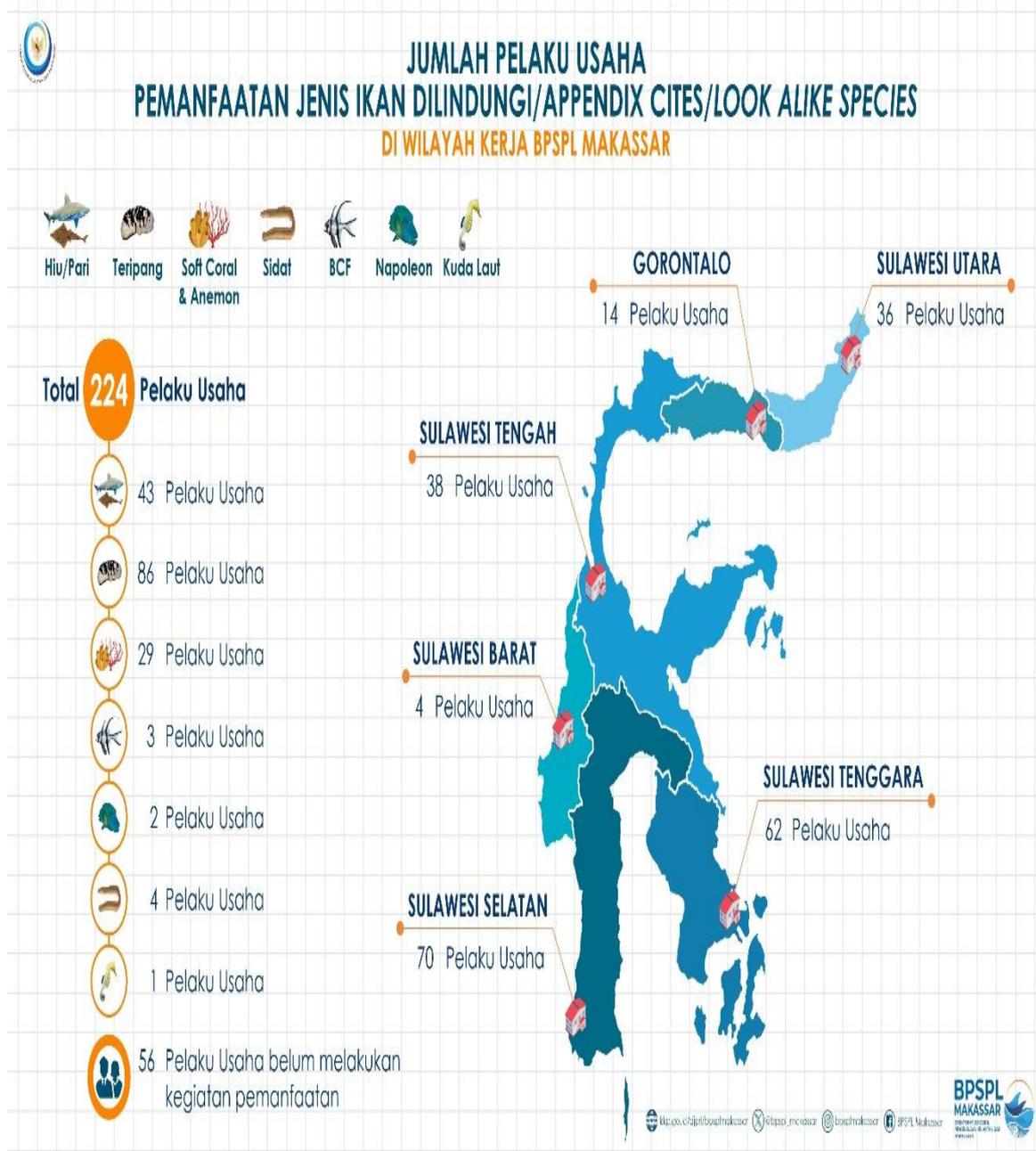


Gambar 14. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar

Berdasarkan infografis di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelayanan perizinan yang paling banyak adalah dari jenis **soft coral** dengan total surat rekomendasi yang diterbitkan sebanyak **572 Rekomendasi DN**, disusul dengan

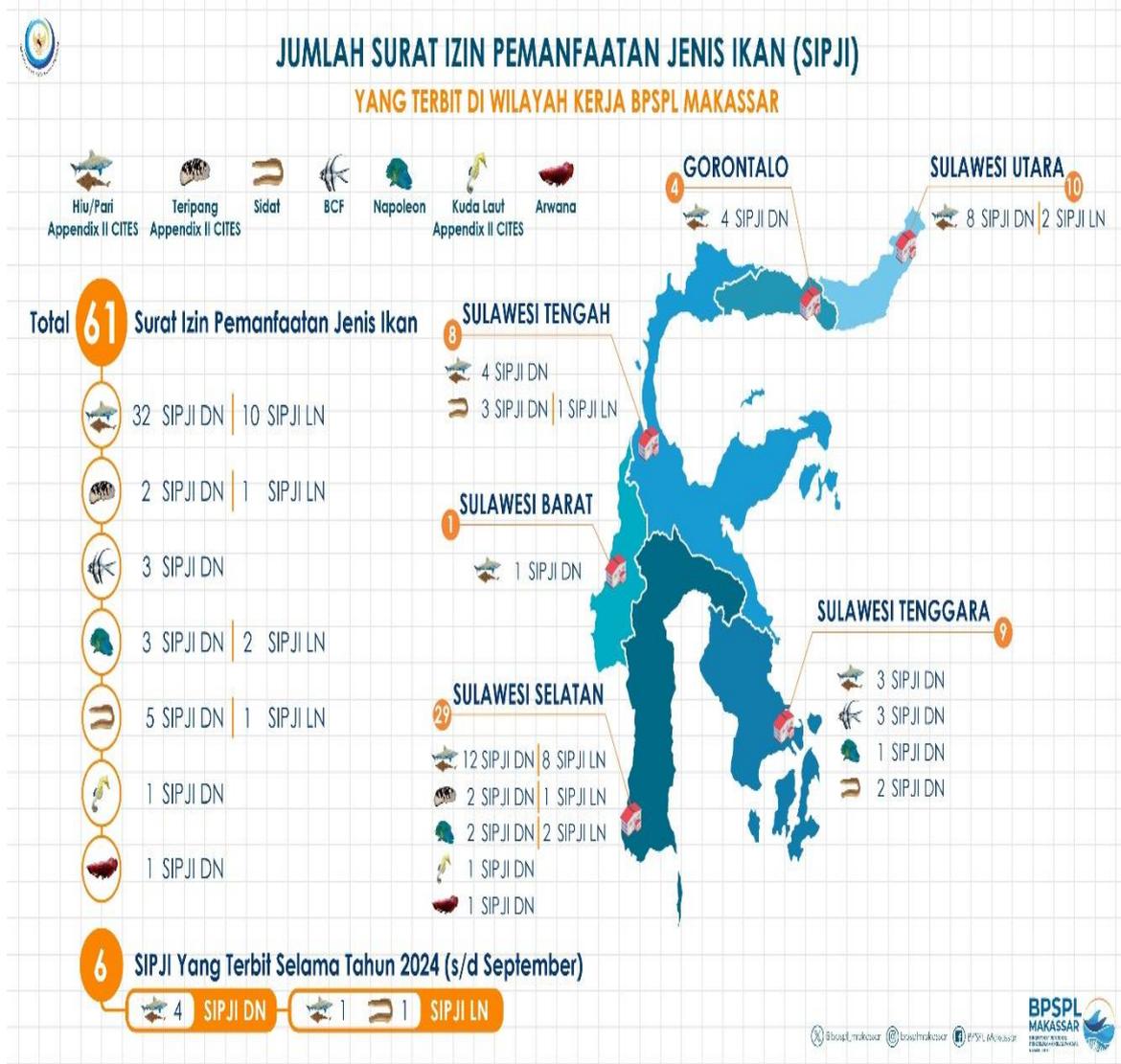
teripang, anemone, dan Hiu Pari. Sedangkan untuk Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang terbanyak dari jenis Hiu Pari sebanyak **217 SAJI**, disusul dengan sidat, BCF, Arwana, dan Napoleon serta Kuda Laut.

Semua bentuk pemanfaatan jenis yang masuk dalam kategori Appendix II Cites atau dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memiliki dokumen SIPJI sedangkan lalu lintasnya harus menggunakan dokumen SAJI. Terdapat perbedaan dalam penerbitan dokumen SAJI DN dan LN. Dokumen SAJI DN diterbitkan langsung oleh BPSPL Makassar melalui persetujuan kepala balai sedangkan SAJI LN diterbitkan oleh Direktorat KEBP. Perbedaan tersebut karena PNPB untuk SAJI LN dibayarkan ke Direktorat KEBP walaupun untuk verifikasi jenis yang dimohonkan sama-sama diperiksa oleh verifikator BPSPL Makassar baik untuk SAJI DN maupun SAJI LN. Berikut adalah infografis yang berisi informasi pelaku usaha yang ada di wilayah kerja BPSPL Makassar:



Gambar 15. Pelaku usaha di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

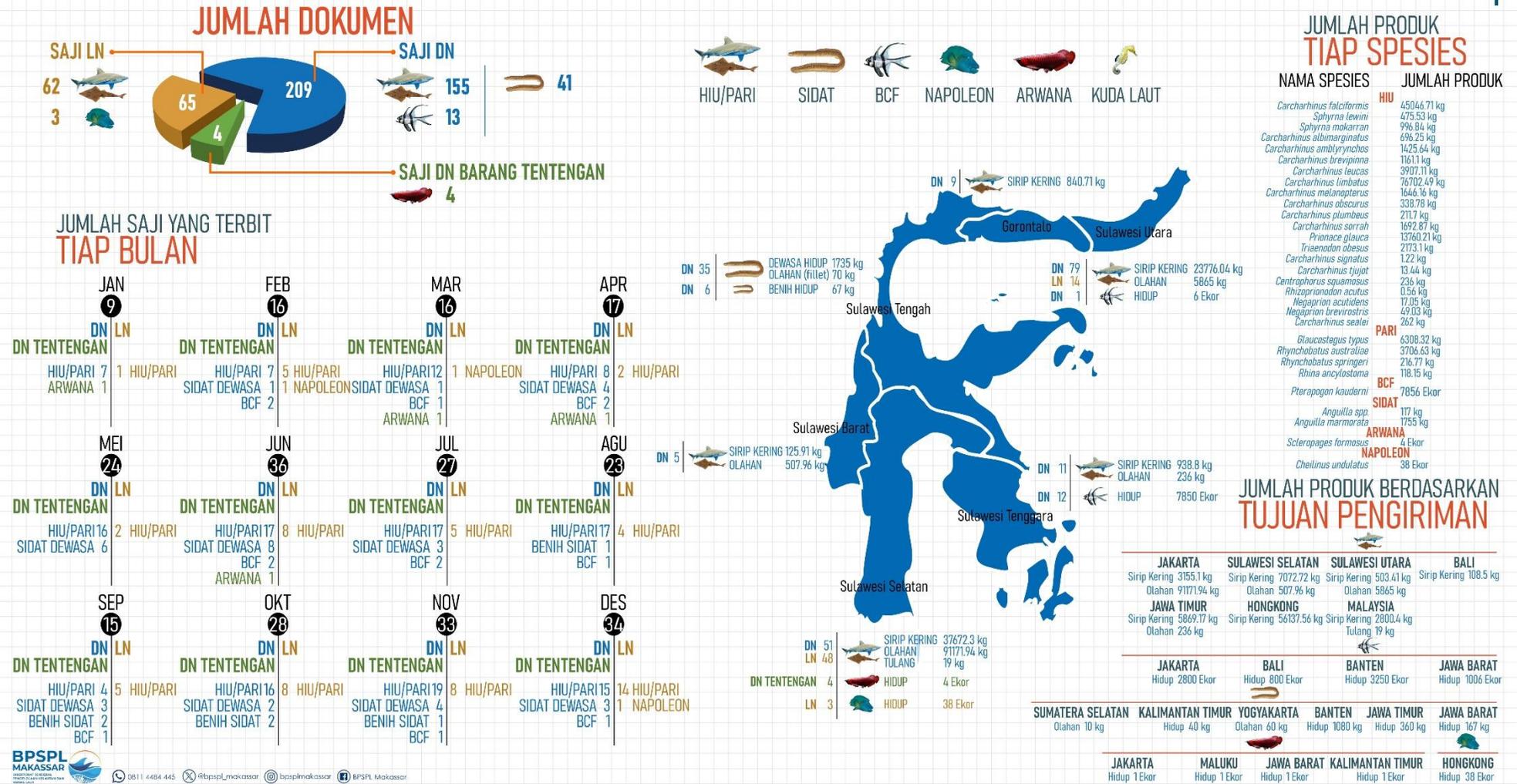
Berdasarkan infografis di atas terdapat **224 pelaku usaha aktif** yang ada di wilayah kerja BPSPL Makassar pada tahun 2024. Dari pelaku usaha di atas terdapat 61 pelaku usaha yang memiliki SIPJI. Berikut adalah infografis yang berisi pelaku usaha yang memiliki SIPJI.



Gambar 16. Pemilik SIPJI di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Jenis-jenis biota yang termasuk ke dalam kategori Appendix II Cites dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus menggunakan SIPJI dalam pemanfaatannya yang menggunakan SAJI sebagai dokumen angkutnya. Jenis ikan yang berdasarkan kategori di atas yang diedarkan di wilayah kerja BPSPL Makassar melalui penerbitan dokumen SAJI antara lain: **Hiu dan Pari Appendix, Sidat, BCF, dan Arwana serta Napoleon.** Untuk detail produk pengirimannya bisa dilihat di infografis di bawah ini

REKAPITULASI PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN (SAJI) DI BPSPL MAKASSAR, TAHUN 2024



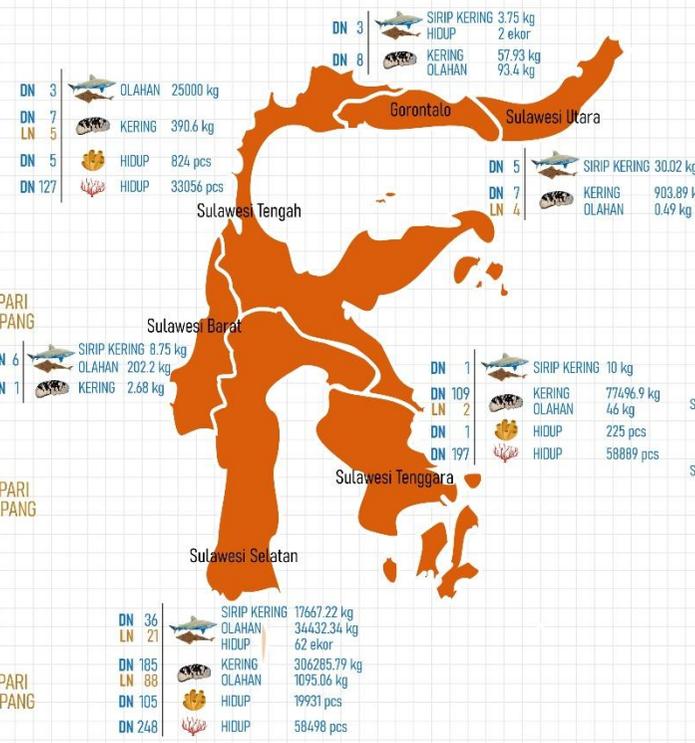
Gambar 17. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar

REKAPITULASI PENERBITAN SURAT REKOMENDASI DI BPSPL MAKASSAR, TAHUN 2024



JUMLAH REKOMENDASI YANG TERBIT TIAP BULAN

Bulan	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN
JAN	5	112	1	48	11	1	19	2	9	1	23	3
FEB	6	95	1	7	25	1	7	8	1	8	1	14
MAR	5	110	1	11	7	1	8	1	1	1	1	1
APR	5	50	1	28	6	1	20	7	1	8	1	1
MAY	5	110	1	11	7	1	8	1	1	1	1	1
JUN	6	78	1	21	7	1	29	7	1	7	1	1
JUL	5	88	1	11	7	1	8	1	1	1	1	1
AGU	8	105	1	21	7	1	29	9	1	7	1	1
SEP	1	73	3	12	12	3	12	3	5	3	7	2
OKT	3	112	4	21	24	4	35	8	5	8	7	2
NOV	3	132	4	12	12	3	12	3	8	8	9	9
DES	3	110	3	21	29	3	29	9	5	7	7	2



JUMLAH PRODUK TIAP JENIS

Jenis	LN	DN
OLAHAN	59634.54 kg	97.88 kg
SIRIP KERING	17621.86 kg	64 ekor
HIDUP	0	0
OLAHAN	1234.46	355741.94 kg
KERING	0.49	29395.85 kg
HIDUP	20980 pcs	150443 pcs

JUMLAH PRODUK BERDASARKAN TUJUAN PENGIRIMAN

Tujuan Pengiriman	Produk	Jumlah
JAKARTA	Sirip Kering	75.38 kg
JAKARTA	Olahan	34432.34 kg
JAKARTA	Hidup	2 ekor
JAWA TENGAH	Olahan	25000 kg
JAWA BARAT	Hidup	7 ekor
JAWA TIMUR	Sirip Kering	13.75 kg
BALI	Hidup	35 ekor
HONGKONG	Sirip Kering	4090.26 kg
KALIMANTAN TIMUR	Hidup	13 kg
MALAYSIA	Sirip Kering	79.15 kg
JAKARTA	Kering	4915.52 kg
JAKARTA	Olahan	232.26 kg
SINGAPURA	Kering	3701.75 kg
MALAYSIA	Kering	21898.34 kg
MALAYSIA	Olahan	0.49 kg
SULAWESI SELATAN	Kering	3558.1 kg
JAWA TIMUR	Kering	341417.22 kg
JAWA TIMUR	Olahan	401.65 kg
KEP. RIAU	Kering	3037.87 kg
KEP. RIAU	Olahan	154.6 kg
JAKARTA	Hidup	1071 pcs
JAWA BARAT	Hidup	2953 pcs
BALI	Hidup	15366 pcs
JAWA TIMUR	Hidup	59 pcs
BANTEN	Hidup	1964 pcs
JAKARTA	Hidup	80550 pcs
BALI	Hidup	31780 pcs
BANTEN	Hidup	24008 pcs

Gambar 18. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar

Informasi detail mengenai jumlah produk, asal pengiriman, dan tujuan pengiriman dapat diketahui melalui infografis di atas. Detail informasi tiap bulan dan tiap spesies juga terdapat pada infografis di atas.

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui, antara lain:

- A. Ketidaksiplinan pengusaha dalam mengikuti SOP pelayanan BPSPL Makassar
- B. Ketiadaan petugas BPSPL Makassar di beberapa pintu keluar
- C. Keterlambatan dalam penerbitan dokumen SAJI atau SRmau
- D. SOP belum terimplementasikan dengan baik oleh petugas pelayanan

BAP Stock Bulanan



Selain pelayanan perizinan, dilakukan juga kegiatan BAP Stock Opname dilakukan untuk memverifikasi jumlah jenis ikan khususnya yang terkategori appendix cites untuk memastikan jumlah stock yang tersedia dengan sisa kuota yang telah direalisasikan. Sedangkan untuk jenis *look alike* verifikasi dilakukan untuk memastikan jumlah produk di gudang walaupun tidak ada kuota untuk jenis *look alike*. Pelaksanaan BAP Stock

dapat dijadikan sebagai monitoring kepatuhan pengusaha, karena hasil pelaksanaan BAP Stock dapat mengindikasikan apabila ada pemanfaatan yang ilegal.

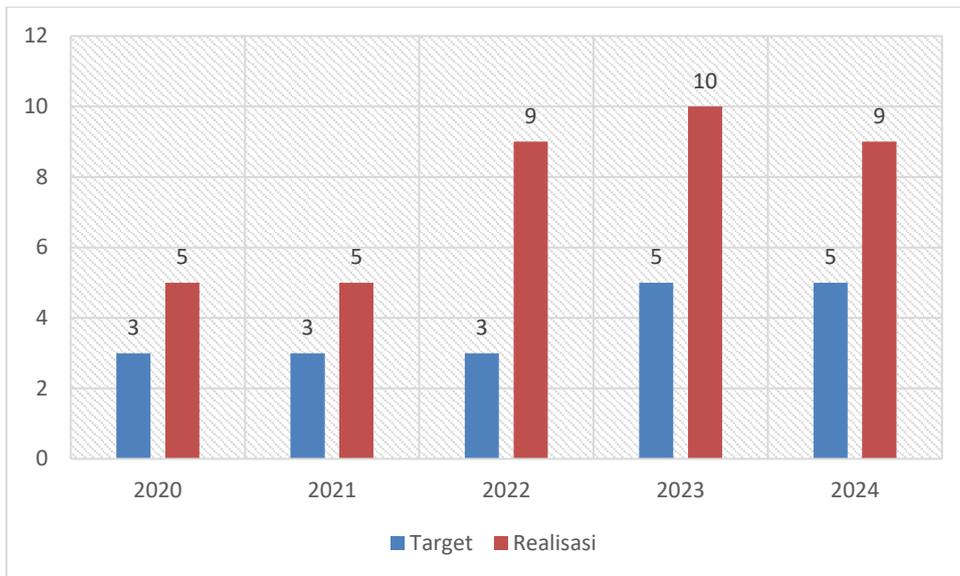
Sampai dengan TW IV, telah dilakukan kepada BAP Stock kepada **30 pelaku usaha**. BAP Stock ini dilakukan kepada 25 pelaku usaha hiu pari, dua pengusaha sidat, dan tiga pengusaha BCF. Berikut adalah hasil pendataan BAP Stock s.d. akhir tahun 2024:

PELAKU USAHA	BULAN 2024							
	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	DESEMBER
	Hiu dan Pari (Kg)							
PT. Rohtadi	23698.22	24515.42	-	-	-	-	32559.58	4000.06
Abdul Malik Tamsil	193.05	-	-	-	-	-	-	-
CV Karya Nelayan	28810.65		290.36	227.88	-	1182.23	-	548.88
CV. Berkah Samudera Mandiri	39850.25	5422.80	-	1,625.00	-	10187.00	-	1986.36

CV. Elitism Makassar	44.49		-	43.36	-	-	-	-
CV. Karya Murni	26377.48	32968.45	15865.95	16834.73	6500.5	-	-	24803.77
CV. Michelle Abadi	42.50		-	43.65	-	10.55	11.95	
CV. Semangat Kawan Sejati Baru	5231.02	538.56	-	-	3096.84	2967.90	3111.27	1085.25
La Nari	118.00	183.00	183.00	173	-	-	-	173
PT Karya Nelayan Paotere	9.06	30,02	5.16	5.215	38.192	474.86	-	7.46
Rizal	311.00		-	-	-	-	-	30
Tachmiyatul Chodiyah	50.92		-	22.35	118.962	-	-	-
UD. Sumber Laut	12.22	22.24	221.59	29.64	19.47	-	111.71	72.65
Sumber Bahari Mandiri	-	-	1565.80		360.41	1591.82	-	201.57
Tendean Ris Engahu	-	-	62.43	57.37	-	-	-	-
Amir (UD Nirwana Samudera)	-	-	-	12.83	-	3.08	-	-
Hetty Liemen	-	-	-	123.51	22.16	185.36	138.83	141.15
Muh Ibnu Fajar Ishak	-	-	-	66.1	-	-	-	-
Sandri Tandris	-	-	-	57.21	-	-	161.87	279.1
Sutiarlan Lengkas	-	-	-	0.8	-	-	-	53.81
UD. Prames Baruna Mandiri	-	-	-	-	-	4525.14	64.998	153.518
CV Cemerlang Darma Bahari	-	-	-	-	-	-	113.8	-
Widiawati Lawendatu	-	-	-	-	-	-	-	115
UD. Mikaila Indah	-	-	-	-	-	-	-	2.41
Anugerah Bahari Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	193.36
Banggai Cardinal Fish (Ekor)								
PT. Dinar Darum Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-
UD. Kencana Laut Persada	-	-	62.43		-	-	-	-
UD. Lestari Aquatika	-	-	-	-	-	-	-	-
Sidat (Ekor)								
Handri	-	60.00	200.00	-	-	-	-	1500
Graha Sidat Mandiri	-	-	-	-	-	-	-	100

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi serta capaian kinerja IKU ini apabila dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah selalu melebihi target. Dimana capaian tertinggi ada di tahun 2023 dengan 10 jenis. Berikut adalah grafik capaian mulai dari tahun 2020 – 2024:



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Pada tahun 2024 Capaian sebanyak 9 jenis yang terdiri dari Hiu Appendix, Pari Appendix, Sidat, Teripang, Napoleon, BCF, Soft Coral, Anemon, dan Arwana sedangkan pada tahun 2023 capaian yang diperoleh sebanyak 10 jenis yang terdiri dari Hiu Appendix, Pari Appendix, Sidat, Teripang, Napoleon, BCF, Soft Coral, Anemon, Arwana dan Kuda Laut. Capaian tersebut berkurang sebesar 10% dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat pemanfaatan jenis kuda laut disebabkan oleh pelaku usaha berhenti melakukan pemanfaatan jenis kuda laut karena biaya operasional tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan serta pada tahun 2024 tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pendataan kuda laut di wilayah kerja BPSPL Makassar.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Target indikator kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar pada Renstra / Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 adalah sebesar 5 jenis, sedangkan capaian hingga tahun 2024 ini adalah sebesar 10 Jenis, sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 200% dari target. Kontribusi capaian tahun 2024 sejumlah 9 (sembilan) jenis atau 180% dari capaian sampai dengan tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam penerbitan surat rekomendasi dan SAJI di BPSPL Makassar adalah karena adanya pembagian jadwal yang jelas untuk petugas verifikasi. Selain itu, penggunaan satu aplikasi yaitu e-Saji untuk semua jenis permohonan pemanfaatan jenis ikan juga membuat alur permohonan hingga penerbitan lebih efektif. Proses verifikasi jenis *look alike* seperti *soft coral* dan *anemone* dilakukan secara *online* sehingga proses verifikasi permohonan dapat dilakukan secara cepat dan relatif aman karena pada jenis *look alike* tidak dibatasi dengan kuota pengambilan dari alam yang rawan disalah gunakan oleh pelaku usaha. Tetapi untuk jenis yang masuk Appendix CITES dan dilindungi, proses verifikasi tetap dilakukan secara langsung untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan pelaksanaan verifikasi soft coral dan anemone secara online dan adanya penambahan jumlah produk maksimal yang verifikasinya dilaksanakan di kantor BPSPL Makassar, maka terdapat efisiensi anggaran berupa perjalanan dinas yang tidak perlu dibayarkan untuk pelaksanaan verifikasi online dan verifikasi langsung di kantor.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja IKU5 pada tahun 2024 antara lain:

- Penyediaan data potensi dan status populasi jenis ikan dilindungi dan Apendiks CITES berupa pemeriksaan Stock Opname ke pelaku usaha
- Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi
- Survey Populasi Bambu Laut di Konawe Selatan

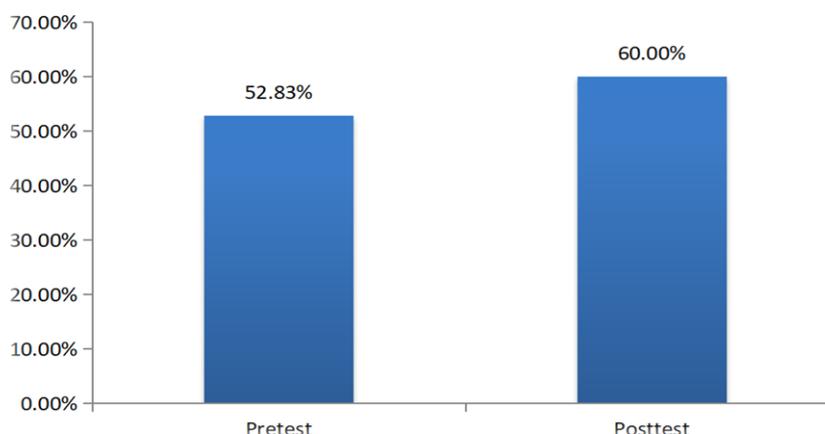
1. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi



Sosialisasi pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan untuk menunjang kelestarian dan ketelusuran jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix Cites sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendix Cites. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, BPSPL Makassar sudah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan di

Wisata Pantai Galesong, Desa Sampulungan Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan dengan total peserta sebanyak 75 orang. Kegiatan diikuti oleh berbagai stakeholder yang terkait dengan pemanfaatan jenis ikan meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, Pangkalan PSDKP Bitung Satwas Takalar, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan, Polairud Makassar, Lantamal, Penyuluh, pengepul/pelaku usaha dan nelayan.

Hasil Evaluasi Nilai Rata-Rata Peserta



Terdapat pre test dan post test untuk mengetahui peningkatan penyadartahuan pada peserta sosialisasi. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan, kegiatan sosialisasi menambah pengetahuan peserta terkait dengan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau termasuk Appendiks CITES.

2. Penyedia Data Sebaran dan Status Populasi Jenis Ikan Dilindungi/ Terancam Punah

Kegiatan penyedia data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/ terancam punah berupa kegiatan pendataan enumerator pada lokasi-lokasi pendaratan yang sudah ditentukan. Pada tahun 2024, dilakukan pendataan pada tiga jenis biota yaitu Hiu Pari, Sidat, dan Teripang. Pendataan dilakukan pada lokasi-lokasi antara lain:

1. Pendataan Hiu Pari:

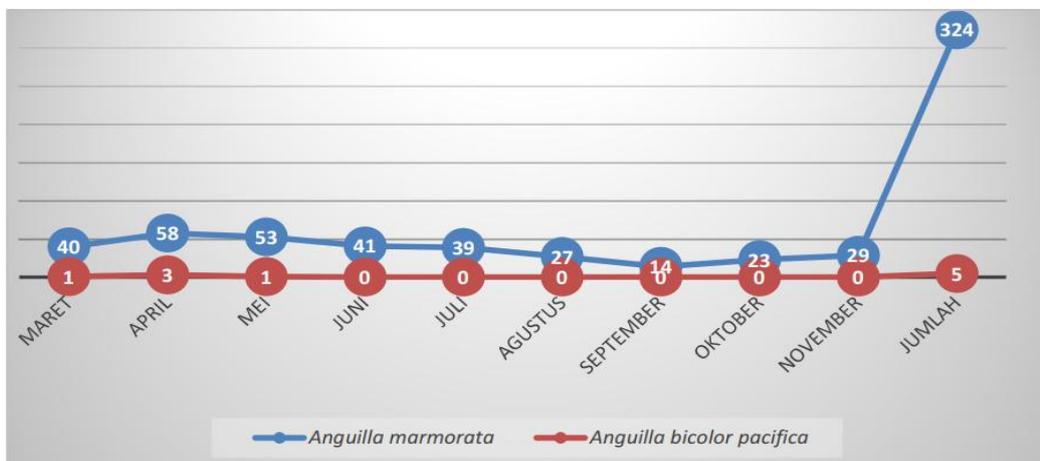
Pendataan hiu pari dilakukan di empat Lokasi yaitu di kab. Takalar, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwuk Banggai, dan Pulau Ambo. Berikut adalah hasil pendataan hiu pari di empat Lokasi sampai dengan Tahun 2024:

- a. Pendataan Hiu Pari di TPI Beba, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan:
Jumlah total Hasil pendataan pendaratan Hiu mulai Bulan Maret - November adalah 5492 Kg (511 ekor), sedangkan Jumlah total Pari yang didaratkan dari Bulan Maret - November adalah 9081 kg (826 ekor).
- b. Pendataan Hiu Pari di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah:
Total produk sirip Hiu dari bulan Maret - November berdasarkan jumlah individunya sebanyak 965 ekor dengan berat total 232,62 Kg. Total produk daging Hiu dari bulan Maret - November sebanyak 61,23 Kg. Untuk Produk Pari diperoleh jumlah total dari bulan Maret-November sebanyak 44 ekor dengan berat total 16,57 kg.
- c. Pendataan Hiu Pari di TPI Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan:
Jumlah keseluruhan hasil tangkapan hiu di bulan Maret- November 2024 yaitu sebanyak 306 ekor dengan berat total sebanyak 1.568,8 Kg, Untuk jenis pari, jumlah total tangkapan Maret-November sebanyak 452 ekor dengan total berat 3242,2 kg.
- d. Pendataan Hiu Pari di Pulau Ambo, Sulawesi Barat:
Jumlah keseluruhan hasil tangkapan hiu di bulan Maret-November 2024 sebanyak 568 ekor dengan total berat sebesar 17.575,86 kg. Di Lokasi

ini juga dilakukan pendataan pemanfaatan produk sirip dan produk daging dimana diperoleh Data pemanfaatan di bulan April-Juni 2024 yakni sirip hiu sebanyak 45,63 kg dan produk daging hiu sebanyak 4 kg, dan daging pari 18,41 kg.

2. Pendataan Sidat di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan mulai dari bulan Maret hingga 2024 November. Kegiatan pendataan jenis ikan sidat dilakukan melalui pendataan hasil tangkapan nelayan yang dibantu oleh enumerator. Dari Kegiatan pendataan yang dilakukan selama 9 bulan diperoleh data hasil total tangkapan sebanyak 329 individu terdiri dari spesies *Anguilla marmorata* 324 individu dan *Anguilla bicolor pacifica* 5 individu. Adapun berat total hasil tangkapan yaitu 1.331,7 Kg, dan berat masing masing jenis yang tertangkap yaitu *Anguilla marmorata* 1.327,3 Kg, sedangkan *Anguilla bicolor pacifica* 4.4 Kg. Adapun data jumlah tangkapan per bulan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Dari hasil pendataan Sidat dewasa, tangkapan tertinggi pada bulan April dimana hasil Sidat yang tertangkap oleh nelayan yaitu 61 individu, 59 individu merupakan jenis *Anguilla marmorata* dan 2 individu merupakan jenis *Anguilla bicolor pacifica*, dan pendataan hasil tangkapan sidat yang terendah terjadi di bulan september, dimana jumlah individu yang terdata berjumlah 14 individu dengan jenis *Anguilla marmorata*.

Data Hasil Tangkapan Tahun 2021-2024

Hasil pendataan enumerator Sidat di danau Poso yang di mulai tahun 2021 sampai 2024. Pada Tahun 2021 dimana hasil tangkapan berjumlah 800 ekor, dan meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah hasil tangkapan 904 ekor dimana jumlah kenaikan jumlah hasil tangkapan sebanyak 104 ekor atau sekitar 12%. Selanjutnya di tahun 2023 terjadi penurunan hasil tangkapan yang sangat signifikan dengan hasil tangkapan berjumlah 525 ekor, dimana selisih hasil tangkap 2022 ke 2023 berjumlah 379 atau sekitar 48%. Dan tahun 2024 jumlah tangkapan nelayan semakin menurun dengan jumlah 329 ekor.



Jumlah tangkapan sidat menurun dari tahun ke tahun akibat dari beberapa faktor antara lain adanya bendungan PLTA yang di duga atau kemungkinan menghalangi jalur ruaya sidat menuju ke danau poso, pengerukan *outlet* Danau Poso sepanjang 12,8 Km, reklamasi kawasan Kompo Dongi (zona riparian). Bulan Juli – Oktober 2024 diperparah dengan kurangnya curah hujan dan penurunan fluktuasi muka air danau. Curah hujan dan elevasi air Danau Poso mulai naik di bulan November.

3. Pendataan Teripang di Pulau Barranglompo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Telah teridentifikasi **29 jenis** teripang pada Maret- November, dimana **6** diantaranya adalah jenis teripang dengan kategori Appendiks II, Jumlah total Hasil pendataan pendaratan teripang mulai Bulan Maret-November adalah **72.820 kg (228.495 individu)** dengan jenis yang dominan yakni *Stichopus Naso* dan terendah yakni jenis *Stichopus pseudohorrens*

Jumlah total Hasil pendataan teripang kategori Appendiks II mulai Bulan Maret - November adalah sebesar **19.452 kg (18.515 individu)** yang didominasi oleh jenis *Holothuria Fuscogilva*.

4. Pendataan glass eel di Kabupaten Poso

Selain pendataan sidat oleh enumerator, terdapat juga pendataan *glass eel* yang dilakukan di Muara Sungai Poso. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui potensi benih ikan sidat di Sungai Poso. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan selama tiga malam didapatkan total *glass eel* sebanyak **1149 ekor** dengan kisaran berat **0.15 – 0.22 gram**.

3. Survei Pendataan Populasi Napoleon

Survei Pendataan Populasi Napoleon dilakukan di dua lokasi yaitu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Survei pendataan ini sebagai variabel pendukung penentuan kuota pemanfaatan Napoleon di Sulawesi.

A) Survei Pendataan Populasi Napoleon di Sulawesi Selatan

Berikut adalah hasil pendataan napoleon di Kab. Sinjai:

No	Stasiun	Jumlah Ikan (ind)	Area Sensus (Ha)	Kepadatan (ind/ ha)	Kondisi Karang	Status Populasi
1	Taninting	18	2	9	Sedang - Baik	Normal
2	Makkoddang 1	7	1.64	4.27	Sedang - Sangat baik	Membaik
3	Makkoddang 2	4	1.51	2.65	Sedang	Mulai Membaik
4	Larearea	11	1.04	10.58	Sedang - Baik	Melimpah
5	Bunging Pare'e	8	1.59	5.03	Baik - Sangat baik	Membaik
6	Marempu	6	1.68	3.57	Buruk - Baik	Mulai Membaik
7	Pasiloange	2	0.49	4.08	Sedang - Baik	Membaik
8	Susunang	3	1.23	2.44	Sedang - Baik	Mulai Membaik
TOTAL		59	11.18			
Kepadatan Rata-rata				5.28		Membaik

Berdasarkan hasil pendataan di atas didapatkan status populasi dalam kategori **membaik** dengan **kepadatan rata-rata 5.28** di mana kepadatan paling tinggi terdapat di stasiun **Larearea dengan kepadatan 10.57 ind/ ha** dengan status **populasi melimpah**.

Sedangkan hasil pendataan di Liukang Tupabiring adalah sebagai berikut:

No	Stasiun	Jumlah Ikan (ind)	Area Sensus (Ha)	Kepadatan (ind/ ha)	Kondisi Karang	Status Populasi
1	Taka Iuara	32	2.76	12	Sedang - Sangat baik	Melimpah
2	Pulau Salebo	37	1.76	21.02	Sedang - Sangat baik	Melimpah
3	Taka Lappaka	6	2.21	2.71	Baik	Mulai Membaik
4	Taka Madurayya	16	1.76	9.09	Sedang - Sangat baik	Normal
5	Samatellu Lompo	24	1.92	12.50	Sedang - Baik	Melimpah
6	Gusung Bontosua	7	2.06	3.40	Buruk - Baik	Mulai Membaik
7	Taka Tintingang Esak	31	1.83	16.94	Sedang - Sangat baik	Melimpah
8	Taka Bone	1	1.68	0.60	Sedang - Sangat baik	Kritis
9	Taka Paddepekang	13	1.62	8.02	Sedang - Baik	Normal
TOTAL		167	17.6			
Kepadatan Rata-rata				9.49		Normal

Berdasarkan hasil pendataan di atas didapatkan status populasi dalam kategori **normal** dengan **kepadatan rata-rata 9.49** di mana kepadatan paling tinggi terdapat di **stasiun Larearea dengan kepadatan 21.02 ind/ ha** dengan status **populasi melimpah**. Dari hasil pendataan di atas didapatkan bahwa kondisi status populasi di Liukang Tuppabiring lebih baik daripada di Kab. Sinjai. Walaupun terdapat stasiun yang kategori kritis di Liukang Tuppabiring, namun kondisi di stasiun didominasi dengan kondisi melimpah, hal itu membuat status populasinya dalam kondisi normal.

B) Survei Pendataan Populasi Napoleon di Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil survei populasi ikan Napoleon di perairan Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana diperoleh hasil sebagai berikut:

- Survei populasi Ikan napoleon dilakukan dengan metode Snorkeling Visual Census (SVC) pada 9 lokasi survei yang dilakukan di Kecamatan Pasarwajo (Kondowa, Saragi, Pasarwajo, Holimombo, Holimombo Jaya) dan Kec. Wabula (Bajo Bahari, Wasuemba, Wasampela, dan Koholimombo);
- Ikan napoleon ditemukan di perairan Kec. Wabula dengan total 24 ekor yang tersebar di 4 lokasi sedangkan di perairan Kec. Pasarwajo tersebar di 3 lokasi dari 5 lokasi survei dengan jumlah 7 ekor.
- Hasil pendataan ikan Napoleon dengan Snorkeling Visual Census (SVC), di perairan Pasarwajo dan Wabula Kab. Buton dengan total lokasi pengamatan sebanyak 9 lokasi diperoleh sebanyak 31 ekor dengan total luasan area lintasan survey yaitu 13,15 hektar, dengan total kepadatan ikan napoleon di perairan Kab. Buton yaitu 2,36 ekor/ha dengan kategori populasi yang “masih rentan dan mulai membaik” dengan tingkat kepadatan “sangat rendah”.
- Tingkat kepadatan ikan Napoleon di perairan Buton bervariasi mulai dari tingkat kepadatan sangat rendah (<2 ekor/ha) yang terdapat di daerah Wasuemba, Holimombo, Halimombo Jaya, Saragi, dan Pasarwajo, tingkat kepadatan rendah (2,1 – 4 ekor/ha) pada lokasi Kondowa dan Wasampela, sedangkan tingkat kepadatan tinggi (6,1 – 8 ekor/ha) pada lokasi Koholimombo dan tingkat kepadatan sangat tinggi (> 8 ekor/ha) terdapat pada lokasi Bajo Bahari;
- Dilihat dari ukuran ikan napoleon yang teridentifikasi di perairan Kab. Buton bervariasi mulai dari fase Juvenil sampai dengan Dewasa yang siap matang gonad dengan ukuran fase Juvenil berkisar antara 15 – 30 cm, sedangkan fase dewasa berkisar antara 35 – 55 cm. Ikan napoleon di perairan kab. Buton didominasi oleh ikan napoleon fase Juvenil yaitu 68% yaitu 21 ekor sedangkan fase dewasa teridentifikasi sebanyak 10 ekor atau 32%.
- Status populasi ikan napoleon dari tahun 2014 sampai dengan 2024 yaitu terjadi peningkatan status populasi dari 0,76 ekor/ha pada tahun 2014 dengan kategori populasi yang “sangat kritis” dengan kepadatan “sedang” Survei Pendataan Populasi Ikan Napoloen (*Cheilinus undulatus*) di Perairan Kab. Buton Tahun 2024 50 menjadi 2,36 ekor/ha pada tahun 2024 dengan kategori populasi yang “masih rentan dan mulai membaik” dengan tingkat kepadatan “sangat rendah”.

Belum ada pemanfaatan ikan napoleon untuk tujuan perdagangan di Kab. Buton, namun terdapat nelayan dari luar yang mencari ikan Napoleon sebagai target tangkapan



G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU9 pada Triwulan I Tahun 2025 adalah pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, Penyedia data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/ terancam punah, dan BAP Stock Bulanan. Hal ini walaupun belum terdapat Indikator Kinerja yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja namun kegiatan pelayanan perizinan adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan dan telah disusun rencana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan pada tahun 2025.

3.1.10 IKU10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah tindakan mencari data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi. Teknik penghitungan IKU ini adalah dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi. Kegiatan untuk mendukung IKU ini adalah dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Identifikasi di Sulawesi Selatan.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan table 22 target IKU ini telah tercapai dengan capaian satu dokumen dari target satu dokumen atau capaiannya 100%. Dokumen identifikasi Air Laut Selain Energi (ALSE) di Sulawesi Selatan.

Tabel 22. Capaian Realisasi IKU 10

SS -9		Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar									
IKU - 10		Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)									
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Renstra/Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
0	0	0	0	1	1	100	0	1	1	100	

Untuk mendapatkan capaian tersebut dilaksanakan survey identifikasi pemanfaatan ALSE di beberapa tempat diantaranya :

1. Survei Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar pada tanggal 15-17 Mei 2024
2. Survei Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang kali ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto pada tanggal 21-23 Mei 2024.
3. Survei Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang kali ini dilaksanakan di Kabupaten Barru pada tanggal 3-4 Oktober 2024

Dari survey yang dilaksanakan tersebut didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil Identifikasi ALSE

No	Pelaku Usaha	Kegiatan	Status Izin	Kewenangan	KBLI	Luas Lahan (m ²)	Perkiraan Kebutuhan Air setahun (m ³)	Lokasi	
1	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	21.700	941.616	Takalar	Sulsel
2	CV Punaga Agung	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	292.000	24.060.800	Takalar	Sulsel
3	CV Gapura	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	90.000	7.416.000	Takalar	Sulsel
4	PT Tritunggal Cemerlang	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	18.000	1.008.000	Takalar	Sulsel
5	CV Senada Horta	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	9.600	537.600	Makassar	Sulsel
6	CV Dhani Yuwono	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	100.000	572.000	Bulukumba	Sulsel
7	PT Arung Bonto Bahari	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	120.000	460.800	Bulukumba	Sulsel
8	PT Gosyen Global Aquaculture	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	140.000	4.760.000	Bulukumba	Sulsel
9	PT Dua Lima Satu Dua	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	330.000	4.950.000	Bulukumba	Sulsel
10	PT Sinar Sukses Persada	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	80.000	1.920.000	Jeneponto	Sulsel
11	PT Don Udang Aquaculture	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	55.000	3.107.500	Jeneponto	Sulsel
12	PLTU Punagaya PT PLN Nusantara Power	Pendingin Turbin	KKPRL	Gubernur	36002	583.314 m ³ /hari	212.909.610	Jeneponto	Sulsel

		Pembangkit Listrik							
13	PLTU Jeneponto PT Bosowa Energy	Pendingin Turbin Pembangkit Listrik	-	Gubernur	36002	4.000.000 m3/hari	1.460.000.000	Jeneponto	Sulsel
14	PT Primanusa Alya Bahari	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	40.328	318.591	Jeneponto	Sulsel
15	PT Sumber Laut Mitra	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	2.500	141.000	Jeneponto	Sulsel
16	Araya Crustacea Cemerlang	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	20.000	590.000	Jeneponto	Sulsel
17	Tambak Intensif Mallasoro	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	17.475	515.513	Jeneponto	Sulsel
18	PT Crustacea Indo Farm	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	16.000	472.000	Jeneponto	Sulsel
19	PT Rika Raihan Mandiri	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	20.000	528.000	Barru	Sulsel
20	PT Esaputlii Prakarsa Utama	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	7.009 m3/hari	2.558.285	Barru	Sulsel
21	PT Sinar Barru Prima	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	339.8 m3/hari	124.027	Barru	Sulsel
22	CV Dewi Windu	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	6.900	237.800	Barru	Sulsel
23	PT Bomar Biopova Akuakultur	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	35.000	109.500	Barru	Sulsel
24	PT Bintang Gunung	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	5.000	90.000	Mamuju	Sulbar
25	PT Randomayang Tambak Lestari	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	450.000	12.600.000	Pasangkayu	Sulbar
26	PT Manakarra Sakti Abadi	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	250.000	7.000.000	Pasangkayu	Sulbar
27	PT Sejahtera Tani Tambak Sarjo	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	22.900	458.000	Pasangkayu	Sulbar
28	PT Pasangkayu Tambak Lestari	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	32.000	768.000	Pasangkayu	Sulbar
29	PT Randomayang Bintang Delapan	Budidaya Perikanan	-	Gubernur	36002	44.000	1.408.000	Pasangkayu	Sulbar
30	Tambak Karman Karim	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	35.000	2.548.000	Parigi Moutong	Sulteng
31	PT Esaputlii Prakarsa Utama	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	535.000	23.272.500	Parigi Moutong dan Toli-toli	Sulteng
32	PT Graha Tambak Pinotu	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	100.000	1.430.000	Parigi Moutong	Sulteng
33	PT Parigi Aquakultura Prima	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	195.000	5.304.000	Parigi Moutong	Sulteng
34	PT Udang Teluk Tomini	Budidaya Perikanan	KKPRL	Gubernur	36002	12.000	866.400	Parigi Moutong	Sulteng

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena Indikator Kinerja ini baru terdapat di Tahun 2024.

Tabel 24. Target dan capaian IKU 10 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Presentase Capaian (%)
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	1	1	100
Jumlah Kumulatif	1	1	100

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Indikator kinerja Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar baru ada pada target kinerja tahun 2024 sehingga apabila dibandingkan dengan matriks pendanaan 2020-2024 maka capaiannya adalah 100%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor penyebab keberhasilan dari pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah koordinasi yang baik dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait pendataan pemanfaatan air laut selain energi yang ada di wilayah kerjanya untuk dilakukan sosialisasi.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah dengan pelaksanaan sosialisasi secara hybrid yaitu daring dan luring. Hal ini membuat jangkauan peserta sosialisasi menjadi lebih luas dengan anggaran yang terjangkau, selain itu pelaksanaan verifikasi yang ditargetkan hanya di Sulawesi Selatan dapat direalisasikan secara lebih dengan pelaksanaan verifikasi di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

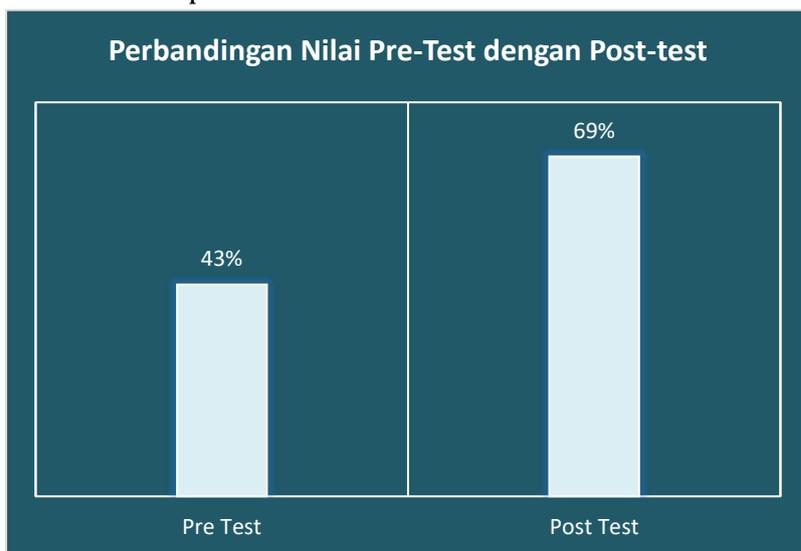


Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU ini adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan identifikasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE).

Sosialisasi Pemanfaatan ALSE dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 di Hotel Novotel Makassar. Sosialisasi ini diadakan secara hybrid (luring dan daring). Pada kegiatan sosialisasi ini melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dan Para Pelaku Usaha yang memanfaatkan air laut selain energi di wilayah kerja BPSPL Makassar

dengan narasumber dari Direktorat Jasa Kelautan dan Akademisi. Pada sosialisasi ini disampaikan beberapa materi antara lain:

- Panduan Izin Pemanfaatan ALSE oleh Bapak Muhaammad Zakin Mahasin, Direktorat Jasa Kelautan, Direkotrat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- Perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan oleh Hendra Nurcahyo, Direktorat Jasa Kelautan, Direkotrat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- Kajian Ilmiah Kebutuhan Air Bagi Tambak Sistem Intensif serta Kondisi Eksisting Tambak Intensif di Sulawesi Selatan oleh Dr. Ir. Andi Tamsil, MS. IPM – Dosen Fakultas dan Perikanan Universitas Muslim Indonesia dan Pengurus Shrimp Club Indonesia.



Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, serta untuk mengukur Tingkat pemahaman peserta sosialisasi, maka diberikan pre test dan post test.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pre-test dan post-test didapatkan peningkatan nilai pemahaman peserta sebesar 26% dari 43% menjadi 69%

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Belum terdapat rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU ini di triwulan I 2025. Hal ini dikarenakan tahun 2025 – 2029 terdapat penyusunan renstra baru dan karena adanya pemotongan anggaran untuk program prioritas sehingga sampai penyusunan laporan ini selesai belum ada kepastian terkait pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

3.1.11 IKU11 Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang adalah Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL) yang terdiri dari sosialisasi BCL dan Gerakan bersih pantai dan laut. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil merujuk pada satuan wilayah Kabupaten/Kota dan rencana pelaksanaan kegiatan BCL di BPSPL Makassar akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 25. Capaian Realisasi IKU 11

SS -10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran										
IKU - 11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kawasan)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Renstra/Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
0	0	0	0	4	4	100	0	4	4	100	

Berdasarkan tabel di atas Indikator Kinerja ini telah mencapai bahkan melebihi target yaitu dengan capaian 4 kawasan dari target 4 kawasan atau capaiannya mencapai 100%.



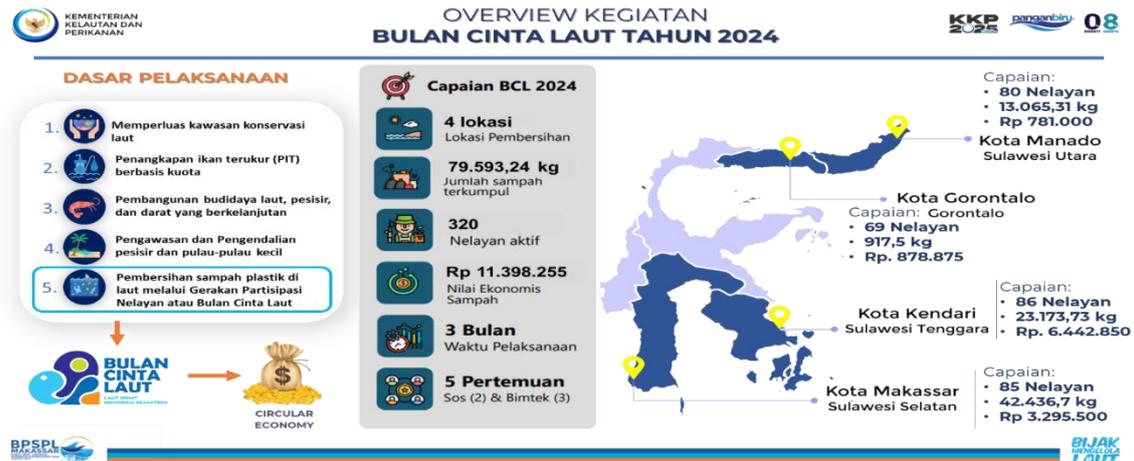
Kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah pelaksanaan Bulan Cinta Laut berupa kegiatan bersih pantai di Wilayah Kerja BPSPL Makassar. Berikut adalah infografis gambaran umum pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di BPSPL Makassar:

Sampai dengan akhir tahun 2024 telah dilaksanakan serangkaian kegiatan Gerakan Cinta Laut di empat Lokasi yaitu Sosialisasi dan Bimtek sebagai berikut:

1. Sosialisasi pada tanggal 30 April di Kota Kendari dan 2 Mei di Kota Makassar, Gorontalo, dan Manado.
2. Bimtek ke-1 pada tanggal 14 Mei di Kota Kendari dan 16 Mei di Kota Makassar, Gorontalo, dan Manado.
3. Bimtek ke-2 pada tanggal 27 Mei di Kota Kendari, Makassar, Gorontalo, dan Manado
4. Bimtek ke-3 pada tanggal 13 Juni di Kota Kendari, Gorontalo, dan Manado serta tanggal 20 Juni di Kota Makassar



Selain kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, terdapat juga kegiatan rutin seperti penimbangan dan monitoring sampah untuk mengklasifikasikan jenis sampah berdasarkan masing-masing tipikalnya. Berikut adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan Bulan Cinta Laut:



Lokasi	Sampah Terkumpul	Sampah bernilai ekonomis (Kg)	Nilai Sampah bernilai ekonomis (Kg)	Keterlibatan Masyarakat
Kota Makassar, Sulawesi Selatan	26070.7	1094	2.048.000	85
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	17174.43	4734.1	5.162.350	86
Kota Manado, Sulawesi Utara	9246.31	781	402.955	80
Kota Gorontalo, Gorontalo	917.5	638.5	878.875	69
TOTAL	53408.94	7247.6	8.499.180	320

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena IKU ini adalah Indikator Kinerja yang baru terdapat di Tahun 2024 karena pada tahun lalu IKU ini dihapus karena anggarannya diblokir seluruhnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Matriks Pendanaan 2020-2024

Indikator kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Makassar pada tahun 2024

sehingga apa bila dibandingkan dengan matriks pemdanaan 2020-20204 maka capaiannya 100%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor penyebab keberhasilan dari pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah koordinasi yang optimal dengan penyuluh, perangkat desa serta kelompok Masyarakat nelayan yang menjadi target lokasi kegiatan BCL.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemilihan lokasi kegiatan Bulan Cinta Laut di setiap provinsi adalah di dalam kota kantor masing-masing UPT yaitu Kota Makaassar, Kota Kendari, Kota Gorontalo, dan Kota Manado. Dengan lokasi yang sama tersebut, memungkinkan adanya pelaksanaan monitoring pengumpulan sampah di masing-masing lokasi dengan lebih intensif menggunakan anggaran yang lebih efisien karena pemberian uang harian adalah uang harian lokal.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini diantaranya :

1. Kegiatan identifikasi lokasi Bulan Cinta Laut yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2024 di Gorontalo, tanggal 2 April 2024 di Manado, 27-28 Maret 2024 di Takalar dan Makassar dan 20 Maret 2024 di Kendari.
2. Identifikasi dan Validasi Data Nelayan dilaksanakan tanggal 2 April 2024 di Kendari, Manado, Gorontalo dan Makassar.
3. Evaluasi dan penutupan dilaksanakan tanggal 11 Juli 2024 di Manado, Gorontalo dan Makassar, sedangkan dikendari dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2024.
4. Puncak apresiasi dilakanakan tanggal 29 Agustus 2024 di Makassar

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Belum terdapat rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU ini di Belum terdapat rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU ini di triwulan I 2025. Hal ini dikarenakan tahun 2025 – 2029 terdapat penyusunan renstra baru dan karena adanya pemotongan anggaran untuk program prioritas sehingga sampai penyusunan laporan ini selesai belum ada kepastian terkait pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

3.1.12 IKM12 Nilai Indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiscal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Formula Perhitungan:

Nilai IKPA merupakan penjumlahan hasil pembobotan masing-masing indikator:

1. revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (bobot 10%);
2. deviasi halaman III DIPA (bobot 15%);

3. penyerapan anggaran (bobot (20%);
4. belanja kontraktual (bobot 10%);
5. penyelesaian tagihan (bobot 10%);
6. pengelolaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan (bobot 10%); dan
7. capaian output (bobot 25%),
dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM.

$$\text{Nilai IKPA} = (\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi Bobot}) - \text{Dispensasi SPM}$$

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA > 70
 - Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
 - Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 26. Capaian Realisasi IKM 12

SS -11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar									
IKU - 12		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)									
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Renstra/Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
88.00	89.00	89.00	93.75	93.76	99.79	106.43	6	93.76	99.79	106.43%	

Berdasarkan tabel di atas realisasi IKPA telah melebihi target dengan capaian 99.79 atau 106.43% dari target 93.76. Capaian ini meningkat apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian ini juga di atas target yang terdapat di jangka menengah atau renstra.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Nilai IKPA BPSPL Makassar diantaranya:

1. Menunjuk penanggung jawab kegiatan yang uraian tugasnya termasuk mengawasi capaian kinerja dan anggaran sehingga terdapat mekanisme pengawasan secara berjenjang yang ditetapkan melalui SK TIM oleh Kepala BPSPL Makassar.
2. Mengelola/menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan sesuai dengan keteentuan revisi anggaran. BPSPL Makassar telah melakukan revisi halaman III DIPA pada 10 hari kerja setelah periode triwulan berakhir untuk menjaga kualitas nilai pada komponen revisi dipa. Revisi anggaran yang telah dilakukan antara lain:
 - Revisi DIPA 4 dalam rangka revisi Halaman III DIPA sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.600/BPSPL.3/RC.420/IV/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431 tanggal 3 April 2024;
 - Revisi DIPA 7 dalam rangka revisi Halaman III DIPA sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.1364/BPSPL.3/RC.420/VII/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431 tanggal 11 Juli 2024;

- Revisi DIPA 11 dalam rangka Pemuktahiran Data Petunjuk oprasional Kegiatan (POK) dan Revisi Halaman III DIPA sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.2039/BPSPL.3/RC.420/X/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431 tanggal 12 Oktober 2024;
- 3. Mendorong tim pelaksana agar tidak menunda pelaporan pertanggungjawaban kegiatan sehingga tidak menghambat tim keuangan dalam penyampaian dokumen pendukung.
- 4. Mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan input SPM.
- 5. Menginput realisasi capaian output tiap bulan secara tepat waktu pada 5 Hari kerja setelah periode bulan berakhir.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table dibawah ini dimana capaian tahun 2024 adalah yang tertinggi dengan realisasinya adalah 99.79 adapun prosentase capaiannya yang lebih kecil dibandingkan tahun 2020 dan 2021 dikarenakan target pada tahun tersebut yang lebih kecil dibandingkan dengan target 2024.



C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Target indikator kinerja Nilai Indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar pada Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 adalah sebesar 93,76, sedangkan capaian sampai dengan tahun 2024 ini adalah sebesar 99,79 sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 106,4% dari target. Kontribusi capaian tahun 2024 sejumlah 99,79 atau 106,4% dari capaian sampai dengan tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Penyebab keberhasilan pencapaian IKPA adalah koordinasi yang baik antara bagian program perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan. Sedangkan penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian IKPA adalah adanya penambahan anggaran di pertengahan tahun yang dapat menyebabkan indikator realisasi anggaran dan deviasi halaman 3 tidak maksimal.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan cara penunjukan pegawai yang bertanggungjawab dalam penginputan SPM, Operator SAKTI dan bendahara pengeluaran, serta penginputan capaian output yang tepat waktu. Serta selalu mengingatkan agar mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam pengajuan SPM maupun menyampaikan laporan. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Nilai IKPA BPSPL Makassar adalah Koordinasi Capaian Output dan entry data Tahun 2024 pada Aplikasi SAKTI dalam rangka Implementasi pelaksanaan pemuktahiran capaian output tahun 2024 ke KPPN Makassar II. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 April 2023 yang bertempat di Aula Lantai 6, Gedung Keuangan Negara II Makassar Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar. Kegiatan merupakan tindaklanjut atas perubahan mekanisme penginputan capaian output 2024. Dalam kegiatan ini disampaikan informasi terkait proses bisnis dan petunjuk teknis pengisian proyeksi/target capaian output belanja K/L pada Aplikasi SAKTI, seperti mekanisme penetapan target capaian output, perbedaan indikator kinerja capaian output sebelum dan sesudah implementasi, komponen data yang diperlukan dalam pengisian target/proyeksi capaian output dan batas-batas akhir pelaporan, praktik langsung di Aplikasi SAKTI terkait pelaporan target dan realisasi capaian output dengan menggunakan menu pada user operator komitmen

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2025 antara lain melaksanakan input realisasi capaian output setiap bulan dan melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan atau prognosa.

3.1.13 IKM13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Indikator Kinerja ini mengalami perubahan yang awalnya Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) hal tersebut sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor : 3250/SJ/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP Tahun 2024.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
- b. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
- c. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
- d. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Cara perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menggunakan aplikasi Monev Kemenkeu yang didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan 118 Laporan Kinerja Tahun 2024 Efisiensi SBK.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 27. Capaian Realisasi IKM13

SS -11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar										
IKU - 13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Renstra/Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
85	86	81	82	71	100	116.28	12.75	71	100	116.28	

Berdasarkan tabel di atas realisasi NKPA telah melebihi target dengan capaian 100 atau 116.28% dari target 71, capaian ini meningkat apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian ini juga di atas target yang terdapat di jangka menengah. Kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan kegiatan yang matang sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu dan berusaha merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana yang sudah disusun serta melakukan pengisian Capaian Output pada aplikasi SAKTI setiap bulan sesuai dengan dengan target dan waktu yang ditentukan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2020-2023 dikarenakan ada perubahan nomenklatur dan indikator pada tahun 2024 yang semula pada tahun 2020-2023 indikator yang diukur ialah Nilai Kinerja Anggaran akan tetapi pada tahun 2024 ialah Nilai kinerja perencanaan anggaran hal tersebut juga yang membuat target 2024 lebih rendah apabila dibandingkan target tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 28. Target dan Capaian IKM 13 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Presentase Capaian (%)
2020	85	97,92	115,20%
2021	86	87,93	102,24%
2022	81	93,57	115,52%
2023	82	88,69	108,16%
2024	71	100	140,85%

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan target Matrik Pendanaan Tahun 2020 – 2024 yang ada di dalam renstra dikarenakan indikator pada IKU ini baru ada pada tahun anggaran 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Penyebab keberhasilan pencapaian NKA adalah koordinasi yang baik antara bagian program perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan. Sedangkan penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian IKPA adalah adanya penambahan anggaran di pertengahan tahun yang dapat menyebabkan indikator realisasi anggaran dan deviasi halaman 3 tidak maksimal. Menindaklanjuti Nota Dinas kami Nomor 1945/ SJ.2/TU.210/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 hal Perkembangan Capaian Nilai Kinerja Anggaran TA. 2024 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan hasil FGD Implementasi Pemantauan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran TA. 2024 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada Kamis, 5 September 2024 di Grand Mercure Harmoni – Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Perlu menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atau biasa disebut Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai Indikator Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya dalam efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai indikator kinerja ini adalah dengan menunjuk 1 orang operator untuk menginput capaian output pada aplikasi Smart DJA. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat **dikatakan 0 Rupiah**.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKM8 ialah melakukan koordinasi yang baik antara tim keuangan dan tim perencanaan serta tim pelaksanaan kegiatan melakukan kegiatan dan pencairan keuangan sesuai dengan rencana yang disusun dan ketentuan yang ada.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung capaian IKM 13 di TW I 2025 adalah melaksanakan penyerapan anggaran yang efisien dan konsisten terhadap perencanaan serta melaksanakan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI dengan tepat waktu.

3.1.14 IKM14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Keterangan Ukuran:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,50;

4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14.
5. Target Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup KKP Tahun 2024 adalah 75.
Jika pada tahun anggaran tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

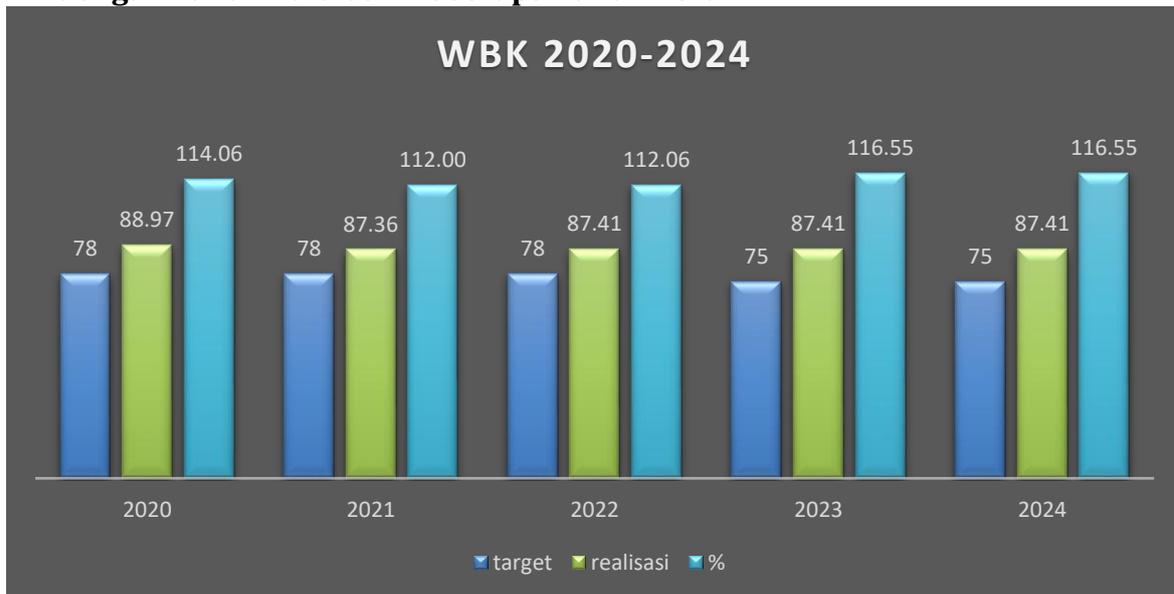
Tabel 29. Capaian Realisasi IKM 14

SS -11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar										
IKU - 14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Makassar (Nilai)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
88.97	87.36	87.41	87.41	75	87.41	116.55	0	75	87.41	116.55%	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU ini telah melebihi target dengan capaian 87.41 atau 116.55% dari target 75. Nilai ini adalah hasil penilai atau pemantauan Tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat pemantauan yang dilakukan. Capaian ini di atas target yang terdapat di jangka menengah atau renstra, adapun kegiatan yang telah. Selain itu Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan kegiatan ini adalah:

- Membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI sesuai dengan Surat Tugas Kepala BPSPL Makassar Nomor: B.120/BPSPL.3/OT.710/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar,
- Meningkatkan pemahaman pegawai tentang ZI, WBK, dan WBBM dengan melakukan sosialisasi zona integritas pada Rabu, 21 Februari 2024 di ruang Rapat Beringharjo Hotel Ibis Style, Jl. Jl. Dagen No. 109, Kota Yogyakarta yang dihadiri oleh seluruh pegawai BPSPL Makassar.
- Melakukan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang program ZI Menggunakan media komunikasi (banner, poster, video, media sosial);

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir



Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik diatas, Dimana capaian tertinggi terdapat pada tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021, adanya penurunan capaian 2021 bila dibandingkan capaian tahun 2020 karena sistem penilanan WBK tahun 2021 lebih kompleks dibandingkan tahun 20220.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Target indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar pada Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 adalah sebesar 78, sedangkan capaian sampai dengan tahun 2024 ini adalah sebesar 87,41 sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 112% dari target. Kontribusi capaian tahun 2024 sebesar 87,41 atau 112% dari capaian sampai dengan tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini salah satunya adalah karena adanya komitmen pimpinan yang selalu mengingatkan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan juga keterlibatan semua pegawai BPSPL Makassar.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian Indikator Kinerja ini adalah pelaksanaan yang melibatkan seluruh pegawai termasuk yang ada di wilker cukup berkoordinasi melalui online sehingga tidak membutuhkan realisasi anggaran yang signifikan.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah pengumpulan dokumen dan pelaksanaan kegiatan tiap pokja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kegiatan pemenuhan dokumen yang melibatkan seluruh pegawai akan membuat implementasi nilai WBK menjadi menyeluruh. Hal tersebut dapat meningkatkan capaian nilai untuk IKU ini apabila dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal maupun Menpan RB.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan I 2025 adalah pemenuhan dokumen pendukung WBK untuk persiapan pemantauan dan evaluasi.

3.1.15 IKM15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan

- d. Disiplin.
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	0

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91-keatas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman

disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Keterangan Nilai SKP	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 - a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsionak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.
7. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
 - a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
8. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{ Lev } 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPL\text{ Lev } 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev } 1 + \text{Rerata Nilai IPL\text{ Lev } 2}$$

9. Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat Profesional / Sangat Tinggi
81-90	Cenderung Profesional / Tinggi

71-80	Rentan Tidak Professional / Sedang
61-70	Cenderung Tidak Profesional / Rendah
≤60	Sangat Tidak Profesional / Sangat Rendah

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 30. Capaian Realisasi IKM 15

SS -11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar										
IKU - 15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
72	73	83	85	88	90.78	103.16	-0.13	88	90.78	103.16	

Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU ini telah melebihi target dengan capaian 90.78 atau 103.16% dari target 88, capaian ini juga melebihi target yang terdapat di jangka menengah, Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Pegawai BPSPL Makassar telah mengikuti pendidikan formal (S1, S2, S3) yang relevan dengan tugas dan fungsi kerja serta jabatannya.
2. Pegawai BPSPL Telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi sesuai bidang keahlian, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun lembaga profesional seperti Bimtek Selam dan juga Bimtek GIS seta Bimtek di bidang Pengadaan barang dan jasa serta administrasi lainnya.
3. Mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan workshop yang meningkatkan keterampilan spesifik ASN

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir



Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini, Dimana nilai capaian tertinggi adalah capaian tahun 2023 dengan nilai 90.89, sedangkan capaian terendah adalah pada tahun 2020 dengan nilai 84.2. Selama lima tahun terakhir hamper selalu mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2023 mengalami penurunan capaian apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 hal tersebut dikarenakan adanya pegawai

yang baru pindah dari pemerintah daerah ke BPSPL Makassar di akhir tahun 2024 dan pegawai tersebut mendapatkan nilai kurang untuk IP ASN nya karena belum ada pelatihan atau Diklat yang diikuti di tahun 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Target indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar pada Renstra / Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 adalah sebesar 88, sedangkan capaian sampai dengan tahun 2024 ini adalah sebesar 90,89 sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 103,28% dari target. Kontribusi capaian tahun 2024 senilai 90,78 atau 103,15% dari capaian sampai dengan tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam peningkatan kompetensi SDM BPSPL Makassar pada Tahun 2024 dimana ada beberapa workshop yang diikuti oleh staf BPSPL Makassar dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya:

1. Keterbukaan informasi mengenai peluang untuk mengikuti pelatihan bagi seluruh BPSPL Makassar
2. Peran pimpinan yang selalu mendorong agar semua pegawai mengikuti semua peluang peningkatan kompetensi bagi yang memenuhi kriteria

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya terutama sumberdaya anggaran yang sangat minim dalam peningkatan kompetensi salah satunya karena banyak Pelatihan, Bimtek maupun seminar yang dilakukan secara online, sehingga sangat memudahkan bagi pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa harus menggunakan anggaran kantor atau 0 rupiah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKM10 pada Tahun 2024 diantaranya adalah dengan mengikutsertakan pegawai BPSPL Makassar dalam berbagai Pelatihan, Bimtek maupun Workshop diantaranya yang diselenggarakan oleh BPSPL Makassar maupun pihak lain.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM15 pada Triwulan I 2025 adalah monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja Pegawai BPSPL Makassar dan menginstruksikan agar pegawai yang belum mengunggah sertifikat dan bukti kepelatihannya agar segera diunggah ke myasn.

3.1.16 IKM16 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%),
4. Evaluasi kinerja (25%)

Teknik menghitung pemenuhan IKM ini adalah sebagai berikut Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 31. Capaian Realisasi IKM 16

SS -11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar										
IKU - 16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
90	91	92	75	81	88.6	109.38	5.26	92	88,6	96,30%	



Berdasarkan tabel di atas, realisasi IKU ini telah melebihi target dengan capaian 88.6 atau 109.38% dari target 81. Evaluasi penilaian AKIP di lingkup DJ PRL telah dilakukan pada Bulan Juni. Penilaian ini dilakukan secara mandiri oleh Tim Money Seditjen dan didampingi oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan KKP. Namun belum terdapat hasil penilaian AKIP dan saat ini masih menunggu perbaikan atau pemenuhan dokumen rekomendasi hasil penilaian. Setelah dilakukan evaluasi dilakukan juga pleno untuk penetapan evaluasi hasil penilaian yang telah dilakukan. Penilaian sementara AKIP BPSPL Makassar adalah 81.75 dengan predikat baik.

Sampai dengan tahun 2024 telah dilaksanakan Pleno Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL. Berdasarkan hasil pleno, nilai PM SAKIP BPSPL Makassar meningkat menjadi 88.3 peningkatan ini karena terdapat perbaikan berupa pemenuhan dokumen

perencanaan kinerja dalam lima tahun terakhir dan inovasi dashboard kinerja dan keuangan yaitu Mantap Puang

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 32. Target dan Capaian Realisasi IKM 16 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Presentase Capaian (%)
2020	90	97,03	107,81%
2021	91	98,33	108,05%
2022	92	99,07	107,68%
2023	75	84,2	112,27%
2024	81	88,6	109,38%

Realisasi IKM ini apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami kenaikan dimana di tahun 2023 realisasi sebesar 84.2 dan di tahun 2024 adalah 88.6, namun secara capaian persentase tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan target.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Realisasi kinerja IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat di renstra. Karena IKU ini baru terdapat di tahun 2023.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang menyebabkan keberhasilan IKM ini adalah kompetensi tim pengelola kinerja yang baik, adanya pengawasan dan kontrol yang berlapis baik dari anggota tim kinerja yang lain maupun pimpinan, dan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan memenuhi target.

Sedangkan faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam capaian IKM ini adalah kurangnya pengawasan baik dari anggota tim yang lain maupun pimpinan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum ada efisiensi penggunaan sumber daya sampai dengan tahun 2024 terkait pencapaian indikator kinerja ini.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKM ini diantaranya :

1. Penunjukan Tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Makassar
2. Membuat mekanisme pengumpulan pelaporan kinerja
3. Melakukan rapat monev kinerja setiap bulan
4. Aplikasi kontrol atau pengawasan yang bertingkat dari level sesama anggota tim kinerja sampai dengan level pimpinan.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM16 pada Triwulan I tahun 2025 adalah pemenuhan dokumen kinerja yang rutin dilakukan seperti evaluasi rencana aksi, pengukuran kinerja, dan penyusunan laporan kinerja.

3.1.17 IKM17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Teknik menghitung IKM17 ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 33. Capaian Realisasi IKM 17

SS -11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar									
	IKU - 17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)									
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%
4	0	4	4	4	4	100	0	4	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IKM17 memiliki target satu laporan di tahun 2024. Target IKM ini adalah target triwulanan sehingga pada akhir tahun total capaian adalah empat dokumen. Kegiatan yang mendukung dalam dalam pelaksanaan antara lain:

- Penetapan Tim SPIP pada BPSPL Makassar melalui surat tugas Nomor: B.004/BPSPL.3/TU.110/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah lingkup BPSPL Makassar;
- Melakukan penyusunan identifikasi dan penilaian resiko terhadap seluruh kegiatan di lingkup BPSPL Makassar Tahun 2024;
- Membuat matrik manajemen resiko pada seluruh kegiatan yang beresiko tinggi di lingkup BPSPL Makassar;
- Membuat pengendalian rutin dan berkala atas seluruh proses bisnis yang telah ditetapkan pada kegiatan yang beresiko tinggi;
- Melakukan evaluasi secara berkala dengan tim SPIP lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut secara daring;
- Melaporkan laporan SPIP secara bulanan dan triwulan kepada Sesditjen PKRL:

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja IKM17 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sama dimana realisasinya adalah empat dokumen pada akhir tahun 2024.

Tabel 34. Capaian Realisasi IKM 17 Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Presentase Capaian (%)
2020	4	4	100,00%
2021	0	0	0,00%
2022	4	4	100,00%
2023	4	4	100,00%
2024	4	4	100,00%

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Target indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar pada Matrik Pendanaan Tahun 2020-2024 adalah sebesar 4 dokumen, sedangkan capaian sampai dengan tahun 2024 ini adalah sebesar 4 dokumen sehingga apabila dibandingkan maka tercapai 100% dari target. Kontribusi capaian tahun 2024 sejumlah 4 Dokumen atau 100% dari capaian sampai dengan tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Penyebab keberhasilan IKM17 adalah koordinasi yang baik dari semua komponen yang terlibat dan komitmen dari anggota tim SPIP yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan laporan sesuai waktu yang sudah ditetapkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya dalam efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai indikator kinerja ini adalah dengan komitmen dan kerja sama yang baik dari tim SPIP yang sudah ditetapkan. Tidak ada efisiensi sumber daya anggaran karena tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung IK ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IKM17 adalah dengan melaporkan setiap progress dan capaian kegiatan serta mengidentifikasi resiko dari masing-masing kegiatan tersebut.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung IKM ini pada Triwulan I 2025 adalah penyusunan laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025

3.1.18 IKM18 Presentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Penghitungan indikator ini berasal dari penilaian 1 komponen, yaitu Komponen Keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah terdapat 1 komponen yang dijadikan tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan level II Lingkup Ditjen PKRL dengan pembobotan dimaksud sebagai berikut :

- a. Konten dokumentasi kegiatan rapat/ seminar/ workshop/ diseminasi dengan memenuhi unsur 5W1H mendapatkan **poin 0,5**;
- b. Konten berupa infografis dengan **poin 1**;
- c. Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan **poin 3**

Cara Mengukur:

- a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (portal *Collaboration Office*)
- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
 - ✓ Keaktifan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan;
 - ✓ Pengukuran level II dihitung dari keaktifan Eselon II.
 - ✓ Setditjen PRL menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon II.
- c. Capaian dihitung dengan rumus:

Keaktifan :

$$\frac{\text{"Jumlah Poin Keaktifan Pejabat"}}{\text{"Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat"}} \times 100\%$$

- d. Nilai MP Unit Level II:

MP Unit Level II = Nilai Keaktifan

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 35. Capaian Realisasi IKM 18

SS -11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar										
IKU - 18	Presentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
100	100	100	100	94	133.33	141.84 atau 120 Kinerjajaku	33.33	94	133.33	141.84%	

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 133.33 atau capaian senilai 141.84% atau capaian maksimal kinerjajaku 120%, capaian tersebut berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor : B.124/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2024.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian IKM18 selalu mencapai nilai 100 pada setiap periodenya dan pada periode ini mencapai 141.84%, capaian tahunan ini yang lebih dari 100% dikarenakan adanya perbedaan metode perhitungan dengan tahun-tahun sebelumnya Dimana metode perhitungan sebelum tahun 2024 tidak dimungkinkan satker mendapatkan nilai lebih dari 100%, selain itu capaian tersebut juga karena adanya komitmen pimpinan untuk selalu mengupload setiap kegiatan di laman <http://www.portal.kkp.go.id/>.

Tabel 36. Capaian Realisasi IKM 18 tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Presentase Capaian (%)
2020	82	100	121,95%
2021	84	100	119,05%
2022	86	100	116,28%
2023	92	100	108,70%
2024	94	100	106,38%

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Realisasi target IKM18 sudah mencapai 133.3, capaian ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi sudah mencapai 148% dari target 90.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Adanya komitmen dari pimpinan BPSPL Makassar untuk mengunggah aktivitas di laman <http://www.portal.kkp.go.id/> setiap ada kegiatan, hal tersebutlah penyebab keberhasilan tercapainya IKM ini, komitmen ini dibuktikan dengan selalu terpenuhinya nilai maksimal 100 pada setiap periodenya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efiseiensi sumber daya yang dilakukan karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhassilan pencapaian IK18 ini adalah mengunggah kegiatan atau konten di laman <http://www.portal.kkp.go.id/> secara berkala dan komitmen pimpinan dalam mengikuti dan melporkan setiap kegiatan yng diikuti.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I 2025 adalah mengunggah kegiatan pada *collaboration office* oleh Kepala Balai BPSPL Makassar

3.1.19 IKM19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS).

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BPSPL Makassar dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Makassar dikali 100.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti DJPKRL}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada DJPKRL}} \times 100$$

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 37. Capaian Realisasi IKM 19

SS -11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar										
	IKU - 19 LPersentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
0	65	70	75	80	100	125 120 (kinerjaku)	0	80	100	125%	

Dari tabel di atas dilihat bahwa capaian indikator IKM19 Tahun 2024 adalah 120% dengan realisasi 100 dari target 80, capaian ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sama dengan capaian maksimal atau nilai 100. Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

- Audit Kinerja TA 2023 - 2024 pada BPSPL Makassar tanggal 2 April 2024,
- Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar pada tanggal 27 Mei 2024,
- Pemantauan Kegiatan PHLN Ocean for Prosperity – LAUTRA dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024 di BPSPL Makassar tanggal 23 November 2024;

Dari seluruh evaluasi, pemantauan dan audit yang telah dilaksanakan di sampai tahun 2024 terdapat beberapa catatan perbaikan dan rekomendasi yang harus dipenuhi untuk ditindaklanjuti. Pada tahun 2024 BPSPL Makassar telah melakukan pemenuhan tindak lanjut untuk seluruh rekomendasi pada aplikasi SIDAK (sidak.kkp.go.id) dan Berdasarkan surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan kelautan dan Ruang Laut nomor B.94/DJPKRL.1/HP.140/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Lingkup Ditjen PKRL” Tahun 2024 BPSPL Memperoleh Nilai Capaian Sebesar 100

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Tahun 2024 sama dengan capaian tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yang mencapai 100 atau 125% dari target di Perjanjian Kinerja, perbedaan persentase capaian dikarenakan adanya perbedaan target pada tiap tahunnya.

Tabel 38. Capaian Realisasi IKM 19 tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Presentase Capaian (%)
2020	0	0	0,00%
2021	65	100	153,85%
2022	70	100	142,86%
2023	75	100	133,33%
2024	80	100	125,00%

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Capaian Tahun 2024 sebesar 100 sudah melebihi target Tahun 2024. Capaian tersebut 120% dari target Matrik Pendanaan Tahun 2020 – 2024 yang terdapat dalam renstra dengan target 80.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam pencapaian target kegiatan yang mendukung IKM19 dikarenakan arahan pimpinan yang jelas tentang penyelesaian rekomendasi Itjen dan juga kerjasama dan koordinasi di semua staf yang bertanggungjawab dalam penyelesaian rekomendasi tersebut.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penyelesaian rekomendasi itjen tersebut tidak menggunakan anggaran sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian progress IKM19 pada triwulan III Tahun 2024 adalah dengan pemenuhan tindak lanjut di aplikasi SIDAK. Terdapat dua rekomendasi di aplikasi SIDAK yang telah dipenuhi pada triwulan II. Rekomendasi ini didapat dari pelaksanaan audit pelayanan publik oleh Inspektorat Jenderal I. Keberhasilan pencapaian IKM ini adalah hasil dari koordinasi yang baik antara tim teknis yaitu pelayanan publik dan admin aplikasi SIDAK dengan arahan pimpinan.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM19 pada Triwulan I tahun 2025 adalah pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan audit kinerja dari inspektorat jenderal.

3.1.20 IKM20 Presentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Makassar Tahun 2023.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Makassar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 39. Capaian Realisasi IKM 20

SS -11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar										
IKU - 20	Presentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
100	100	100	100	100	100	100%	0	100	100	100%	

Berdasarkan table di atas, target indikator kinerja ini sudah tercapai dengan capaian 100 dari target 100. Rincian kegiatan yang pada tahun 2024 pada satker BPSPL Makassar tidak terdapat kegiatan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan tetapi satker BPSPL Makassar melakukan pemenuhan data dukung dan juga dokumen atas permintaan oleh sesditjen PKRL yang sedang dilakukan Audit dari BPK. Adapun dokumen atau data dukung yang dilengkapi berupa SPJ setiap kegiatan tahun 2024 dan juga pemenuhan dokumen BMN pada satker BPSPL Makassar.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 40. Capaian Realisasi IKM 20 tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Presentase Capaian (%)
2020	100	100	100,00%
2021	100	100	100,00%
2022	100	100	100,00%
2023	100	100	100,00%
2024	100	100	100,00%

Realisasi IKU ini sama apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir yaitu 100%, itu artinya BPSPL Makassar selalu dapat menyelesaikan setiap rekomendasi dari audit Inspekroat yang dilaksanakan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Realisasi kinerja indikator ini apabila dibandingkan dengan target yang ada di Matriks pendanaan 2020-2024 adalah sudah tercapai 100%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Kesigapan BPSPL Makassar dalam menyelesaikan temuan dari BPK adalah penyebab keberhasilan kenapa IK ini dapat terpenuhi targetnya. tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 target Iku ini adalah 100 telah tercapai yakni 100 atau 100%.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang dilakukan untuk menunjang pencapaian I206 dapat meliputi:

1. Untuk meminimalisir temuan BPK terhadap laporan keuangan BPSPL Makassar maka sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu dibuat dokumen manajemen resiko.
2. Membuat mekanisme (SOP) pengajuan UP/GUP dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan.

H. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Tidak ada kegiatan khusus yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM20 pada Triwulan I 2025, karena IKM ini termasuk bersifat isidentil yang tidak bisa direncanakan atau ditetapkan periodenya karena menunggu saat ada audit dari BPK.

3.1.21 IKM21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/ strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan

dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.

2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti evaluasi yang telah diperoleh.
4. *Penilaian* efektivitas

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan focus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK.

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Inspektorat Jenderal (sesuai dengan jenis kegiatannya) dan/atau Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 41. Capaian Realisasi IKM 21

SS -11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar									
IKU - 21		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)									
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
0	100	90	100	80	100	125 120 (kinerjaku)	0	80	100	125%	

Berdasarkan tabel di atas capaian IKU ini telah mencapai bahkan melebihi target dengan realisasi 100 dari target 80, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK untuk kelompok yang menerima bantuan tahun 2023. Kelompok yang menerima bantuan KOMPAK pada tahun 2023 adalah Kelompok Laut Biru di

Kabupaten Palopo, Kelompok Lawarani di Kabupaten Polewali Mandar, dan Kelompok Orca di Gorontalo. Ketiga kelompok di atas sudah dilakukan Monev di triwulan I tahun 2024 dan akan Kembali dievaluasi pada triwulan III atau IV.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKM ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table 42 dibawah ini Dimana dalam table tersebut dapat dilihat bahwa capaian IKM ini hamper selalu 100% kecuali pada tahun 2022 yang capaiannya hanya 90% hal tersebut dikarenakan ada 1 kelompok penerima bantuan ketika dilakukan penilaian ada barang bantuannya yang rusak yaitu kamera underwater, hal tersebutlah yang membuat nilainya tidak bisa maksimal.

Tabel 42. Capaian Realisasi IKU 20 tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Presentase Capaian (%)
2020	0	0	0.00%
2021	72.5	100	137.93%
2022	75	90	120.00%
2023	77.5	100	129.03%
2024	80	100	125.00%
Jumlah Kumulatif			

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat di renstra karena IKU ini baru terdapat di tahun 2022.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor keberhasilan IKM ini didukung oleh komunikasi yang baik antara BPSPL Makassar dan kelompok penerima bantuan kompak. Sehingga dengan komunikasi yang baik ini penyampaian laporan menjadi lebih lancar dan pemanfaatan bantuan bisa lebih optimal karena kelompok dapat dibimbing apabila tidak mengerti penggunaan barang bantuan yang telah disalurkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggabungkan kegiatan ini dengan pelaksanaan Monev Kompak sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang IKM ini adalah 0 rupiah karena anggaran sudah terdapat di kegiatan Monev bantuan Kompak.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKM ini komunikasi yang baik antara Tim BPSPL Makassar dengan Penerima Bantuan KOMPAK serta kelompok melakukan pelaporan secara berkala kepada Tim BPSPL makassar sehingga memudahkan dalam melakukan monitoring.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Belum terdapat rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung IKU ini di triwulan I 2025. Hal ini dikarenakan tahun 2025 – 2029 terdapat penyusunan renstra baru dan belum terdapat Perjanjian Kinerja yang berisi Indikator Kinerja di level II yang disusun dan ditetapkan. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian apakah indikator kinerja ini masih akan ada di tahun 2025 atau tidak.

3.1.22 IKM22 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Bpspl Makassar (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 - 100
A	Memuaskan	>80 - 90
BB	Sangat Baik	>70 - 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel 43. Capaian Realisasi IKM 22

SS -11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup BPSPL Makassar										
IKU - 22	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Bpspl Makassar (Nilai)										
Capaian tahun sebelumnya				Tahun 2024				Matrik pendanaan 2020-2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi Thdp PK	Kenaikan Thdp 2023 %	Target s.d 2024	Capian s.d 2024	%	
0	0	0	0	65	80.85	124.38 120 (kinerjaku)	-	65	80,85	124%	

Capaian indikator kinerja manajerial ini apabila dilihat pada tabel diatas adalah 80.85 dari target 65 atau capaiannya adalah 124.38% atau 120% sesuai aplikasi kinerjaku, capaian tersebut berdasarkan pengawasan internal yang dilakukan oleh Setditjen PKRL, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai capaian IKM ini adalah dengan memenuhi kriteria penilaian yang sudah ditentukan baik dokumen maupun sarana dan prasarana.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKM ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena IKM ini baru ada pada target kinerja BPSPL Makassar pada tahun 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Matrik Pendanaan Tahun 2020 - 2024

Capaian IKM ini apabila dibandingkan dengan matriks pendanaan 2020-2024 adalah 124.38%, hal tersebut karena IKM inibaru ada pada target kinerja BPSPL Makasar tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor keberhasilan IKM ini didukung oleh personil yang bersedia dan bertanggung jawab mengerjakan kearsipan. Sedangkan penurunan kinerja atau faktor yang menyebabkan capaian kinerja ini tidak optimal adalah tidak adanya jabatan arsiparis di BPSPL Makassar. Ketiadaan jabatan arsiparis menyebabkan kurangnya nilai pengawasan kearsipan karena berpengaruh langsung berdasarkan juknis atau



LKR penilaian arsip.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum ada efisiensi penggunaan sumber daya sampai dengan akhir tahun 2024 terkait pencapaian indikator kinerja ini.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Salah satu hal yang membuat nilai capaian IKM ini belum maksimal adalah karena tidak adanya pengelola arsip atau jabatan arsiparis di BPSPL Makassar.

G. Rencana Aksi Triwulan I 2025

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan I 2025 adalah kegiatan pengarsipan dokumen secara berkala.

3.2.1 Monitoring dan Patroli di Kawasan Konservasi Daerah

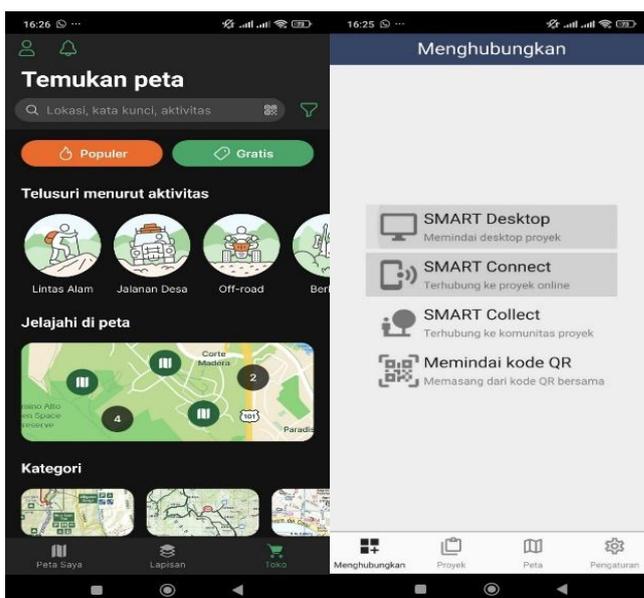
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar melalui program LAUTRA akan melakukan monitoring kesesuaian zonasi di kawasan konservasi perairan daerah, termasuk Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo dan Teluk Moramo. Upaya ini bertujuan untuk menurunkan ancaman, meningkatkan kepatuhan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dalam teknis pelaksanaan monitoring dan pengawasan kesesuaian zonasi di kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar mulai dari prosedur teknis, mekanisme, dan sistem Monitoring kesesuaian zonasi, yaitu

1. Prosedur teknis Monitoring kesesuaian zonasi :
 - Pengawas dilengkapi dengan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang;
 - Pengawas wajib mengenakan seragam
 - Monitoring kesesuaian zonasi sebaiknya dilengkapi beberapa form Monitoring kesesuaian zonasi yang terkait dengan Monitoring kesesuaian zonasi kawasan konservasi.
2. Mekanisme Monitoring Kesesuaian Zonasi :

Selain GPS yang digunakan untuk merekam data jalur pemantauan, serta form monitoring yang digunakan untuk mencatat hasil temuan pemantauan, yang tidak kalah penting tim juga menggunakan aplikasi Smart Patrol, sebuah aplikasi berbasis android yang dimanfaatkan untuk melihat posisi secara real-time terhadap zonasi kawasan. Sebelumnya, tim telah membuat sebuah file peta bergeoreferensi berformat pdf. Peta pdf tersebut kemudian dimasukkan kedalam aplikasi Smart Patrol . Aplikasi akan secara otomatis membaca posisi pengguna, yang kemudian ditampilkan dalam peta pdf yang telah diunggah. Keunggulan dari aplikasi ini adalah tetap dapat memberitahu posisi pengguna dan menampilkan di peta meskipun pengguna tidak memiliki jaringan sinyal. Dengan demikian, karena posisi ditampilkan secara real time, pengguna tidak terkendala untuk melihat di zona mana pengguna berada, apakah Zona Pemanfaatan Terbatas, Zona Lain, maupun Zona Inti.

Selain aplikasi Avenza, Tim juga menggunakan Aplikasi Pengenalan Aplikasi SMART(Spatial Monitoring and Reporting Tool) PATROL, SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) merupakan salah satu perangkat untuk merencanakan, mendokumentasikan, menganalisis, melaporkan dan mengelola data keanekaragaman hayati, patroli dan tindakan-tindakan intervensi manajemen di tingkat tapak yang penerapannya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.



A. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan patroli (surveillance) di Kawasan Konservasi Daerah di Perairan Teluk Tomini Gorontalo dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu Patroli I selama 2 (Dua) hari pada tanggal 02-03 Oktober 2024 dan Patroli ke II selama 1 (Satu) Hari yakni pada tanggal 06 November 2024. Kegiatan patroli (surveillance) di Kawasan Konservasi Daerah di Perairan Teluk Moramo dan Pulau-Pulau Kecil Sekitarnya Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2 kali yakni pada Patroli Gabungan I tanggal 2 – 4 Oktober 2024 dan Patroli Gabung II pada tanggal 6 – 8 November 2024.

B. Hasil Kegiatan

Kegiatan Patroli Gabungan di Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo adalah sebagai berikut:



1. Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pemanfaatan Kawasan Konservasi khususnya di Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas yaitu :

a. Patroli I :

Terdapat nelayan yang memasuki dan beraktivitas di zona inti. Meskipun nelayan tersebut meninggalkan lokasi sebelum dilakukan penindakan langsung, hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap larangan di zona inti. Ditemukan kegiatan reklamasi di Desa Botubarani yang dilakukan oleh pelaku usaha wisata di zona pemanfaatan terbatas sub-zona perikanan tangkap, yang berpotensi melanggar aturan.

b. Patroli II

Terdapat nelayan yang ditemukan beraktivitas di zona inti di Perairan Biluhu Timur, namun mereka telah diberikan pembinaan langsung di Lokasi.

2. Tidak ditemukan pelanggaran destructive fishing maupun illegal fishing dalam kedua patrol.
3. Sebagian besar masyarakat telah menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap aturan zonasi konservasi, namun masih terdapat beberapa pelanggaran, terutama aktivitas nelayan di zona inti dan pemanfaatan ruang laut di zona terbatas.
4. Pengenalan Aplikasi Smart Patrol efektif memantau aktivitas di kawasan konservasi, meningkatkan efisiensi patroli, dan mendukung pelaporan real-time. Data ekspor aplikasi ini memberikan gambaran kepatuhan masyarakat, jarak tempuh patroli, dan kondisi lapangan untuk evaluasi serta perbaikan kebijakan.

Kegiatan Patroli Gabungan di Kawasan Konservasi Teluk Moramo adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pelanggaran dalam ketentuan Pemanfaatan Kawasan Konservasi pada Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas yaitu :
 - a. Patroli I :

Terdapat 12 bagan perahu >10 GT : 2 melakukan penangkapan ikan di Zona Inti dan 10 di zona pemanfaatan terbatas. Terdapat 7 unit kapal purse seine >10GT : 1 berlabuh di zona inti dan 6 di zona pemanfaatan terbatas dan melakukan penangkapan ikan pada malam hari. Terdapat 1 unit *Tugboat* yang lego jangkar di zona pemanfaatan terbatas

b. Patroli II

Terdapat 3 bagan perahu >10 GT yang berlabuh dan menangkap ikan di zona pemanfaatan terbatas;

2. Sebagian besar Bagan perahu yang beroperasi tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan dan beberapa izin tidak berlaku.
3. Pengenalan dan penginstalan aplikasi Avenza Maps kepada Nelayan pemilik kapal sebagai acuan dalam kegiatan penangkapan ikan dan melakukan kegiatan di luar KKD Teluk Moramo

3.2.2 Monitoring Biofisik dan Sosial Ekonomi di Kawasan Konservasi Daerah

Kegiatan monitoring Biofisik dan Sosial Ekonomi dimaksudkan untuk melakukan pemantauan dan pengambilan data aspek biofisik dan sosial ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo dan Teluk Moramo di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sasaran kegiatan ini adalah melakukan pengumpulan data aspek biofisik yang terdiri dari terumbu karang, ikan karang, megabentos, lamun, mangrove, biota dilindungi bambu laut, padang lamun, mangrove dan kondisi perairan, serta data aspek sosial ekonomi masyarakat di kawasan konservasi daerah Teluk Moramo Provinsi Sulawesi Tenggara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas atau instansi terkait. Pertumbuhan dan penyebaran terumbu karang tergantung pada kondisi lingkungannya, sehingga perlu dilakukan pengukuran, pengamatan, dan perhitungan langsung di lapangan terhadap kondisi fisika dan kimia perairan yaitu (1) kecepatan arus (m/s); (2) suhu perairan (oC); (3) kedalaman perairan (m); (4) kecerahan perairan (m) (5) salinitas perairan (‰), dan keasaman air (pH).

A. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Monitoring Biofisik dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah Perairan Teluk Gorontalo adalah tanggal 28 Oktober hingga 2 November 2024 dan di Kawasan Konservasi Daerah Perairan Teluk Moramo dilaksanakan pada 21 – 26 Oktober 2024.

B. Hasil Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring Biofisik dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah Perairan Teluk Gorontalo sebagai berikut:

1. Pengambilan data biofisik berupa tutupan terumbu karang, ikan karang, dan megabenthos dilakukan di 6 titik pengamatan yakni di Desa Botubarani, Desa Olele, dan Desa Biluhu Timur dengan komposisi di zona inti dan diluar zona inti. Untuk pengamatan data ekosistem lamun dilakukan di Desa Biluhu Timur. Keseluruhan titik pengamatan merupakan lokasi pengamatan sebelumnya sehingga sesuai untuk dilakukan monitoring.
2. Persentase tutupan karang hidup berupa Hard Coral (HC) dari 6 titik pengamatan berkisar antara 59,40 % sampai 85 % sehingga disimpulkan kondisi terumbu karang masuk dalam kategori “Baik” hingga “Sangat Baik”. Tutupan dari subkategori Hard Coral didominasi oleh Coral Massive (CM) dengan rata-rata

tutupan 15,43%. Dibandingkan dengan data tahun 2021, proses pertumbuhan karang terjadi peningkatan positif yang signifikan.

3. Jumlah individu ikan karang dari 6 titik pengamatan ditemukan ikan target sebanyak 1.056 individu, ikan mayor sebanyak 2.965 individu, dan ikan indikator sebanyak 612 individu, dengan jumlah individu terbanyak berada di stasiun OLELE03. Hasil identifikasi tercatat 151 spesies dari 31 Famili, dengan nilai kelimpahan tertinggi berada pada famili Pomacentridae dengan nilai 130,64 individu/100m².
4. Total kelimpahan megabenthos yang ditemukan di 6 titik pengamatan yakni 226 individu / 100m², dimana kelimpahan tertinggi tercatat di Desa Olele (OLELE04) dengan nilai 49 individu / 100m². Jenis megabenthos yang ditemukan sebanyak 4 jenis yang didominasi oleh jenis Bintang laut biru dan Kima.
5. Hasil pengukuran parameter kualitas air dari keseluruhan lokasi pengamatan, tercatat rata-rata suhu sebesar 30,4 oC, rata-rata salinitas 32 ppt, rata-rata nilai pH 8,2, dan rata-rata nilai TDS sebesar 23,5 ppm dengan nilai rata-rata arus 0,06 m/detik. Rata-rata kecerahan mencapai 96,7 %.
6. Hasil pengamatan tutupan lamun di Desa Biluhu Timur diperoleh nilai rata-rata tutupan sebesar 28,03% dengan nilai standar deviasi sebesar 24,46%. Persentase dominansi lamun terbesar berasal dari jenis *Cymodocea rotundata* sebesar 23,35%, *Thalassia hemprichii* sebesar 16,86%, dan *Enhalus acoroides* sebesar 9,47%. Status kondisi padang lamun berdasarkan Kepmen Lingkungan hidup nomor 200 tahun 2024 masuk dalam kategori “rusak” / “miskin”.
7. Pengumpulan data sebaran dan kemunculan biota dilindungi sepanjang tahun 2024 terdiri dari kemunculan hiu paus sebanyak 5 individu dengan frekuensi kemunculan antara 21 hingga 31 kali per bulan. Selain itu ditemukan informasi kemunculan cetacea berupa paus pilot dan paus orca. Untuk jenis ikan napoleon tidak ditemukan selama proses pengamatan.
8. Pengamatan terkait Benda Muatan Kapal Tenggelam berupa Japanese cargo wreck telah diupayakan untuk dilakukan pengambilan fotogrametri, namun hasil yang diperoleh tidak maksimal dikarenakan faktor kurangnya cahaya pada posisi kedalaman 40 meter.
9. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir di Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Teluk Gorontalo, dari total 128 responden, komposisi jenis kelamin terdiri dari 97,6% laki-laki, dan 2,4% Perempuan. Persentase terbesar senilai 79,7% merupakan nelayan, dengan jenis alat tangkap sebagian besar pancing ulur. Nilai rata-rata pendapatan berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 1.000.000 per trip per hari.
10. Sikap masyarakat terhadap lingkungan laut sebesar 84% dalam kategori baik. Demikian juga persepsi masyarakat terhadap kesadaran akan kawasan konservasi senilai 85% setuju dan baik.
11. Pelaksanaan ekspos hasil kegiatan LAUTRA di Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Teluk Gorontalo disambut positif oleh semua pihak terkait, dan diharapkan proses koordinasi terkait pengelolaan kawasan konservasi tetap berjalan dan semakin kondusif.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Monitoring Biofisik dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah Perairan Teluk Moramo sebagai berikut:

1. Kondisi kesehatan terumbu karang di KKD Teluk Moramo tahun 2024, sesuai dengan hasil monitoring yaitu sebagai berikut:



- a. Kondisi perairan di KKD Teluk Moramo yaitu terdiri dari suhu 29,2 – 30,9 oC, Salinitas 30,6 – 34.5 ppt, pH 7,6 – 7,8, kecerahan 5 – 15, dan kecepatan arus 0,0 – 0,2 m/s, dimana secara keseluruhan masih sesuai dengan baku mutu air laut untuk mendukung pertumbuhan terumbu karang termasuk bambu laut.
 - b. Presentase tutupan terumbu karang di 10 stasiun pengamatan karang pada tahun 2024 berkisar 11,73% - 53,37% dengan kategori “Buruk/Rusak – Baik”, dengan rata-rata persentase tutupan karang hidup sebesar 32,8% dengan kategori “Sedang” yang didominasi oleh jenis karang hidup dengan tipe pertumbuhan bercabang (coral branching).
 - c. Indeks keanekaragaman (H') sebesar 1,85, indeks Keseragaman (E) 0,54, dan Indeks Dominansi (D) 0,19, dimana tingkat keanekaragaman karang dan penyebaran individu setiap life form karang serta kestabilan komunitas kategori sedang, disamping itu komunitas dalam keadaan agak seimbang dan hampir tidak ada life form karang yang mendominasi.
 - d. Status kondisi Kesehatan karang sampai dengan tahun 2024 di Teluk Moramo untuk seluruh stasiun pengamatan sebanyak 17 lokasi yaitu berkisar antara 11,73 – 56,77% dengan kategori rusak/buruk sampai dengan baik, dengan rata-rata persentase tutupan 33,2% termasuk dalam kategori sedang.
 - e. Secara umum persentase tutupan karang hidup di KKD Teluk Moramo terjadi penurunan rata-rata tutupan karang yaitu 46,3% pada tahun 2023 menjadi 33,3% pada tahun 2024.
 - f. Faktor penyebab penurunan persentase tutupan karang hidup disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yaitu penggunaan racun ikan dan bahan peledak (bom), dampak perubahan iklim yaitu naiknya suhu permukaan laut pada Januari-April, adanya populasi Bintang Bulu Seribu (*Acanthaster planci*), aktivitas dan lalu lintas kapal dengan kapasitas yang besar, dan sedimentasi/kekeruhan perairan.
2. Kondisi ikan karang di KKD Teluk Moramo tahun 2024, sesuai dengan hasil monitoring yaitu sebagai berikut:
 - a. Tingkat kepadatan ikan karang pada 10 lokasi yaitu 0,8 – 2,9 ind/m² atau 269 – 1.020 ind/350m² dengan rata-rata 2 ind/m² (650 ind/350m²);
 - b. Terdapat 26 family, 68 genus, dan 158 jenis ikan yang terdiri dari 76 jenis kelompok ikan target, 11 jenis kelompok ikan indicator, dan 71 jenis kelompok major.
 - c. Nilai rata-rata kelimpahan ikan karang berdasarkan kelompok ikan menunjukkan bahwa kelompok ikan mayor memiliki kelimpahan terbesar dibanding kelompok lainnya yaitu 12.789 ind/ha atau 448 ind/350m², ikan target sebesar 5.323 ind/ha atau 186 ind/350m² dan ikan indikator sebesar 446 ind/ha atau 16 ind/350m².
 - d. Rendahnya kelimpahan ikan karang yang menjadi target ekonomis penting

- disebabkan oleh tingginya tingkat eksploitasi yang merupakan target nelayan, beberapa menggunakan alat tangkap yang kurang selektif serta masih adanya penggunaan bom untuk menangkap ikan karang.
- e. Biomassa ikan karang pada 10 lokasi pengamatan yaitu berkisar antara sebesar 296,2 kg/ha – 767,7 kg/ha dengan rata-rata 492,44 kg/ha dimana masih memiliki tingkat keberlanjutan yang maksimum.
 - f. Indeks keanekaragaman (H') ikan karang sebesar 3,94, indeks Keseragaman (E) 0,54, dan Indeks Dominansi (D) 0,04, dimana ikan karang di KKD Teluk Moramo memiliki keanekaragaman dan kestabilan komunitas yang tinggi serta komunitas dalam keadaan agak seimbang dan tidak ada jenis ikan yang mendominasi.
 - g. Status kelimpahan ikan karang pada 17 stasiun pengamatan yaitu 259 – 1.103 ind/350 m² dengan rata-rata 691 ind/350m² atau 19.741 ind/ha, sedangkan biomassa ikan karang yaitu 134 – 768 kg/ha dengan rata-rata 443,6 kg/ha;
 - h. Kondisi ikan karang di KKD Teluk Moramo dari tahun 2018 sampai dengan 2024 yaitu terjadi penurunan tingkat kelimpahan ikan karang yang signifikan yaitu dari 1.810 ind/350m² menjadi 691 ind/350m² dan penurunan biomassa dari 1.191,1 kg/ha menjadi 443,6 kg/ha.
3. Kondisi organisme megabenthos di KKD Teluk Moramo tahun 2024, sesuai dengan hasil monitoring yaitu sebagai berikut:
- a. Tingkat kelimpahan organisme megabenthos yaitu berkisar antara 14 – 621 ind/140m² dengan rata-rata 131 ind/140m², yang didominasi oleh organisme bulu babi dan Bintang laut biru;
 - b. Kelompok megabenthos untuk biota ekonomis penting yang terdiri dari Kima, Teripang, Lobster, dan Lola, dimana memiliki tingkat kelimpahan yang kecil akibat pemanfaatan secara berlebihan;
 - c. Analisis ekologi megabenthos diperoleh tingkat keanekaragaman (H) 0,9, indeks keseragaman (E) 0,3, dan indeks dominansi 0,52 yang menunjukkan bahwa organisme megabenthos memiliki keanekaragaman yang rendah sehingga penyebaran jumlah individu setiap spesies dan kestabilan komunitas juga rendah karena mengalami tekanan yang tinggi terhadap biota ekonomis penting sehingga menyebabkan adanya salah satu spesies/genera yang mendominasi populasi megabenthos di perairan KKD Teluk Moramo;
 - d. Secara keseluruhan total tingkat kelimpahan/kepadatan organisme megabenthos pada 17 lokasi pengamatan yaitu 0,007 – 4,44 ind/m² atau 1 – 621 ind/140m² dengan rata-rata 0,58 ind/m² atau 82,2 ind/140m².
4. Kondisi populasi Bambu Laut (*Isis hippuris*) di KKD Teluk Moramo tahun 2024, sesuai dengan hasil monitoring yaitu sebagai berikut:
- a. Tingkat Kelimpahan koloni Bambu Laut pada 10 lokasi pengamatan berkisar antara antara 0 – 123 ind/500m² dengan tingkat kepadatan yang termasuk kategori Jarang – Sedang, sedangkan rata-rata jumlah koloni yaitu 28 ind/500m² dengan kategori “Jarang”;
 - b. Komposisi kelimpahan koloni Bambu Laut berdasarkan ukuran koloni yaitu terdapat 3 kategori ukuran yang didominasi ukuran koloni 0 – 30 cm dengan jumlah koloni 1 – 111 indi/500m² (71,0%) dan ukuran 30-50 cm sebanyak 1 – 30 ind/500m² (21,0%), ukuran 50-80 cm sebanyak 1 – 7 ind/500m² (8,0%).
 - c. Pola sebaran Bambu Laut di Perairan KKD Teluk Moramo berdasarkan

- analisis indeks penyebaran adalah 2,74, bahwa nilai tersebut menunjukkan > 1 (satu) sehingga pola penyebarannya adalah mengelompok dan tidak merata;
- d. Berdasarkan zona terumbu karang, diperoleh bahwa Bambu Laut tersebar diwilayah rataan karang (reef flat) sebanyak 145 koloni (52%) dan daerah tubir (reef slope) sebanyak 134 koloni (48%).
 - e. Secara keseluruhan pada 17 lokasi pengamatan, status kondisi populasi Bambu Laut di KKD Teluk Moramo sampai dengan 2024 yaitu memiliki tingkat kelimpahan antara 0 – 259 Ind/500 m² dengan tingkat kepadatan 0,0 – 0,518 ind/m² yang termasuk kategori Jarang – Melimpah. Rata-rata kelimpahan Bambu Laut yaitu 65 Ind/500 m², sehingga kondisi populasi Bambu Laut di perairan KKD Teluk Moramo termasuk dalam kategori Sedikit.
 - f. Berdasarkan ukuran koloni, dari 17 lokasi pengamatan di perairan KKD Teluk Moramo tahun 2024 diperoleh tingkat kelimpahan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) ukuran yang terdiri dari 0 – 30 cm, 30 – 50 cm, 50 – 80 cm, dan ukuran 80 – 100 cm yang didominasi oleh ukuran 0-30 cm sedangkan ukuran koloni > 100 cm tidak ditemukan.
 - g. Kondisi kelimpahan Bambu Laut di perairan KKD Teluk Moramo dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu terjadi peningkatan populasi pada 7 stasiun dan penurunan populasi pada 3 stasiun, serta tidak terjadi perubahan pada 1 stasiun, sehingga secara keseluruhan populasi Bambu laut terjadi peningkatan yang tidak signifikan yaitu dari 1.023 individu dengan rata-rata 93 Ind/500m² pada tahun 2023 menjadi 1.048 individu dengan rata-rata 95 Ind/500m² pada tahun 2024 dengan kategori Sedang;
 - h. Berdasarkan ukuran koloni Bambu Laut di KKD Teluk Moramo, diperoleh bahwa pada ukuran koloni 0-30 cm terjadi peningkatan jumlah koloni/individu dari 634 koloni pada tahun 2023 menjadi 744 koloni pada tahun 2024, dimana hasil pengamatan tercatat sebanyak 135 koloni bambu laut ukuran <10 cm yang menandakan bahwa populasi bambu laut di KKD Teluk Moramo terjadi penambahan individu/koloni baru.
 - i. Beberapa ancaman populasi bambu laut di KKD Teluk Moramo yaitu Kegiatan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (bom), meningkatnya populasi makro alga yang menutupi bambu laut, terjadi sedimentasi dan kekeruhan, pemanfaatan ilegal Bambu laut pada tahun 2023 dan 2024.
5. Kondisi padang lamun di KKD Teluk Moramo tahun 2024, sesuai dengan hasil monitoring yaitu sebagai berikut :
- a. Persentase tutupan lamun di 10 stasiun pengamatan yaitu 2,27 – 46,88% kategori Jarang – Sedang, dengan Status Rusak yaitu kondisi miskin – kurang kaya/kurang sehat, dan rata-rata tutupan lamun yaitu 21,961% kategori jarang dengan status ekosistem rusak yaitu termasuk kondisi miskin yang didominasi oleh jenis E acoroides;
 - b. Jenis lamun yang teridentifikasi di perairan KKD Teluk Moramo yaitu sebanyak 7 (tujuh) jenis yaitu dari suku Cymodocea sebanyak 3 (tiga) jenis yaitu Cymodocea rotundata (Cr), Cymodocea serrulate (Cs), Sryngodium isoetifolium (Si) dan dari suku Hydrocharitaceae sebanyak 4 (empat) jenis yaitu Enhalus acoroides (Ea), Thalassia hemprichii (Th), Halopila ovalis (Ho), dan Halophila minor (Hm).
 - c. Terjadi penurunan tutupan lamun yang signifikan dari tahun 2018 sampai 2024, dimana tahun 2018 kondisi tutupan lamun 25 – 85% dengan rata-rata

- 44,38% katgeori sedang dengan status ekosistem rusak yaitu kondisi kurang kaya/kurang sehat.
- d. Beberapa ancama ekosistem padang lamun di KKD Teluk Moramo yaitu aktivitas nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya ikan, aktivitas tambat labuh perahu, pengembangan permukiman dan pelabuhan/dermaga.
 - e. Kondisi ekoeistem mangrove di KKD Teluk Moramo tahun 2024, sesuai dengan hasil monitoring yaitu sebagai berikut :
 - f. Persentase tutupan tajuk mangrove yaitu 31,88 – 84,96% dengan kriteria jarang sampai dengan sangat padat dengan kondisi rusak sampai dengan baik dan rata-rata persentase tutupan tajuk yaitu 70,12% dengan kriteria baik dan tutupan sedang.
 - g. Kerapatan pohon yaitu 767 – 2.667 phon/ha dengan kriteria rusak kerapatan jarang sampai dengan kriteria baik kerapatan sangat padat, dan rata-rata kerapatan yaitu 1.648 pohon/ha dengan kriteria baik kerapatan sangat padat.
 - h. Terjadi penurunan persentase tutupan tajuk sebesar 2,72% dan kerapatan pohon sebesar 9,7% dari tahun 2018, dimana factor penurunan tersebut disebabkan oleh adanya tebangan pohon hampir semua stasiun yang berkisar antara 200 – 433 tebangan/ha.
6. Kondisi Sosial Ekonomi di KKD Teluk Moramo tahun 2024, sesuai dengan hasil monitoring yaitu sebagai berikut :
- a. Sebagian besar pekerjaan utama Masyarakat yaitu berprofesi sebagai nelayan 72,41% sedangkan 27,59% memiliki pekerjaan utama lainnya dan sebanyak 89% nelayan tidak memiliki pekerjaan sampingan sedangkan 38,62% nelayan memiliki pekerjaan sampingan seperti berkebun dan ternak hewan;
 - b. Persentase tingkat pendidikan masyarakat yaitu SD sebesar 47,58%, SMP/SMA sebesar 44,14%, S1 sebesar 4,14, dan tidak sekolah 4,14%, serta suku daerah didominasi dari suku Bajo sedangkan suku masyarakat di wilayah daratan bervariasi yaitu Bajo, Tolaki, Muna, Bugis, Buton, dan lainnya.
 - c. Sebesar 72,4% Masyarakat pesisir KKD Teluk Moramo memiliki persepsi yang baik terhadap lingkungan laut dan 70,1% memiliki persepsi dan kesadaran yang baik terhadap Kawasan konservasi. Sedangkan 29,0 – 30,5% masyarakat pesisir memiliki pemahaman yang kurang terkait dengan kawasan konservasi dan lingkungan laut.
 - d. Secara umum rumah tangga di KKD Teluk Moramo memiliki perahu/kapal penangkapan ikan sebanyak 84,8% yang digunakan sebagai sarana utama dalam pemanfaatan sumberdaya ikan dan 15,2% rumah tangga tidak memiliki perahu. Jenis perahu didominasi perahu bermotor sebesar 96% dan hanya 4% perahu tanpa motor yang dilengkapi dengan alat penangkapan ikan yang sebagian besar didominasi oleh jenis alat tangkap pancing dan jarring.
 - e. Rumah tangga nelayan di KKD Teluk Moramo dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan minimal 1 kali trip dalam satu hari, dimana rata-rata nelayan melakukan operasi penangkapan ikan dalam satu bulan yaitu 20 hari;
 - f. Pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan pertrip dalam 1 hari yaitu berkisar antara Rp.20.000 – Rp.500.000,- sehingga total pendapatan rata-rata rumah tangga yaitu berkisar antara Rp.400.000 - Rp.10.000.000,/bulan,

dimana sebagian besar pendapatan rumah tangga nelayan berada pada kelompok pendapatan >Rp.1.000.000, - Rp. 2.000.000,-.

- g. Rata-rata biaya operasional kegiatan penangkapan ikan per trip yaitu Rp.20.000 – Rp.160.000,-, dengan total biaya operasional rata-rata yaitu Rp.200.000-Rp.3.200.000,/bulan.

3.2.3 Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder KK di Kawasan Konservasi Daerah



Kegiatan Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder dilaksanakan di 3 Kawasan Konservasi Daerah yakni Kawasan Konservasi Daerah Teluk Moramo, Kawasan Konservasi Daerah Teluk Gorontalo, dan Kawasan Konservasi Daerah Banggai Dalaka (Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Perairan Sekitarnya). Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi anggota kelompok konservasi dan pengelola kawasan konservasi terkait keahlian selam dasar yang akan diaplikasikan dalam menjalankan tugas monitoring kondisi fisik dan biota bawah laut di Kawasan Konservasi Daerah dan meningkatkan pengetahuan mengenai monitoring terumbu karang di Kawasan Konservasi Daerah serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran

menjaga ekosistem/lingkungan Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Daerah. Sasaran kegiatan Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder adalah anggota kelompok konservasi dan pengelola Kawasan Konservasi Daerah.

A. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan hasil bimbingan teknis sertifikasi selam di KKD Teluk Moramo dilaksanakan pada 28-31 Oktober 2024 dan di KKD Teluk Gorontalo 6 - 9 November 2024 serta di KKD Banggai Dalaka 11-14 November 2024.

B. Hasil Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder di 3 Kawasan Konservasi Daerah yakni Kawasan Konservasi Daerah Teluk Moramo, Kawasan Konservasi Daerah Teluk Gorontalo, dan Kawasan Konservasi Daerah Banggai Dalaka (Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Perairan Sekitarnya) berupa Sertifikasi Selam Tingkat Open Water dengan peserta Sertifikasi Selam sebanyak 45 orang (masing-masing lokasi sejumlah 15 orang) dinyatakan memenuhi persyaratan kelulusan dan menerima Sertifikat Selam ADSI (Association of Diving School International) tingkat Open Water.

3.3 Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL)

Indikator kinerja diantara UPT PSPL hampir sama satu sama lain. Untuk detail perbandingan indikator kinerja beserta target dan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di lingkup DJPRL pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL

Indikator Kinerja		BPSPL MAKASSAR	BPSPL PONTIANAK	BPSPL PADANG	BPSPL DENPASAR	LPSPL SERANG	LPSPL SORONG	
1	Nilai PNBP (Rp.000)	Target	500.000,00	2.000.000	650.000	950.000	1.216.260	1.100.000
		Capaian	849.310,00	2.421.607	1.087.770	3.035.051	2.629.830	1,687,478
		%	169,86	0	0	0	0	0
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja (Orang)	Target	320	320	320	160	320	320
		Capaian	320	320	323	160	320	320
		%	100	100	100	100	100	100
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja (Dokumen)	Target	3	3	3	3	3	3
		Capaian	3	3	3	3	3	3
		%	100	100	100,01	100	100	100
4	Persentase Peningkatan nilai Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Target		0				
		Capaian		0				
		%		0				
4	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan	Target	2	1	3	2	-	1
		Capaian	5	1	6	2	-	2
		%	250	100	200	100	-	200

	Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja (Daerah)							
5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja (Kesepakatan)	Target	1	1	1	1	1	1
		Capaian	2	1	2	1	4	3
		%	200	100	200	100	400	300
	Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	Target		1				
		Capaian		1				
		%		100				
6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja (Kelompok)	Target	3	2	3	3	2	3
		Capaian	3	2	3	3	2	3
		%	100	100	100	100	100	100
7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	Target	50	60	30	25	40	50
		Capaian	105	70	45	25	40	90
		%	210	116	150	100	100	0
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja (Jenis)	Target	5	7	8	6	4	4
		Capaian	9	8	11	6	7	6
		%	180	144	137,5	100	175	150

9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja (Jenis)	Target	1	4	5	5	4	3
		Capaian	1	8	8	6	6	5
		%	100	200	160	120	150	166
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja (Dokumen)	Target	1	1	1	1	1	1
		Capaian	1	1	1	1	1	1
		%	100	100	100	100	100	100
11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar	Target	4	4	4	2	4	4
		Capaian	4	4	4	2	4	4
		%	100	100	100	100	100	100
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup (Nilai)	Target	93,76	93,76	93,76	93,76	93,76	93,76
		Capaian	99,79	94,98	99,61	99,47	97,42	95,82
		%	106	101	106	106	104	102
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	Target	71	71	71	71	71	71
		Capaian	100	98,11	98,32	96,42	100	98,70
		%	141	138	138	136	141	139
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja (Nilai)	Target	75	75	75	75	75	75
		Capaian	87,41	90,81	92,85	87,57	86,56	81,64
		%	117	0	0	0	0	0
15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup (Indeks)	Target	88	88	88	88	88	88
		Capaian	90,78	93,65	92,85	91,36	91,21	93,16
		%	103	106	106	104	104	106

16	Nilai PM SAKIP Lingkup (Nilai)	Target	81	81	81	81	81	81
		Capaian	88,6	85,55	89,85	85,55	86,85	85,30
		%	109	0	0	0	0	0
17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup (Dokumen)	Target	4	4	4	4	4	4
		Capaian	4	4	4	4	4	4
		%	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Unit Kerja Lingkup yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Target	94	94	94	94	94	94
		Capaian	133.3	133.33	133.3	133.3	133.3	133.3
		%	120	120	120	120	120	120
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Target	80	80	80	80	80	80
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	120	120	120	120	120	120
20	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup (%)	Target	100	100	100	100	100	100
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	100	100	100	100	100	100
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup(%)	Target	80	80	80	80	80	80
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	125	125	125	125	125	125
22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup (nilai)	Target	65	65	65	65	65	65
		Capaian	80,54	81,36	83,78	98,80	86,35	91,92
		%	124	125	129	152	133	140

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 45. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2024

Program	Anggaran Rupiah Murni, PNBP, dan PHLN			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	5,991,220,000	5,842,516,259	97.52	148,703,741
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800,000,000	782,244,631	97.78	17,755,369
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	150,000,000	146,977,647	97.99	3,022,353
Perencanaan Ruang Laut	1,100,000,000	1,095,793,017	99.62	4,206,983
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	12,334,725,000	12,257,199,635	99.37	77,525,365
TOTAL	20,375,945,000	20,124,731,189	98.77	251,213,811

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2024, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.20.375.945.000,-** yang terdiri dari sumber anggaran Rupiah Murni, PNBP, dan PHLN. Realisasi tahun 2024 adalah sebesar **Rp.20.124.731.189-** atau **98.77% dari Pagu.**

Adapun realisasi tersebut adalah realisasi dengan blokir anggaran penghematan perjalanan dinas. Apabila realisasi **tanpa blokir adalah sebesar 99.81%** dimana ada **blokir sebesar Rp. 212.769.000 -.** Sisa anggaran **dengan blokir** adalah sebesar **Rp 251.318.811.** Sedangkan Sisa anggaran **tanpa blokir** adalah sebesar **Rp 38.444.811.**

Selama tahun 2024 revisi anggaran sudah dilaksanakan beberapa kali baik itu revisi yang bersifat kewenangan KPA yaitu Perihal Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan yang bersifat kewenangan DJA maupun Kanwil yaitu revisi DIPA. Berikut adalah daftar revisi yang telah dilaksanakan di BPSPL Makassar:

Tabel 46. Revisi Anggaran BPSPL Makassar tahun 2024

Tanggal	Keterangan
15 Januari 2024	Revisi DIPA 1 dalam rangka Pembukaan Blokir pada KRO: REB. Konservasi Jenis/Spesies; RO: REB.002.053: Sarana Prasarana Keanekaragaman hayati menjadi KRO : 2362.RAL.Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan RO: 2362.RAL.001Penyediaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan)

2 Februari 2024	Revisi DIPA 2 dalam rangka Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA melalui surat : B.207/BPSPL.3/RC.420/II/2024 perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA sesuai surat Kepala BPSPL Makassar Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431/2024
19 Maret 2024	Revisi DIPA 3 dalam Rangka Untuk memenuhi administrasi pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan Surat Kepala BPSPL Makassar Nomor : B.449/BPSPL.3/RC.420/III/2024
3 April 2024	Revisi DIPA 4 dalam rangka revisi Halaman III DIPA sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.600/BPSPL.3/RC.420/IV/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
3 Mei 2024	Revisi DIPA terpusat pada Direktorat Jenderal PKRL dalam rangka penambahan anggaran yang bersumber dari PHLN untruk program program Proyek Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)
29 Mei 2024	Revisi DIPA 5 Dalam rangka menyelaraskan penyusunan RPD Halaman III DIPA periode triwulan II tahun 2024 dengan formula indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sesuai Perdirjen Perbendaharaan no PER-5/PB/2024. Revisi anggran sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar nomor: B.994/BPSPL.3/RC.420/V/2024 perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431
20 Juni 2024	Revisi DIPA pembukaan blokir untuk kegiatan sarana prasarana keanekaragaman hayati laut dan pemberdayaan enokonimi masyarakat, sesuai surat Nomor: 132/DJPKRL/RC.420/VI/2024 Perihal usulan revisi anggaran tanggal 13 Juni 2024 dan pengesaran revisi oleh Kementerian Keuangan melalui surat nomor: S-382/AG/AG.3/2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP TA 2024 (Revisi ke-3)
11 Juli 2024	Revisi DIPA 7 dalam rangka revisi Halaman III DIPA sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.1364/BPSPL.3/RC.420/VII/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
1 Agustus 2024	Revisi DIPA 8 dalam rangka Pemuktahiran Data Petunjuk oprasional Kegiatan (POK) sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.1502/BPSPL.3/RC.420/VIII/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431
7 Agustus 2024	Revisi DIPA 9 dalam rangka DIPA Penambahan Anggran yang bersumber dari Pinjaman dan hibah luar negeri secara terpusat Lingkup DJPKRL sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: B.188/DJPKRL/RC.420/VIII/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran

11 September	Revisi DIPA 10 dalam rangka Pemuktahiran Data Petunjuk operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.1795/BPSPL.3/RC.420/IX/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431
12 Oktober 2024	Revisi DIPA 11 dalam rangka Pemuktahiran Data Petunjuk operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.2039/BPSPL.3/RC.420/X/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431
13 Oktober 2024	Revisi 12 dalam rangka revisi Petunjuk operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan wewenang KPA. revisi ini bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan Lautra yang bersumber dari PHLN
26 Oktober 2024	Revisi 13 dalam rangka revisi Petunjuk operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan wewenang KPA. revisi ini bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari RM dan PNB
18 November 2024	Revisi DIPA 14 dalam rangka Usulan Revisi Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.2284/BPSPL.3/RC.420/XI/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431
04 Desember 2024	Revisi DIPA 15 dalam rangka Pemuktahiran Data Petunjuk operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.2398/BPSPL.3/RC.420/XII/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431 tanggal
13 Desember 2024	Revisi DIPA 16 dalam rangka Pemuktahiran Data Petunjuk operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.2480/BPSPL.3/RC.420/XII/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431
21 Desember 2024	Revisi 17 dalam rangka revisi Petunjuk operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan kewenangan KPA, revisi ini bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuke seluruh kegiatan baik bersumber dari PHLN dan PNB serta RM
13 Desember 2024	Revisi DIPA 18 dalam rangka Pemuktahiran Data Petunjuk operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.2558/BPSPL.3/RC.420/XII/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431



photo by: Audi Sumendap (BPSPL Makassar)

BAB IV

PENUTUP



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024 adalah kategori **istimewa** dengan nilai kinerja organisasi **110.97%**, sementara capaian realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp.20.124.731.189-** atau **98.77% dari Pagu Rp.20.375.945.000,-** Adapun realisasi tersebut adalah realisasi **dengan blokir** anggaran penghematan perjalanan dinas. Apabila **realisasi tanpa blokir adalah sebesar 99.81%** dimana ada **blokir sebesar Rp. 212.769.000.**

Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1 Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	500.000	849.310,891	168.3 Atau 120 (kinerjaku)
2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	320	320	100
3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3	3	100
4 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	2	5	250 Atau 120 (kinerjaku)
5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	1	2	200 Atau 120 (kinerjaku)
6 Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3	3	100

7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (orang)	50	105	210 Atau 120 (kinerjaku)
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6	8	133.3 Atau 120 (kinerjaku)
9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5	9	180 Atau 120 (kinerjaku)
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1	1	100
11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar	4	4	100
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93.76	99.79	106.43
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	71	100	140,84 atau 120 (kinerjaku)
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	75	87.41	116.55
15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	88	90.78	103.16
16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	81	88.6	109.38
17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4	4	100

18	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	133.3	141.81 Atau 120 (kinerjaku)
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	100	125 Atau 120 (kinerjaku)
20	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)	100	100	100
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	80	100	125 Atau 120 (kinerjaku)
22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar (nilai)	65	80.85	124.38 Atau 120 (kinerjaku)

4.2 Rekomendasi

Untuk mendukung capaian kinerja BPSPL Makassar tahun 2025, maka direkomendasikan adanya pelaksanaan dialog kinerja pada triwulan I. Pelaksanaan dialog kinerja ini untuk menentukan atau *Refreshment* anggota tim kelompok kerja, proses cascading atau penyusunan MPH, serta Langkah taktis untuk meningkatkan kinerja BPSPL Makassar tahun 2025. Selain itu, direkomendasikan juga untuk menaikkan nilai IP ASN agar seluruh pegawai didorong untuk mengikuti pelatihan/pendidikan/Bimbingan Teknis/Seminar atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

4.3 Tindak Lanjut

Terdapat rekomendasi pada periode sebelumnya yang sudah di tindak lanjuti dengan bukti data terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 47. Tindak lanjut atas rekomendasi Tahun 2024

Rekomendasi Tahun 2024	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2024	Tautan Data Dukung
Rekomendasi Triwulan I 2024	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan I 2024	
Pengusulan pembukaan blokir anggaran. Terdapat anggaran yang masih diblokir	Anggaran yang diblokir telah dibuka pada akhir Bulan Juni dan kegiatan akan	https://bit.ly/4gyACM4

sebesar Rp. 570.000.000, - dengan rincian Rp. 200.000.000,- untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Rp. 370.000.000,- untuk Penyediaan Sarana Prasarana		
Rekomendasi Triwulan II 2024	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan II 2024	
Pelaksanaan monitoring atau pengendalian pemanfaatan ruang laut di sembilan titik	Monitoring telah dilaksanakan sesuai jadwal dengan realisasi delapan titik karena satu titiknya menunggu konfirmasi subjek hukum	https://bit.ly/4gyACM4
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan universitas Samratulangi Manado untuk penyusunan rancangan perjanjian kerja sama	Penyusunan RKT dilaksanakan dan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama pada TW IV	https://bit.ly/4gyACM4
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk menilai efektivitas bantuan KOMPAK yang disalurkan pada tahun 2023	Pelaksanaan Monitoring telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan di TW IV dengan tambahan kelompok yang sudah disalurkan bantuan pada tahun 2024	https://bit.ly/4gyACM4
Pelaksanaan survei Bambu Laut di Sulawesi Selatan dan Pelaksanaan survei monitoring Napoleon di Sulawesi Tenggara	Survei Bambu Laut di Sulawesi Selatan dan Survei Monitoring Napoleon di Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan	https://bit.ly/4gyACM4
Pelaksanaan Acara Puncak Bulan Cinta Laut di Kota Makassa	Pelaksanaan acara puncak Bulan Cinta Laut telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2029	https://bit.ly/4gyACM4
Percepatan realisasi anggaran minimal sampai dengan 75% pada akhir triwulan III	Realisasi anggaran telah terealisasi sebesar 79.8% apabila dari sumber dana Rupiah Murni dan PNBPN, namun realisasi tersebut terkoreksi menjadi 69.7%	https://bit.ly/4gyACM4

	karena terdapat tambahan anggaran dari sumber dana PHLN sebesar 2,5 Milyar rupiah	
Rekomendasi Triwulan III 2024	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan III 2024	
Perubahan Perjanjian Kinerja karena terdapat penambahan anggaran dari sumber pinjaman luar negeri untuk kegiatan Lautra (Laut Insan Sejahtera)	Telah dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja yang telah memuat anggaran dari sumber pinjaman luar negeri untuk kegiatan Lautra (Laut Insan Sejahtera) pada Bulan Oktober dan Desember 2024.	https://bit.ly/4iexd6z
Pelaksanaan monitoring atau pengendalian pemanfaatan ruang laut di satu titik;	Telah dilaksanakan monitoring Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut pada tanggal 1-3 Oktober 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan subjek hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Wakatobi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi	https://bit.ly/4hTjvpm
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk menilai efektivitas bantuan KOMPAK yang disalurkan pada tahun 2023 dan 2024	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi untuk menilai efektivitas bantuan KOMPAK yang disalurkan pada tahun 2023 dan 2024 antara lain : Pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Kelompok Konservasi Lawarani dan Kelompok Lopie Bahari Nusantara, tanggal 29 Oktober kepada Kelompok Sangkarrang Ocen Dive, tanggal 20 November kepada Kelompok OK Dive Community (ODC), tanggal 5 Desember kepada Kelompok Orca	https://bit.ly/41bg47Q
Pelaksanaan survei Monitoring BCF di Kab. Banggai, Sulawesi Tengah;	Telah dilaksanakan Kegiatan monitoring Banggai Cardinalfish dan Habitatnya d pada tanggal 1 November - 10 November 2024 dengan Lokasi monitoring di perairan	https://bit.ly/42UP5Ps

	Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah	
Percepatan realisasi anggaran sampai dengan 99% pada akhir triwulan IV	Capaian realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.20.124.731.189- (Dua Puluh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 99,81% dari Pagu Rp.20.163.176.000,- (Dua Puluh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) (Pagu dikurangi blokir) atau 98,77 % dari Pagu 20.375.945.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) (Pagu Total dengan Blokir)	https://bit.ly/4gyACM4



LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	1.	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	500.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Makassar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		18. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Makassar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Makassar (%)	80
		22. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai)	65

Data Anggaran

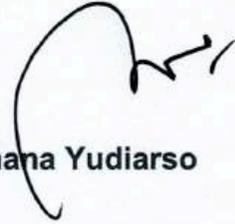
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.465.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	800.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	150.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.994.172.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Tahun 2024		17.509.712.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar


Permana Yudiarso



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Permana Yudiarso**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar


Permana Yudiarso

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	1.	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	500.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3
		7.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	50

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	71
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Makassar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		18. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Makassar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Makassar (%)	80
		22. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	5.991.220.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	800.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	150.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.994.172.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Tahun 2024		20.035.392.000

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar


Permana Yudiarso



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenpr@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Permana Yudiarso**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar


Permana Yudiarso

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	1.	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	500.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3
		7.	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	50

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	71
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Makassar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4

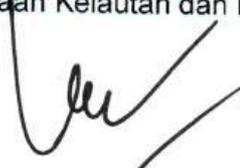
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		18. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Makassar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Makassar (%)	80
		22. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	5.991.220.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	800.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	150.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	12.334.725.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Tahun 2024		20.375.945.000

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar


Permana Yudiarso



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

**Pengguna Manajemen Pengetahuan
Paling Aktif Tahun 2023**

Permana Yudiarso

Terbaik 1





MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.678/MEN-KP/IV/2024

Penghargaan diberikan kepada:

**Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir Dan Laut Makassar**

sebagai unit kerja berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Jakarta, 4 April 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan RI



Sakti Wahyu Trenggono



Certificate of Registration

Registration No. : QAIC / ID / 11128 - A

QAI Indonesia Certification

Hereby grants to:

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR & LAUT MAKASSAR

Jl. Makmur Dg. Sitakka No. 129, Kec. Turikale, Kab. Maros, Sulawesi Selatan

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or form only the address given below in accordance with the Quality Management System in compliance with

ISO 9001:2015

Approved Scope to which this Certificate refers:

Provision of Public Administration in Monitoring Trading Traffic of Endangered and Protected Fish

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirement may be obtained by consulting the organization)

For and on behalf of QA Indonesia

Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 08 October 2024 - Re-assessment Date : 29 December 2025

Date of Initial Registration : 29 December 2023 - Certificate Expiry Date : 29 December 2026

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board.

**QAI INDONESIA
CERTIFICATION**

Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng,
Jakarta, 10310
Telp: 021 - 21230866
Email: admin@qai.co.id
Website QAI: www.qai.co.id
Website Acreditor: www.ascb.com





Certificate of Registration

Registration No. : QAIC / ID / 11128 - E

QAI Indonesia Certification

Hereby grants to:

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR & LAUT MAKASSAR
Jl Makmur Dg. Sitakka No. 129, Kec. Turikale, Kab. Maros, Sulawesi Selatan

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or form only the address given below in accordance with the Anti-bribery Management System in compliance with

ISO 37001:2016

Approved Scope to which this Certificate refers:

Provision of Public Administration in Monitoring Trading Traffic of Endangered and Protected Fish

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 37001:2016 requirement may be obtained by consulting the organization)

For and on behalf of QAI Indonesia

Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 26 August 2024 - **Re-assessment Date** : 26 August 2025

Date of Initial Registration : 26 August 2024 - **Certificate Expiry Date** : 26 August 2027

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board. This certificate has a three-year certification cycle and must be renewed every year before the re-assessment date.

QAI INDONESIA
CERTIFICATION

Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng,
Jakarta, 10310

Telp: 021 - 21230866

Email: admin@qai.co.id

Website QAI: www.qai.co.id

Website Acreditor: www.ascb.com





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**Bijak
mengelola
LAUT**

**#2024
KKP BEYOND**